



RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Dinas Perhubungan
Kota Samarinda



**DISHUB
SAMARINDA**
Bergerak Menuju Kota Peradaban



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia- Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Startegis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan jabaran dari RPJMD Pemerintah Kota Samarinda yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah dengan mempedomani program tahunan yang dicantumkan dalam Rencana Strategis (Renstra) ini. Dalam penyusunannya Renstra ini berpedoman kepada Perda RPJMD Kota Samarinda Tahun 2024 - 2029 dalam sistematika penulisan Renstra OPD sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017

Pada Akhirnya kami menyadari bahwa Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2025-2029 masih belum sempurna, untuk itu saran dari pihak terkait sangat kami hargai sebagai pembelajaran (Learning Process) demi penyempurnaan Rencana Strategi (Renstra) dimasa yang akan datang.

Samarinda 22 September 2025

Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda



HMT. MANALU, S.SiT.,M.Sc

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19770328 200012 1 001



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-4
1.3 Maksud dan Tujuan	I-5
1.4 Sistematika Penulisan	I-5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISSU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

2.1 Sistematika Penulisan	
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan	II-1
B. Sumber Daya Dinas Perhubungan	II-22
C. Sumber Daya Lainnya	II-24
D. Kinerja Dinas Perhubungan	II-25
E. Keadaan Umum Wilayah	II-27
F. Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Perhubungan	II-41
G. Mitra Dinas Perhubungan dalam Pemberian Pelayanan	II-41
2.2 Sistematika Penulisan	
A. Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan	II-47
B. Isu Strategis Dinas Perhubungan	
C. Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Samarinda	II-54



BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Visi dan Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-1
3.2 Tinjauan RTRW Kota Samarinda	III-4
3.3 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Samarinda	III-6
3.4 Strategi dan Arah Kebijakan Perhubungan Kota Samarinda	III-8
3.5 Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Samarinda	III-20

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

4.1 Program Sektor Perhubungan	IV-1
4.2 Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-12
4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) Perangkat Daerah	IV-43
4.4 Target Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	IV-92

BAB V PENUTUP



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jabatan Struktural dan Fungsional Tahun 2025	II-22
Tabel 2.2.	Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2025	II-22
Tabel 2.3.	Pegawai Tidak Tetap Harian / Pegawai Tidak Tetap Bulanan Tahun 2025	II-23
Tabel 2.4.	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2025	II-23
Tabel 2.5.	Aset Dinas Perhubungan Tahun 2025	II-24
Tabel 2.6.	Data Sarana Operasional Dinas Perhubungan Tahun 2025	II-25
Tabel 2.7.	Pencapaian Dinas Perhubungan Kota Samarinda	II-26
Tabel 2.8.	Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kota Samarinda (km), 2021–2024	II-27
Tabel 2.9.	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kota Samarinda (km), 2021–2023	II-27
Tabel 2.10.	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kota Samarinda (km), 2021–2023	II-28
Tabel 2.11.	Terminal di Kota Samarinda	II-30
Tabel 2.12.	Trayek Angkutan Umum di Kota Samarinda	II-31
Tabel 2.13.	Titik Kemacetan Kota Samarinda	II-35
Tabel 2.14.	Kapal Sungai Dan Trayek Yang Melayani Angkutan Sungai Kalimantan Timur	II-38
Tabel 2.15.	Dermaga Angkutan Sungai di Kota Samarinda	II-40
Tabel 2.16.	Jumlah Penumpang Pesawat Udara di Bandar Udara APT Pranoto Samarinda, 2023	II-40
Tabel 2.17.	Lembaga-Lembaga Yang Berkaitan Dengan Sektor Perhubungan Menurut Kewenangannya	II-42



Tabel 3.1.	Perumusan Sektor Perhubungan Dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Daerah	III-12
Tabel 3.2.	Keterkaitan Kinerja RPJMD - Renstra Dinas	III-14
Tabel 3.3.	Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran	III-16
Tabel 3.4.	Perwujudan Kebijakan Lintas Antar Bidang OPD (Eksternal)	III-17
Tabel 3.5.	Perwujudan Kebijakan Lintas Antar Bidang OPD (Internal)	III-18
Tabel 3.6.	Kesesuaian Misi Pembangunan dan Misi Perhubungan Sebagai Dasar Tujuan Renstra Perhubungan	III-21
Tabel 3.7.	Tujuan, Sasaran, Program dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Perhubungan Jangka Menengah	III-24
Tabel 4.1.	Program Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Samarinda (Tahun 2026-2030)	IV-10
Tabel 4.2.	Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra PD Dalam Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Samarinda (Tahun 2025-2029)	IV-13
Tabel 4.3.	Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan OPD Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2025-2029	IV-44
Tabel 4.4.	Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra OPD Dinas Perhubungan Kota Samarinda	IV-87
Tabel 4.5.	Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra PD	IV-91
Tabel 4.6.	Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra PD	IV-91
Tabel 4.7.	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perhubungan Tahun 2025	IV-93
Tabel 4.8.	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2025-2029	IV-96



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Samarinda	II-2
Gambar 2.2	Peta Jaringan Transportasi Kota Samarinda	II-29
Gambar 2.3	Lokasi Terminal Angkutan Jalan di Kota Samarinda	II-32
Gambar 2.4	Peta Jalur Trayek Angkutan Kota di Kota Samarinda	II-33
Gambar 2.5	Peta Jaringan Area Traffic Control System (ATCS)	II-37
Gambar 4.1.	Pohon Kinerja Dinas Perhubungan	IV-95



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis PD (Renstra-PD).

Perangkat Daerah (PD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan Tujuan dan Sasaran organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap PD perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap PD untuk jangka waktu lima tahun. Renstra PD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah dan bersifat indikatif.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda, maka Dinas Perhubungan Kota Samarinda mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian unsur Pemerintahan yang menjadi unsur kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Perhubungan.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Samarinda mempunyai fungsi antara lain adalah Perumusan Kebijakan teknis dibidang Perhubungan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis, dibidang Lalu Lintas Jalan, dibidang Prasarana, dibidang Keselamatan, dibidang Angkutan, dan penyelenggara urusan Kesekretariatan. Selain itu, tugas lainnya adalah terkait dengan administrasi, SDM, ketatalaksanaan organisasi, penganggaran, dan lain sebagainya.S



Berdasarkan ketentuan perundangan dan peraturan daerah tentang tugas pokok dan fungsi diatas perlu disusun dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan untuk 5 (lima) tahun kedepan dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2024 merupakan kelanjutan dan penyesuaian Renstra Perhubungan berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah untuk periode tahun 2025-2029. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

Dengan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2025-2029 ini berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang berkaitan dengan bidang Perhubungan. Perubahan Rencana Strategis ini memuat suatu dokumen perencanaan yang berisi tentang Visi Pemerintah Kota Samarinda 5 (lima) tahun ke depan yang dijabarkan dalam beberapa Misi yang mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas disertai arah kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan untuk pencapaiannya.

Dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Samarinda dilakukan pertemuan dengan seluruh anggota tim untuk persamaan persepsi dan memberikan pemahaman yang diperlukan. Adapun aspek-aspek orientasi meliputi : Peraturan perUndang-Undangan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah yang meliputi Keuangan Negara, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota, Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana penyelenggaraan daerah, dan tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan Dokumen Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kota Samarinda, dan teknis menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah yang disusun. Untuk itu, dalam penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kota



Samarinda perlu dikumpulkan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggung jawabkan. Adapun data dan informasi yang harus disiapkan antara lain: Peraturan perundang-undangan yang terkait, kebijakan pemerintah yang terkait, dokumen-dokumen seperti RTRW Kota Samarinda, Renstra Kementerian Perhubungan serta Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Timur, hasil evaluasi Renstra Dinas Perhubungan Kota Samarinda periode lalu. Dalam kaitan dengan sistem Perencanaan Pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka keberadaan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kota Samarinda merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda khususnya dalam menjalankan rencana agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda, serta juga telah menyesuaikan dengan rencana strategis Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur. Renstra Dinas Perhubungan Kota Samarinda setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda.

Dengan melihat kapasitas dan lingkup kewenangan Dinas Perhubungan Kota Samarinda terhadap penyelenggaraan dan perencanaan pada sector transportasi dalam wilayah Kota Samarinda, maka terdapat beberapa kegiatan yang hanya berfungsi sebagai kegiatan koordinatif. Penyelenggaraan kegiatan transportasi di wilayah Kota Samarinda sesuai dengan kewenangannya yang secara langsung oleh Kementerian Perhubungan adalah Bandar Udara, perencanaan kereta api, penyelenggaraan jaringan jalan nasional dan lain sebagainya adalah berupa kegiatan yang bersifat koordinatif. Hal ini juga dalam tataran kewenangan oleh Pemerintah Provinsi, berupa terminal, penyelenggaraan transportasi angkutan sungai lintas antar kabupaten, jaringan jalan dan lain sebagainya juga dilakukan secara koordinatif.

Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, keberadaan Renja Dinas Perhubungan Kota Samarinda akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Samarinda.



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Ketentuan hukum yang melandasi penyusunan Renstra Strategis ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- 3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tetang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda
- 10) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi Pemuhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 11) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 12) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda;
- 13) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Salinan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah
- 14) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025;



- 15) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2025;
- 16) Peraturan Walikota Samarinda Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Samarinda, dimaksudkan untuk menyusun dokumen arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan bagi Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kurun waktu 5 tahun ke depan mengacu kepada RPD tahun 2025-2029.

Adapun tujuan Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Samarinda yaitu :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas dibidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2025-2029 dapat tercapai,
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal,
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan perhubungan tahunan,
4. Menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Samarinda 2025-2029 dibuat dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

B. Landasan Hukum



Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

C. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

D. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Issu Strategis Dinas Perhubungan

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Mengemukakan tentang susunan organisasi SKPD Dinas Perhubungan Kota Samarinda dan menguraikan tugas dan fungsi pejabat serta lingkup kegiatan masing-masing bidang

B. Sumber Daya Dinas Perhubungan

Menguraikan tentang Sumber Daya Aparatur yang merupakan unsur penggerak berjalannya roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

C. Sumber Daya Lainnya

Menguraikan tentang prasarana dan sarana yang menjadi aset Dinas Perhubungan Kota Samarinda, baik yang bersifat bergerak maupun tidak bergerak.

D. Keadaan Umum Wilayah

Menggambarkan kondisi wilayah Kota Samarinda yang meliputi kondisi fisik lingkungan, kependudukan, kegiatan ekonomi, dan penyelenggaraan transportasi

E. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan

Menguraikan permasalahan masing-masing bidang yang ada yang meliputi bidang lalu lintas, prasarana, keselamatan, dan angkutan.



F. Kelembagaan

Menjelaskan kedudukan dan fungsi struktur lembaga pemerintah daerah melalui dinas dalam perencanaan dan pembangunan transportasi dan keterkaitannya secara vertikal dan horizontal antar lembaga pemerintah.

G. Isu Strategis Dinas Perhubungan

Menjelaskan beberapa isu strategis Dinas Perhubungan yang dihadapi dalam penyelenggaraan transportasi di daerah

H. Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

Memuat tentang beberapa lingkungan strategis atas penyelenggaraan transportasi dari sudut Padang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

A. Telaahan Visi dan Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menguraikan tentang visi dan misi pembangunan daerah yang akan dicapai yang telah diselaraskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2025-2029. Visi misi pembangunan tersebut yang kemudian menjadi acuan dalam perumusan visi misi perhubungan yang akan menghasilkan keserasian dan keselarasan program kegiatan di sector perhubungan.

B. Tinjauan RTRW Kota Samarinda

Menguraikan pokok pikiran yang termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda berdasarkan tujuan perencanaan tata ruang wilayah yang akan dicapai hingga kurun waktu 20 tahun mendatang, terutama perwujudan pada sector perhubungan.

C. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Samarinda

Memuat mengenai keterkaitan antara visi misi pembangunan Kota Samarinda kedalam visi misi Dinas Perhubungan yang nantinya akan membentuk beberapa kebijakan, program dan kegiatan yang hendak dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun.

D. Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Samarinda



Menguraikan langkah-langkah untuk menghasilkan tujuan yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan perhubungan berdasarkan visi misi pembangunan dan visi misi Dinas serta muatan RTRW yang nantinya menjadi suatu pikiran pokok dalam melaksanakan program kegiatan.

E. Strategi dan Arah Kebijakan Perhubungan Kota Samarinda

Merumuskan strategi dan arah kebijakan perhubungan yang hendak dicapai berdasarkan asas pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditetapkan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) sebagai dasar dalam penilaian kinerja menurut program kegiatan yang akan dilaksanakan.

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Perhubungan

A. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Sektor Perhubungan

Menguraikan program-program yang berisikan tentang beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

B. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 melalui indicator kinerja utama (IKU) Perangkat Daerah

Menguraikan target pencapaian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan. Pencapaian tersebut merupakan hasil kinerja yang akan dilakukan untuk 5 tahun mendatang

Bab V Penutup

Pada bab ini adalah penutup dengan menguraikan beberapa hal yang memiliki kemungkinan-kemungkinan dapat saja berubah dalam pelaksanaannya karena pembangunan yang bersifat dinamis



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISSU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan

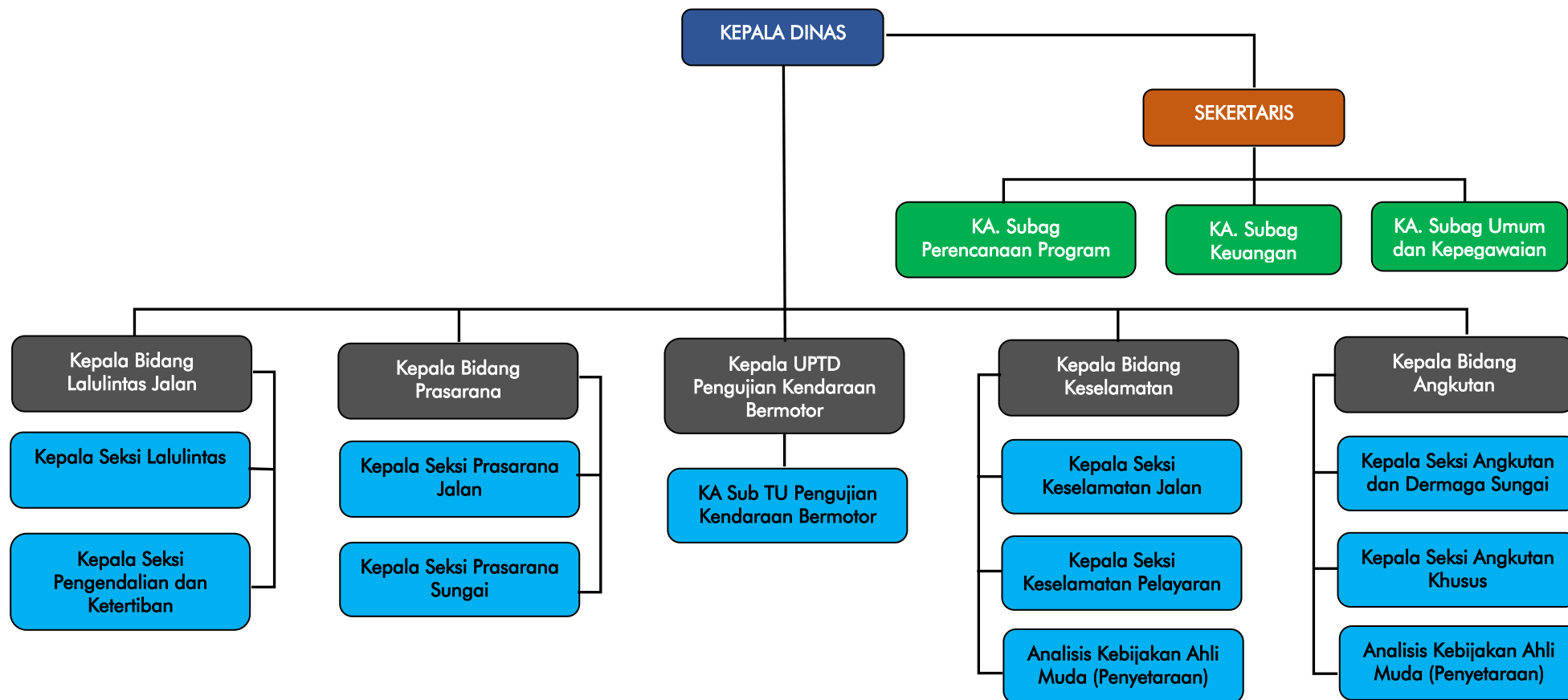
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Serta Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Samarinda tentang, susunan organisasi SKPD Dinas Perhubungan terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Perencanaan Program
3. Bidang Lalu Lintas Jalan membawahkan :
 - a. Seksi Lalu Lintas
 - b. Seksi Pengendalian & Ketertiban
 - c. Seksi Perparkiran
4. Bidang Prasarana membawahkan :
 - a. Seksi Prasarana Jalan
 - b. Seksi Prasarana Sungai
 - c. Seksi Prasarana Multimoda
5. Bidang Keselamatan membawahkan :
 - a. Seksi Keselamatan Jalan
 - b. Seksi Keselamatan Pelayaran
 - c. Analisis Lebijakan Ahli Muda
6. Bidang Angkutan membawahkan :
 - a. Seksi Angkutan & Dermaga Sungai
 - b. Seksi Angkutan Khusus
 - c. Analisis Kebijakan Ahli Muda
7. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
 - a. Sub TU Pengujian Kendaraan Bermotor



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Samarinda





Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan konkuren bidang perhubungan. Bidang/Seksi adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pemegang jabatan fungsional yang tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu sesuai kebutuhan daerah. Uraian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan adalah tugas dan fungsi dari setiap unsur / unit kerja yang berada dalam satuan organisasi Dinas Perhubungan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda, adapun uraian tugas dan fungsi pejabat adalah sebagai berikut :

1) Kepala Dinas Perhubungan

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Dinas Perhubungan, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas angkutan jalan, sungai dan penyeberangan serta rencana pelayanan sistem (jaringan) jalur perkeretaapian dan pengelolaannya, sarana prasarana kepelabuhan, keselamatan, pelayaran sungai dan laut, kebandarudaraan, pengendalian dan operasional transportasi umum baik keluar;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas angkutan jalan, sungai dan penyeberangan serta rencana pelayanan sistem (jaringan) jalur perkeretaapian dan pengelolaannya, sarana prasarana kepelabuhan, keselamatan, pelayaran sungai dan laut, kebandarudaraan, pengendalian dan operasional transportasi umum baik keluar;
- c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Lingkungan Dinas Perhubungan;
- d. Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan;
- e. Pengawasan dan pengendalian bidang perhubungan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan;



- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
- 2) Sekretariat Dinas Perhubungan
- Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan dan pengelolaan barang milik daerah serta evaluasi dan pelaporan. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perhubungan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
 - b. Pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - c. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - d. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
 - e. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepustakaan, dan layanan informasi dan pengaduan;
 - f. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
 - g. Pengelolaan anggaran Dinas dan penerimaan Dinas / retribusi;
 - h. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
 - i. Pelaksanaan verifikasi Surat pertanggungjawaban keuangan;
 - j. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - k. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Estándar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
 - l. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat / pelanggan;
 - m. Pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai tugas fungsi Dinas;
 - n. Pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelolaan informasi dan Dokumentasi Pembantu;
 - o. Pengoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/aplikasi yang digunakan oleh lintas bidang pada Dinas;
 - p. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - q. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - r. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Sekretariat membawahkan sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub bagian dan bertanggung jawab langsung kepada sekretaris. Adapun Sekretariat membawahi :

1. Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinir pengumpulan bahan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja);
 - b. Menyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja);
 - c. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
 - d. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas;
 - e. Mengumpulkan data lintas bidang sebagai bahan dokumen Dinas;
 - f. Mengoordinir laporan bulanan pelaksanaan kegiatan Dinas;
 - g. Mengoordinir penyusunan RKA/DPA/DPPA Dinas;
 - h. Menyusun laporan tahunan Dinas;
 - i. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - j. Mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - k. Membuat pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - l. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
 - a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - b. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
 - c. Memeriksa/meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Melaksanakan verifikasi SPP;
 - e. Melaksanakan sistem akutansi pengelolaan keuangan Dinas;
 - f. Melaksanakan penyiapan surat perintah membayar (SPM);



- g. Melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan;
 - h. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
 - i. Menyusun neraca keuangan Dinas;
 - j. Mengkoordinir dan meneliti anggaran perubahan Dinas;
 - k. Menyusun laporan keuangan Dinas;
 - l. Membuat pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - m. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, dan ketatausahaan;
 - c. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
 - d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
 - e. Menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
 - f. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
 - g. Melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang daerah dan aset daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas,
 - h. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan Dinas;
 - i. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
 - j. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan penempatan pegawai non struktural dan fungsional;
 - k. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
 - l. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
 - m. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi pembantu melalui website maupun permintaan data langsung;
 - n. Menyusun tatalaksana dan Standar Pelayanan penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
 - o. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;



- p. Memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
 - q. Membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - r. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - s. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Bidang Lalu Lintas Jalan
- Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Lalu Lintas Jalan. Bidang Lalu Lintas Jalan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas Perhubungan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang lalu lintas, pengendalian dan ketertiban, dan perparkiran;
 - c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, pengendalian dan ketertiban, dan perparkiran;
 - d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, proses dan kriteria penyelenggaraan di bidang lalu lintas, pengendalian dan ketertiban, dan perparkiran;
 - e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang di bidang lalu lintas, pengendalian dan ketertiban, dan perparkiran;
 - f. Penyusunan penetapan rencana dan sasaran kebijakan pengembangan pelayanan sistem jaringan lalulintas jalan raya dan pengelolaannya, pengendalian dan operasional;
 - g. Penyiapan dan pelaksana koordinator Forum Lalulintas.
 - h. Penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan penetapan kinerja jalan;
 - i. Pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota serta koordinator pelaksanaan lomba tertib lalu lintas.
 - j. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kota;
 - k. Pelaksanaan pungutan dan penyetoran retribusi berkaitan operasional parkir dan penderekan;
 - l. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
 - m. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan keharmonisan pelaksanaan pedoman dan standarisasi pengembangan sistem jaringan jalan, perekomendasi,



pemantauan, perizinan penyelenggaraan dan pengoperasian dampak pembangunan sesuai norma, standar dan prosedur manajemen rekayasa lalu lintas

- n. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang di bidang lalu lintas, pengendalian dan ketertiban, dan parkir;
- o. Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- p. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- q. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Lalu Lintas Jalan membawahkan seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab langsung pada kepala bidang. Adapun Bidang Lalu Lintas Jalan membawahi :

1. Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas :
 - a. Menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - b. Melaksanakan penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan raya kota;
 - c. Menyusun jaringan jalan kota yang disesuaikan dengan tatanan transportasi wilayah dan tatanan transportasi nasional;
 - d. Memberikan advis teknis rencana pembangunan fasilitas parkir untuk umum;
 - e. Memberikan advis lalulintas sebagai syarat penerbitan IMB/SITU/SIUP terhadap rencana bangunan khusus;
 - f. Menyusun dan menetapkan kelas pada jaringan jalan wilayah kota serta penilaian kinerja jalan;
 - g. Menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan-jalan dalam wilayah kota;
 - h. Melaksanakan dan mengoperasikan Area Traffic Control System (ATCS) serta pengaturan siklus dan waktu APILL;
 - i. Pelaksanaan koordinator Forum Lalulintas dan lomba tertib lalulintas.
 - j. Mengkaji dan menganalisa Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalulintas (ANDALALIN) melalui tim penilai sebagai dasar penerbitan persetujuan dokumen ANDALALIN;
 - k. Menyusun pertimbangan teknis analisis dampak lalu lintas;
 - l. Memberikan advis/pertimbangan teknis manajemen rekayasa dan pengendalian dampak lalulintas kepada Institusi Polri terkait



- permohonan ijin penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas di jalan wilayah kota;
- m. Menentukan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan wilayah kota;
 - n. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan;
 - o. Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - p. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - q. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Seksi Pengendalian dan Ketertiban mempunyai tugas :
- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - b. Merumuskan rencana pengendalian dan penertiban lalu lintas jalan (LLJ);
 - c. Melakukan pemeriksaan kendaraan di jalan yang berkaitan dengan kewenangan di bidang lalu lintas jalan;
 - d. Melakukan koordinasi dengan PPNS terhadap pelaksanaan penyidikan pelanggaran peraturan perundangan bidang lalu lintas jalan;
 - e. Pemeriksaan dokumen teknis laik jalan, pelanggaran ketentuan pengujian berkala dan perizinan angkutan umum;
 - f. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
 - g. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta menganalisa pelanggaran lalu lintas jalan;
 - h. Melaksanakan pengaturan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan raya dalam wilayah Daerah;
 - i. Melakukan tugas-tugas pengawalan sesuai peraturan perundangan dalam rangka kelancaran dan ketertiban lalu lintas di jalan;
 - j. Melaksanakan pungutan dan penyetoran retribusi penderekan yang dilaksanakan mobil derek Dinas;
 - k. Melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi dengan instansi terkait yang menangani pengendalian dan ketertiban di jalan;
 - l. Melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi kegiatan pengendalian dan penertiban;
 - m. Membuat laporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - n. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan



- o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai bidang tugasnya
3. Seksi Perparkiran mempunyai tugas :
 - a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - b. Merumuskan kebijakan penyelenggaraan dan operasional fasilitas parkir;
 - c. Menghimpun dan menganalisa data guna pengelolaan dan manajemen parkir;
 - d. Menetapkan kantong parkir dan ruas jalan yang dapat dijadikan tempat parkir;
 - e. Mengendalikan ruas jalan terhadap kegiatan parkir yang tidak pada tempatnya;
 - f. Melaksanakan pemrosesan pertimbangan teknis perizinan pengelolaan parkir;
 - g. Menerbitkan izin penyelenggaraan perparkiran;
 - h. Pengaturan fasilitas perparkiran;
 - i. Membina terhadap pihak penyelenggara parkir baik yang dikelola oleh instansi pemerintah maupun swasta;
 - j. Melaksanakan pembinaan, arahan dan penyuluhan terhadap juru parkir;
 - k. Menyediakan sistem data dan informasi perparkiran;
 - l. Penentuan besaran retribusi parkir dan memungut retribusi parkir dari pihak penyelenggara;
 - m. Menghitung data potensi dalam rangka penyusunan rencana target retribusi parkir;
 - n. Melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi kegiatan perparkiran;
 - o. Membuat laporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - p. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - q. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai bidang tugasnya
- 4) Bidang Prasarana
Bidang Prasarana mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dalam memberikan pelayanan teknis prasarana dan fasilitas perhubungan. Bidang Prasarana dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas Perhubungan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Prasarana mempunyai fungsi:



- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang prasarana dan fasilitas perhubungan serta lampu penerangan jalan umum meliputi prasarana jalan, sungai dan multimoda;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, proses dan kriteria penyelenggaraan di bidang prasarana serta lampu penerangan jalan umum dan fasilitas perhubungan meliputi prasarana jalan, sungai dan multimoda;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang prasarana dan fasilitas perhubungan serta lampu penerangan jalan umum meliputi prasarana jalan, sungai dan multimoda;
- e. Penyusunan penetapan rencana dan sasaran kebijakan pengembangan pelayanan teknis prasarana perhubungan serta lampu penerangan jalan umum dan pengelolaannya, pengendalian dan pemeliharaan sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku;
- f. Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan serta lampu penerangan jalan umum;
- g. Pengelolaan dan pemeliharaan terminal penumpang tipe C;
- h. Pelaksanaan pungutan retribusi berkaitan operasional terminal type C;
- i. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan keharmonisan pelaksanaan pedoman dan standarisasi pengembangan fasilitas dan prasarana, perekomendasi, pemantauan, perizinan penyelenggaraan dan pengoperasian prasarana perhubungan;
- j. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional di bidang prasarana dan fasilitas perhubungan serta lampu penerangan jalan umum meliputi prasarana jalan, sungai dan multimoda;
- k. Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- l. Pelaksana sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- m. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bidang Prasarana membawahkan seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab langsung pada kepala bidang.

1. Seksi Prasarana Jalan mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang prasarana jalan dan lampu penerangan jalan umum;
- c. Melaksanakan kebijakan operasional di bidang prasarana jalan dan lampu penerangan jalan umum;



- d. Menetapkan lokasi terminal penumpang tipe c;
 - e. Mengesahkan rancang bangun terminal penumpang tipe c;
 - f. Melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan terminal tipe c;
 - g. Melaksanakan pungutan dan penyetoran retribusi terminal tipe c;
 - h. Melaksanakan kegiatan pengoperasian terminal angkutan barang;
 - i. Menyusun perencanaan prasarana jalan dan perlengkapan jalan berupa halte, serta lampu penerangan jalan umum, alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu, marka jalan, alat penerangan jalan, pagar pengaman, cermin tikungan, tanda patok tikungan (delineator), pita penggaduh, dan alat pengendali pemakai jalan;
 - j. Menetapkan titik lokasi fasilitas dan prasarana jalan dan perlengkapan jalan berupa halte, alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu, marka jalan, alat penerangan jalan, pagar pengaman, cermin tikungan, tanda patok tikungan (delineator), pita penggaduh, dan alat pengendali pemakai jalan serta lampu penerangan jalan umum;
 - k. Melaksanakan pembangunan dan pemasangan baru fasilitas dan prasarana jalan dan perlengkapan jalan berupa halte, alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu, marka jalan, alat penerangan jalan, pagar pengaman, cermin tikungan, tanda patok tikungan (delineator), pita penggaduh, dan alat pengendali pemakai jalan serta lampu penerangan jalan umum;
 - l. Menyelenggarakan pemeliharaan fasilitas dan prasarana jalan dan perlengkapan jalan berupa terminal, halte, alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu, marka jalan, alat penerangan jalan, pagar pengaman, cermin tikungan, tanda patok tikungan (delineator), pita penggaduh, dan alat pengendali pemakai jalan serta lampu penerangan jalan umum;
 - m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai dengan bidang tugasnya;
 - n. Membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - o. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - p. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai bidang tugasnya.
2. Seksi Prasarana Sungai mempunyai tugas:
- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang Prasaran Sungai;



- c. Melaksanakan kebijakan operasional di Prasarana Sungai;
 - d. Melaksanakan penyiapan penetapan kebijakan tatanan pelabuhan dan dermaga;
 - e. Melaksanakan penyiapan pengelolaan pelabuhan/dermaga;
 - f. Melaksanakan kegiatan pengembangan, pembangunan, pemeliharaan fasilitas dan peralatan pelabuhan dan dermaga yang dikelola oleh dinas;
 - g. Melaksanakan kegiatan pembersihan alur pelayaran angkutan sungai;
 - h. Melaksanakan kegiatan pengerukan pada kolam pelabuhan dan dermaga sungai;
 - i. Melaksanakan pengawasan dan penertiban pada area logpond, keramba dan usaha perhubungan yang mengganggu alur pelayaran;
 - j. Memberikan rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum sungai;
 - k. Memberikan rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus sungai;
 - l. Menetapkan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan sungai;
 - m. Melaksanakan pemberian izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus sungai;
 - n. Menetapkan izin terminal khusus sungai yang dikelola oleh swasta;
 - o. Memberikan rekomendasi rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan sungai yang terletak pada jaringan kota;
 - p. Melaksanakan pemeliharaan, pengadaan dan pemasangan rambu sungai, dermaga, navigasi alur pelayaran dan prasarana lainnya;
 - q. Memberikan izin logpond;
 - r. Memberikan izin usaha pemeliharaan dan perawatan kapal di perairan sungai;
 - s. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai dengan bidang tugasnya;
 - t. Membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - u. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - v. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai bidang tugasnya.
3. Seksi Prasarana Multimoda mempunyai tugas :
- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang prasarana multimoda;
 - c. Menetapkan rencana induk perkeretaapian wilayah kota;



- d. Menerbitkan izin usaha, izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah;
- e. Menetapkan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) daerah kota;
- f. Menetapkan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kota;
- g. Menerbitkan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) daerah kota;
- h. Menetapkan jaringan pelayanan perkeretaapian kota;
- i. Menetapkan rencana induk jalur sepeda dan pejalan kaki, aksesibilitas orang cacat wilayah kota;
- j. Menetapkan rencana jangka pendek, menengah dan panjang jalur sepeda dan pejalan kaki, aksesibilitas orang cacat dalam wilayah kota;
- k. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana serta fasilitas yang berhubungan dengan sepeda dan pejalan kaki, aksesibilitas orang cacat dalam wilayah kota;
- l. Menyiapkan perumusan, perencanaan dan penetapan aksesibilitas ke pelabuhan laut dan terminal;
- m. Menetapkan rencana jangka pendek, menengah dan panjang jalur aksesibilitas ke pelabuhan laut dan terminal;
- n. Memberikan advis teknis penetapan lokasi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri kapal type laut yang beroperasi di perairan sungai;
- o. menerbitkan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
- p. Mengumpulkan dan melaporkan kegiatan operasional pelabuhan laut dan terminal;
- q. Mengumpulkan dan melaporkan kegiatan operasional bandar udara;
- r. Menyusun bahan dan pelaksanaan promosi serta pengembangan usaha di bidang perkeretaapian, sepeda, pejalan kaki dan moda lainnya;
- s. Menyusun bahan dan pelaksanaan promosi serta pengembangan prasarana yang akan dibangun oleh pihak swasta;
- t. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai dengan bidang tugasnya;
- u. Membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- v. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- w. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai bidang tugasnya.



5) Bidang Keselamatan

Bidang Keselamatan mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dalam memberikan pelayanan teknis keselamatan terhadap jasa/pelayanan perhubungan. Bidang Keselamatan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas Perhubungan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Keselamatan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang keselamatan perhubungan meliputi keselamatan jalan, pelayaran dan pengujian kendaraan bermotor;
- c. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan norma, standar, proses dan kriteria penyelenggaraan di bidang keselamatan perhubungan meliputi keselamatan jalan, pelayaran dan pengujian kendaraan bermotor;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang prasarana dan fasilitas perhubungan meliputi prasarana jalan, sungai dan multimoda;
- e. Penyusunan penetapan rencana dan sasaran kebijakan pengembangan pelayanan teknis keselamatan perhubungan dan pengelolaannya, pengendalian dan pemeliharaan;
- f. Penyiapaan dan pelaksanaan kegiatan Dewan Maritim Kota;
- g. Pelaksanaan penyusunan program audit, investigasi terhadap keselamatan perhubungan, pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pengujian kendaraan bermotor dan pengukuran dan pengujian kelaikan kapal – kapal;
- h. Pelaksanaan pungutan retribusi berkaitan pengujian kendaraan bermotor dan pengukuran dan pengujian kelaikan kapal – kapal;
- i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional di bidang keselamatan perhubungan meliputi keselamatan jalan, pelayaran dan pengujian kendaraan bermotor;
- j. Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- k. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- l. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bidang Keselamatan membawahkan seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggung jawab langsung pada kepala bidang. Adapun Bidang Keselamatan membawahi :



1. Seksi Keselamatan Jalan mempunyai tugas:
 - a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang keselamatan jalan;
 - c. Melaksanakan kebijakan operasional di bidang keselamatan jalan;
 - d. Menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan dalam kota;
 - e. Melaksanakan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalulintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan / atau yang menjadi isu kota;
 - f. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kota;
 - g. Melaksanakan audit terhadap ruas jalan, persimpangan dan seluruh hal yang berkaitan dengan pencegahan kecelakaan lalu lintas di jalan dalam kota;
 - h. Melaksanakan inspeksi keselamatan di jalan dalam kota;
 - i. Menentukan lokasi letak rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, halte dan alat pemberi isyarat lalulintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan raya berkaitan dengan keselamatan jalan dalam wilayah kota;
 - j. Memberikan rekomendasi izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor;
 - k. Memberikan rekomendasi izin usaha mendirikan pendidikan dan pelatihan mengemudi;
 - l. Melaksanakan penyuluhan lalu lintas terhadap seluruh pengguna jalan dalam kota;
 - m. Melaksanakan kegiatan pemilihan sopir teladan, pelajar tertib lalulintas;
 - n. Melaksanakan sosialisasi keselamatan jalan melalui promosi dan kerjasama pihak ketiga/swasta;
 - o. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai dengan bidang tugasnya;
 - p. Membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - q. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - r. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai bidang tugasnya.
2. Seksi Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas:
 - a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;



- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang keselamatan pelayaran;
 - c. Melaksanakan perencanaan dan koordinasi kegiatan operasional sarana sungai;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian untuk menunjang keselamatan kapal, lalu lintas sungai dan pelayaran;
 - e. Melaksanakan penertiban dan pemeriksaan dokumen kapal;
 - f. Melaksanakan pengukuran kapal sungai;
 - g. Melaksanakan registrasi kapal sungai;
 - h. Melaksanakan pemberian sertifikat kelaikan kapal sungai;
 - i. Melaksanakan pemeriksaan konstruksi kapal dan perlengkapannya serta pemberian Surat Tanda Kecakapan (STK) Nakhoda, Kepala Kamar Mesin (KKM) dan Nakhoda/Motoris (NM);
 - j. Merencanakan kapal kerja perhubungan;
 - k. Pemberian penilaian teknis kondisi kapal;
 - l. Menyusun tata cara berlalu lintas di perairan sungai;
 - m. Melaksanakan kegiatan Dewan Maritim Kota;
 - n. Menyusun database sarana kapal-kapal sungai;
 - o. Melaksanakan pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB), penerbitan pas perairan daratan;
 - p. Melaksanakan pemeriksaan permesinan kapal sungai Melakukan penyeteroran hasil pemungutan retribusi ke kas daerah;
 - q. Melakukan pungutan retribusi terhadap pengujian kendaraan bermotor di atas air yang berkaitan dengan kelaikan kapal;
 - r. Menerbitkan Surat Keterangan Radio Kapal Sungai;
 - s. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi keselamatan pelayaran;
 - t. Melaksanakan audit dan inspeksi terhadap keselamatan pelayaran dan kecelakaan kapal;
 - u. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai dengan bidang tugasnya;
 - v. Membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - w. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - x. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai bidang tugasnya.
3. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas :
- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang pengujian kendaraan bermotor;



- c. Menetapkan rencana kerja Pengujian Kendaraan Bermotor;
- d. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengujian kendaraan bermotor;
- e. Melakukan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengujian kendaraan bermotor;
- f. Melakukan pendaftaran dan pengujian kendaraan bermotor;
- g. Melakukan pemugutan retribusi dan administrasi pengujian kendaraan bermotor;
- h. Melakukan pemberian penilaian teknis kondisi kendaraan;
- i. Melakukan penyetoran hasil pemungutan retribusi ke kas daerah;
- j. Melakukan evaluasi dan inovasi terhadap pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
- k. Melakukan pembinaan pengelolaan ketatausahaan pengujian kendaraan bermotor;
- l. Menginvestasi permasalahan yang berhubungan dengan pengujian kendaraan bermotor serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai dengan bidang tugasnya;
- n. Membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- o. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- p. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai bidang tugasnya.

6) Bidang Angkutan

Bidang Angkutan mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dalam melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian bidang angkutan. Bidang Angkutan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas Perhubungan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Angkutan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang angkutan meliputi angkutan jalan, angkutan dan dermaga sungai dan angkutan khusus;
- c. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data perumusan angkutan;
- d. Pelaksanaan kegiatan perumusan angkutan;



- e. Pelaksanaan pungutan retribusi berkaitan trayek dan operasional dermaga;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait perumusan angkutan;
- g. Pelaksanan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data perumusan pemadu moda;
- h. Pelaksanaa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional di bidang keselamatan perhubungan meliputi keselamatan jalan, pelayaran dan pengujian kendaraan bermotor;
- i. Pembuatan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bidang Angkutan membawahkan seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab langsung pada kepala bidang. Adapun Bidang Angkutan membawahi :

1. Seksi Angkutan Jalan mempunyai tugas:
 - a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang angkutan jalan;
 - c. Menetapkan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan orang perkotaan;
 - d. Menyusun jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan umum yang wilayah pelayanannya dalam wilayah kota;
 - e. Memberikan izin trayek angkutan kota;
 - f. Menetapkan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam kota;
 - g. Memberikan izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kota;
 - h. Memberikan rekomendasi operasi angkutan sewa/rental;
 - i. Memberikan izin usaha angkutan pariwisata;
 - j. Menetapkan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan kota;
 - k. Memberikan kartu pengawasan izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam wilayah kota;
 - l. Menyusun database angkutan jalan dalam kota;
 - m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan operasional dan kondisi fisik angkutan jalan dalam kota;
 - n. Menyediakan angkutan umum dan pemadu moda;
 - o. Mengelola data dan informasi di bidang angkutan jalan;



- p. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai dengan bidang tugasnya;
 - q. Membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - r. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - s. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai bidang tugasnya.
2. Seksi Angkutan dan Dermaga Sungai mempunyai tugas:
- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang angkutan dan dermaga sungai;
 - c. Menyusun jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kapal untuk kebutuhan angkutan umum yang wilayah pelayanannya dalam wilayah kota;
 - d. Memberikan izin trayek kapal angkutan kota;
 - e. Melaksanakan penertiban ijin trayek kapal dalam wilayah kota;
 - f. Memberikan izin usaha angkutan sungai;
 - g. Menetapkan lintasan penyeberangan dalam wilayah kota;
 - h. Menetapkan tarif ekonomi kapal angkutan kota;
 - i. Melaksanakan pengoperasian dermaga;
 - j. Menetapkan Sistem Operasional Prosedur Dermaga;
 - k. Menetapkan tarif jasa pelabuhan, pungutan sera penyeteroran retribusi dermaga;
 - l. Membuat laporan kepadatan bongkar muat penumpang dan atau barang di dermaga;
 - m. Melaksanakan penertiban dan pengawasan terhadap kapal – kapal angkutan terhadap dokumen kapal;
 - n. Menerbitkan manifest dan pas pemberangkatan kapal;
 - o. Melaksanakan pemberangkatan kapal di dermaga sungai;
 - p. Mengelola data dan informasi di bidang angkutan sungai;
 - q. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai dengan bidang tugasnya;
 - r. Membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - s. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - t. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai bidang tugasnya.
3. Seksi Angkutan Khusus mempunyai tugas :



- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang angkutan khusus;
- c. Menerbitkan izin usaha angkutan barang, angkutan BBM, Angkutan Barang Berbahaya dan Limbah, Angkutan alat berat dan angkutan hewan serta angkutan khusus lainnya;
- d. Menetapkan jaringan lintas angkutan barang dan angkutan khusus lainnya;
- e. Menetapkan standar pelayanan angkutan khusus yang beroperasi dalam wilayah kota;
- f. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi tata cara berlalu lintas kepada pengemudi angkutan khusus dalam wilayah kota;
- g. Menetapkan tata cara pemuatan angkutan khusus yang membawa muatan dalam operasi kota;
- h. Mengolah data dan informasi sesuai lingkup tugasnya di bidang angkutan khusus;
- i. Memonitoring dan evaluasi serta pelaporan operasional angkutan khusus;
- j. Melaksanakan pemantauan terhadap angkutan khusus yang masuk dalam wilayah kota dengan membuat dan menyusun laporan;
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai dengan bidang tugasnya;
- l. Membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- m. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai bidang tugasnya.



B. Sumber Daya Dinas Perhubungan

Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Samarinda terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti peralatan / perlengkapan / aset. Sumber daya manusia merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan, khususnya Sumber Daya Aparatur yang merupakan mesin penggerak berjalannya roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Komposisi pegawai Dinas Perhubungan Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Jabatan Struktural dan Fungsional Tahun 2025

No	Jabatan	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Eselon II	1	-
2	Eselon III	5	-
3	Eselon IV	13	1
Jumlah		19	1
Total		20	

Sumber : Database Sub Bagian Umum Dishub Kota Samarinda, Tahun 2025

Tabel 2.2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2025

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sekolah Dasar (SD)	-	-
2	SMP	3	-
3	SMA / SMK	83	17
4	Ahli Muda (D- II)	1	
5	Sarjana Muda (D-III)	3	2
6	Sarjana (S1/D-IV)	21	10
7	Pasca Sarjana (S2)	8	1
Jumlah		119	30
Total		149	

Sumber : Database Sub Bagian Umum Dishub Kota Samarinda, Tahun 2025



Tabel 2.3. Pegawai Tidak Tetap Harian / Pegawai Tidak Tetap Bulanan Tahun 2025

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sekolah Dasar (SD)	0	0
2	SMP	1	0
3	SMA / SMK	105	9
4	Sarjana Muda (D-I sampai D-III)	9	1
5	Sarjana (S1/D-IV)	5	9
Jumlah		172	19
Total		191	

Sumber : Database Sub Bagian Umum Dishub Kota Samarinda, Tahun 2025

Tabel 2.4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2025

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	I/a : Juru Muda	0	0
2	I/b : Juru Muda Tk. I	0	0
3	I/c : Juru	0	0
4	I/d : Juru Tk. I	1	0
5	II/a : Pangatur Muda	52	13
6	II/b : Pangatur Muda Tk. I	4	4
7	II/c : Pangatur	1	1
8	II/d : Pangatur Tk. I	9	2
9	III/a : Panata Muda	22	2
10	III/b : Panata Muda Tk. I	5	1
11	III/c : Panata	2	3
12	III/d : Panata Tk. I	15	7
13	IV/a : Pembina	6	1
14	IV/b : Pembina Tk.I	2	0
15	IV/c : Pembina Utama Muda	0	0
16	IV/d : Pembina Utama Madya	0	0
Jumlah		119	30
Total		149	

Sumber : Database Sub Bagian Umum Dishub Kota Samarinda, Tahun 2025



C. Sumber Daya Lainnya

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perhubungan Kota Samarinda, menempati Kantor Wilayah Koperasi Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2001, selain prasarana Kantor juga dilengkapi sumber daya lainnya seperti peralatan, perlengkapan baik berupa aset bergerak maupun tidak bergerak, Sarana dan prasarana tersebut dalam kondisi baik dan kurang baik.

Tabel 2.5. Aset Dinas Perhubungan Tahun 2025

No	Nama Barang	Jumlah	Harga
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tanah	13	92.537.149.000
2	Alat-alat besar	3	4.892.281.742
3	Alat-alat Angkutan	71	9.180.961.410
4	Alat-alat Bengkel dan Alat ukur	38	4.948.625.370
5	Alat kantor dan rumah tangga	1099	20.138.720.607
6	Alat studio dan alat komunikasi	1106	4.153.384.766
7	Alat-alat kedokteran	6	337.131.400
8	Alat Laboratorium	80	1.867.844.550
9	Bangunan Gedung	50	35.047.313.676
10	Alat Pertanian	1	8.000.000
11	Jalan dan Jembatan	0	23.089.138.845
12	Bangunan Air/Irigasi	1	44.825.000
13	Instalasi	8	6.871.898.450
14	Jaringan	15	10.276.943.833
15	Monumen	1	1.404.844.173
16	Aset Tidak Berwujud	11	825.238.400
17	Konstruksi dalam pengerjaan	0	831.565.676,
Jumlah		2.503	216.455.866.898

Sumber : Database Sub Bagian Umum Dishub Kota Samarinda, Tahun 2025



Tabel 2.6. Data Sarana Operasional Dinas Perhubungan Tahun 2025

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mobil Operasional	10	Kondisi Baik
2	Mobil Derek	3	Kondisi Baik
3	Mobil Uji Keliling	1	Kondisi Baik
4	Mobil APILL	2	Kondisi Baik
5	Mobil Dinas	13	Kondisi Baik
6	Sepeda Motor Operasional	16	Kondisi Baik
7	Sepeda Motor Dinas	31	Kondisi Baik
Jumlah		76	Unit

Sumber : Database Sub Bagian Umum Dishub Kota Samarinda, Tahun 2025

D. Kinerja Dinas Perhubungan

Sebagaimana Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa kinerja sebagai capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumberdaya pembangunan. Dalam perspektif Renstra Perangkat Daerah, kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.

Kinerja pelayanan perangkat daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui informasi tersebut dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan program/kegiatan dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan umpan balik sebagai bahan perencanaan periode berikutnya.

1. Capaian Kinerja Pelayanan

Berdasarkan hasil laporan kinerja sebagaimana tabel 2.6 dibawah ini menunjukkan, secara realitas kondisi Dinas Perhubungan Kota Samarinda masih belum optimal. Program dan kegiatan Perhubungan itu sendiri masih perlu di optimalkan agar tujuan dan sasaran pembangunan daerah memberikan dampak pada peningkatan infrastruktur yang berfokus dari sisi transportasi. Dengan meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan maka diharapkan kebutuhan masyarakat terhadap jasa sarana dan prasarana perhubungan akan terpenuhi membuat terciptanya kondisi lalu lintas yang tertib, berkurangnya kemacetan dan menurunnya angka kecelakaan sehingga masyarakat merasa nyaman, aman dan selamat.



Gambaran capaian kinerja pada rencana strategis sebelumnya berbeda dengan perencanaan yang akan di lakukan 5 tahun kedepan berikut Tabel hasil evaluasi capaian kinerja 5 tahun sebelumnya :

Tabel 2.7. Pecapaian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/ kota	0.55	0.55	100%	0.53	0.49	100%	0.51	0.49	104,08%	0.49	0.48	102,08%
2.	Persentase capaian kinerja program	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,24%	99,24%

Berdasarkan data pada tabel diatas, perbandingan capaian pada 4 tahun terakhir jika dilihat dari realisasi capaiannya Dinas Perhubungan Kota Samarinda telah memenuhi target dengan kategori Sangat Baik. Hal ini dapat terjadi karena adanya dukungan anggaran yang cukup memadai di beberapa kegiatan serta di dukung oleh SDM yang dapat bekerja secara optimal serta koordinasi dan kerja sama yang baik dan saling bersinergi baik di lingkungan internal maupun eksternal Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

Kinerja lalu lintas perkotaan di Kota Samarinda berdasarkan capaian yaitu **0,48** (nilai) masuk ke **Tingkat Pelayanan C**, yang artinya kondisi arus lalu lintas stabil tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan oleh volume lalu lintas yang lebih tinggi dengan kecepatan sekurang-kurangnya 60 km/jam, Pengemudi memiliki keterbatasan untuk memilih kecepatan dan pindah lajur atau mendahului. Kepadatan lalu lintas sedang karena hambatan internal lalu lintas meningkat dengan tundaan yang masih dapat diterima, yakni lebih dari 15 – 25 detik perkendaraan.

Berdasarkan data capaian kinerja program dari tahun 2021 hingga 2024, dapat dilihat bahwa persentase capaian menunjukkan konsistensi yang tinggi, pada tahun 2021, 2022 dan 2023 capaian kinerja program selalu mencapai 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Namun pada tahun 2024, capaian sedikit menurun menjadi 99,24% meskipun secara umum



tetap berada pada kategori sangat baik karena masih mendekati target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

E. Keadaan Umum Wilayah

1. Transportasi Jalan

Perkembangan kondisi jalan (tidak termasuk jalan tol) yang ada di Kota Samarinda tahun 2023, yaitu jalan negara dengan panjang jalan 67,721 km, jalan provinsi 103,943 km, dan jalan kota 726,360 km. Perkembangan jalan dari tahun 2021-2023 adalah jalan kota sepanjang 16,722 km. Jalan menurut jenis permukaannya didominasi jalan yang belum di aspal mencapai 65,12% dan jalan menurut kondisinya pada umumnya adalah kondisi baik, yakni mencapai 81,22%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8. Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kota Samarinda (km), 2021–2024

No	Kewenangan Jalan	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Negara	67,721	67,721	67,721	67,721
2	Provinsi	104,356	103,943	103,068	103,943
3	Kabupaten/Kota	709,225	709,638	710,513	709,638
Jumlah		881,302	881,302	881,302	881,302

Sumber : Kota Samarinda Dalam Angka Tahun 2025

Tabel 2.9. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kota Samarinda (km), 2021–2023

No	Jenis Permukaan Jalan	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aspal	199,621	204,566	204,566
2	Tidak Aspal	112,546	96,120	584,816
3	Lainnya	569,144	580,616	108,642
Jumlah		881,311	881,302	898,024

Sumber : Kota Samarinda Dalam Angka Tahun 2024



Tabel 2.10. Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kota Samarinda (km), 2021–2023

No	Kondisi Jalan	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Baik	733,49	722,025	729,352
2	Sedang	35,266	41,915	39,599
3	Rusak	54,234	50,703	50,051
4	Rusak Berat	58,312	66,659	79,022
Jumlah		881,302	881,302	898,024

Sumber : Kota Samarinda Dalam Angka Tahun 2024



Gambar 2.2 Peta Jaringan Transportasi Kota Samarinda

a. Terminal

Untuk mempermudah jalur transportasi yang menghubungkan antar daerah di sekitar Kota Samarinda. Maka Samarinda telah memiliki terminal dengan berbagai type, yaitu: Terminal Lempake, Samarinda Seberang, Sei Kunjang, Ps. Segiri, Ps. Pagi dan Pal V/Pinang.

Tabel 2.11. Terminal di Kota Samarinda

No	Terminal	Type	Luas Terminal (m ²)	Luas Lapangan Parkir	Kapasitas Tampung	
					Kendaraan	Penumpang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Lempake	B	10.420	7.210	500	700
2.	Smd. Seberang	B	88.760	5.620	158	700
3.	Sei Kunjang	B	14.151	6.040	500	693
4.	Ps. Segeri	C	750	-	-	-
5.	Ps. Pagi	C	1.440	885	111	48
6.	Pal V/Pinang	C				

Sumber: Studi Penyusunan Hirarki Jalan Kota Samarinda, 2016

Berdasarkan tabel diatas terdapat 6 terminal dengan jenis terminal type B dan type C. dengan kapasitas tampung kendaraan terbesar yaitu pada terminal Lempake dan Terminal Sungai Kunjang sebanyak 500 kendaraan sedangkan kapasitas tampung penumpang terbesar yaitu terdapat pada Terminal Lempake dan Terminal Samarinda Seberang sebanyak 700 penumpang.

b. Trayek/Rute Angkutan Umum

Peranan utama angkutan umum adalah melayani kepentingan mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatannya, baik kegiatan sehari-hari yang berjarak pendek maupun menengah (angkutan perkotaan/pedesaan dan angkutan antarkota dalam propinsi). Angkutan umum yang disewakan, disebut paratransit (non trayek) yakni pelayanan jasa angkutan yang dapat dimanfaatkan oleh setiap orang berdasarkan ciri tertentu, misalnya tarif dan lintasan (rute). Angkutan umum massal atau masstransit (trayek) merupakan layanan jasa angkutan yang memiliki trayek dan jadwal tetap, contohnya adalah bus dan kereta api.

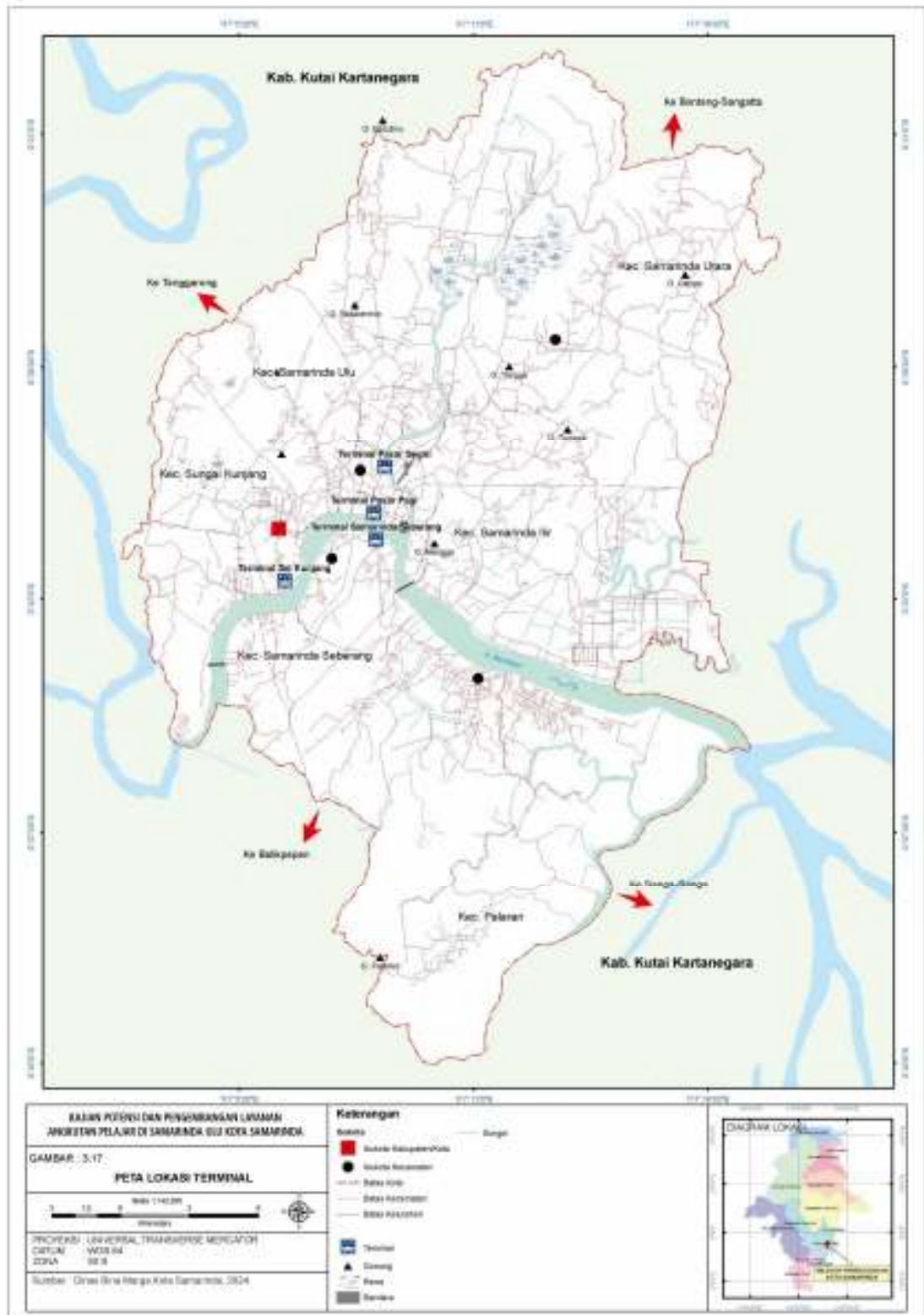


Untuk selengkapnya, layanan trayek untuk angkutan umum di Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12. Trayek Angkutan Umum di Kota Samarinda

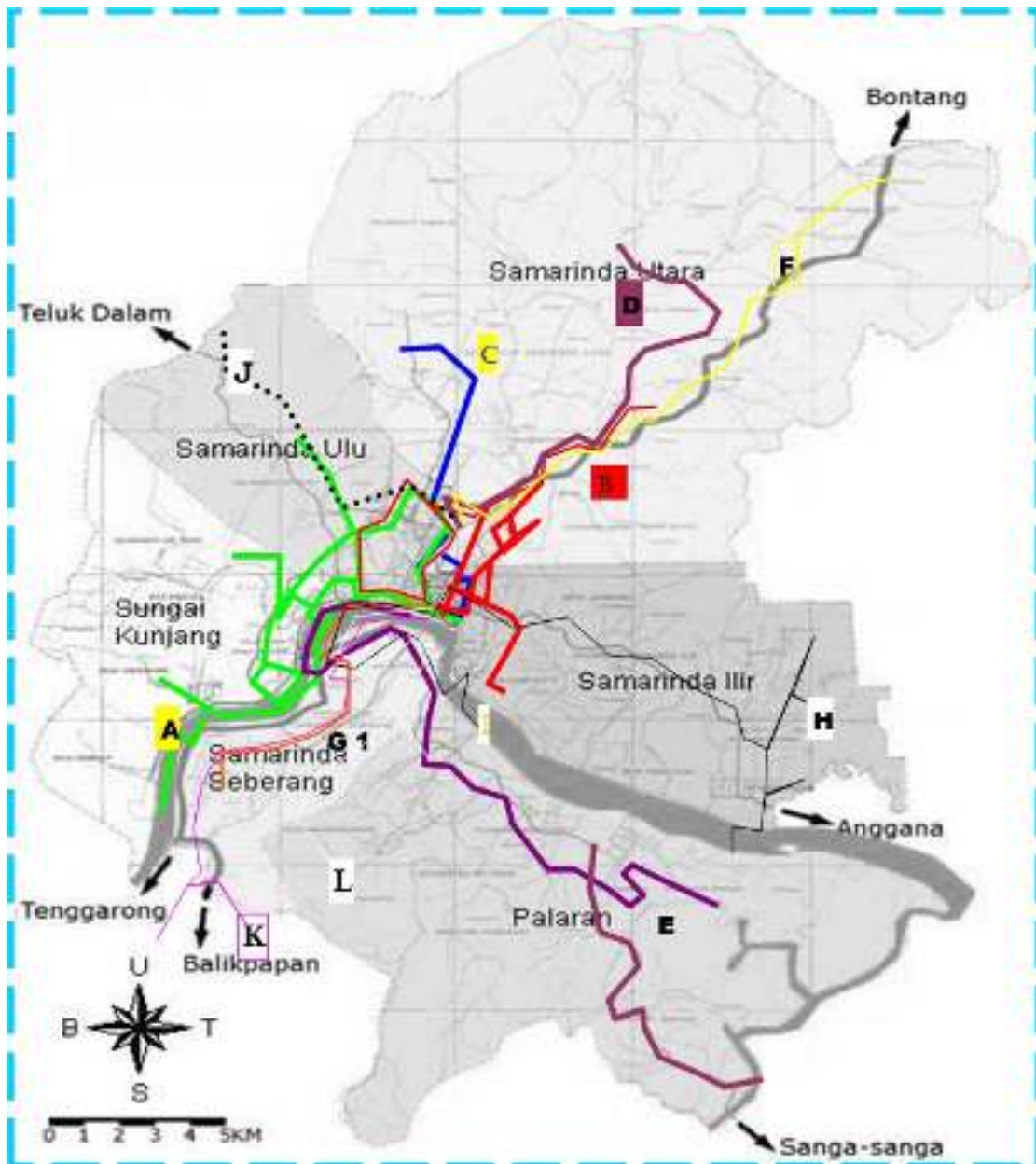
Kode	Trayek	Tempuh	Jumlah Kendaraan
(1)	(2)	(3)	(4)
A	PS Pagi -S.Kunjang - Loa Buah	14	437
B	Pusat Kota Jembatan I Terminal Lempake	10	527
C	Ps Pagi - Sempaja - Bayur	11	137
C2	Ps Pagi - Perumnas Bengkuring	23	10
D	Ps Segiri -Lempake - Benanga	9.5	20
E1	Ps Pagi - Rawa Makmur - Bukuab - Bantuas	30	23
E2	Ps Pagi- Rawa Makmur - Buakuan - Bantuas	20	23
E3	Ps Pagi- Rawa Makmur - Buakuan - Bantuas	25	16
E4	Ps Pagi- Simpang Pasir.	28	12
F	Ps Segiri -Pampang T Merah - Sg Siring	26.4	38
G1	Ps Pagi- Harapan Baru - Loa Janan Ilir	14.8	53
G2	Ps Segiri - Juanda - Loa janan	16	24
H1	Ps Pagi Makroman P Atas	22.5	17
H2	Ps Pagi - Perm Sambutan	18,5	20
I	Pelabuhan Mangkulas	10	34
J	Ps Segiri - Pinang	12	2
K	Loa Janan - Terminal Seberang	9.5	105
L	Ps pagi - Rapak dalam SMA plus	16	15
	Jumlah		1506

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Tahun 2024



Sumber : RTRW Kota Samarinda, Tahun 2014-2034

Gambar 2.3 Lokasi Terminal Angkutan Jalan di Kota Samarinda



Gambar 2.4 Peta Jalur Trayek Angkutan Kota di Kota Samarinda

c. Fasilitas Pejalan Kaki

Salah satu fasilitas pejalan kaki yang tidak kalah penting adalah Zona Selamat Sekolah (ZOSS). ZOSS merupakan hasil kebijakan yang dibuat dengan tujuan untuk mengurangi potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas dalam suatu ruas jalan area sekolah yang memiliki lalu lintas pejalan kaki anak sekolah yang cukup tinggi. Sekolah sebagaimana dimaksud adalah



PAUD, TK, SD / MI, SMP / MTS dan SMA / SMK / MA. Logikanya, anak-anak pada tingkat sekolah tersebut masih belum bisa dikategorikan mandiri secara 100% maka dengan adanya ZOSS melindungi mereka ketika ingin menyeberang jalan menuju sekolah dan sebaliknya. ZOSS dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan yang terdiri dari :

- Marka jalan, terbagi menjadi beberapa warna yakni :
 - a. Marka berwarna putih;
 - b. Marka berwarna kuning; dan
 - c. Marka berwarna merah;
- Rambu lalu lintas.

Penerapan ZOSS merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap ketertiban lalu lintas dan pendidikan. Melalui adanya ZOSS akan mengurangi kecelakaan yang sering terjadi di saat jam berangkat ke sekolah dan pulang ke sekolah. Harapan pemerintah dengan adanya ZOSS ini agar para pengguna jalan mengurangi kecepatan kendaraan saat melewati area ZOSS tersebut. Fenomena yang sering terjadi para pengguna jalan masih ada yang sering melanggar seperti melewati ruas jalan di sebelahnya agar tidak melewati pita penghaduh di area ZOSS. Untuk di Kota Samarinda penerapan ZOSS masih sangat kurang dikarenakan kondisi keuangan Pemerintah Kota Samarinda.

d. Kemacetan di Kota Samarinda

Kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Kemacetan banyak terjadi di kota-kota besar, terutamanya yang tidak mempunyai transportasi publik yang baik atau memadai ataupun juga tidak seimbangny kebutuhan jalan dengan kepadatan penduduk, adapun titik kemacetan di Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.13. Titik Kemacetan Kota Samarinda

No	Titik Rawan Kemacetan	Kecamatan	Penyebab Kemacetan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Simpang Gunung Lingai	Samarinda Utara	Radius Tikung Kecil, Geometri Jalan Tidak Ideal
2	Lempake - Kebun Agung	Samarinda Utara	Penyempitan Jalan & Permukaan Jalan Rusak
3	Simpang Sempaja	Samarinda Utara	Radius Tikung Kecil, Geometri Jalan Tidak Ideal
4	Fly Over Air Hitam	Samarinda Ulu	Penyempitan Jalan & Permukaan Jalan Rusak
5	Simpang Air Putih	Samarinda Ulu	Radius Tikung Kecil, Geometri Jalan Tidak Ideal
6	Jl.Suryanata	Samarinda Ulu	Penyempitan Jalan & Permukaan Jalan Rusak
7	Simpang 4 Ring Road Suryanata	Samarinda Ulu	Tidak Ada Apill
8	Antasari (Simpang 3 Cendana)	Samarinda Ulu	Tidak Ada Apill Dan Parkir Tepi Jalan
9	Jl. Juanda (Depan Ruko Bank Mandiri)	Samarinda Ulu	Tidak Tersedia Kantong Parkir
10	Jembatan Mahakam (Dua Arah - Bc/Us)	Sei kunjang	Permukaan Jalan, Kapasitas Simpang Kecil
11	Simpang 3 Meranti (Jl. Slamet Riyadi)	Sei kunjang	Radius Tikung Kecil, Geometri Jalan Tidak Ideal
12	Bukaan Median (Depan Masjid Darul Nikmah)	Sei kunjang	Permukaan Jalan Berlubang, Manuver Bus Dan Truck
13	Jl. Sudirman (Sisi Darat Pasar Pagi)	Samarinda kota	PKL & Parkir
14	Jl. Gajah Mada (Pasar Pagi Laut)	Samarinda kota	PKL & Parkir
15	Jl. Kh. Kholid	Samarinda kota	PKL & Parkir
16	Jl. Panglima Batur	Samarinda kota	PKL & Parkir
17	Jl. Hidayatullah	Samarinda kota	PKL & Parkir
18	Simpang 3 Jembatan Baru	Samarinda kota	Tidak Ada Apill
19	Jembatan 2 Sungai Dama	Sambutan	PKL & Parkir
20	Simpang 3 Gunung Manggah	Sambutan	Radius Tikung Tidak Ideal Dan Penyempitan Jalan



No	Titik Rawan Kemacetan	Kecamatan	Penyebab Kemacetan
21	Pasar Rahmat (Lambung Mangkurat)	Samarinda ilir	PKL & Parkir
22	Pasar Sumber Mas (Loa Janan)	Loa janan ilir	PKL & Parkir
23	Simpang 3 Apt. Pranoto Cipto Mangkusumo	Loa janan ilir	Tidak Ada Apill
24	Pasar Baqa (Jl. Sult. Hasanudin Samarinda Seberang)	Samarinda Seberang	PKL & Parkir

Sumber : Database Seksi Lalu lintas Bidang LLAJ, Tahun 2016

Kemacetan lalu lintas dapat disebabkan adanya antrian panjang pada simpangan, kecelakaan, banjir, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan rambu lalu lintas dan terjadi kebakaran. Langkah yang penting dalam memecahkan kemacetan adalah dengan meningkatkan kapasitas jalan/parasarana seperti:

1. Memperlebar jalan, menambah lajur lalu lintas sepanjang hal itu memungkinkan,
2. Mengubah sirkulasi lalu lintas menjadi jalan satu arah,
3. Mengurangi konflik dipersimpangan melalui pembatasan arus tertentu, biasanya yang paling dominan membatasi arus belok kanan,
4. Meningkatkan kapasitas persimpangan melalui lampu lalu lintas, persimpangan tidak sebidang/flyover,
5. Mengembangkan jaringan pelayanan Angkutan Umum,
6. Salah satu upaya mengurangi kemacetan di Kota Samarinda, Dinas Perhubungan Kota Samarinda menerapkan teknologi Area Traffic Control System (ATCS) di 24 titik simpangan dari 39 titik dan dilengkapi Camera CCTV yang berfungsi untuk memantau, mengawasi, dan mengatur arus lalu lintas.

Setiap lokasi simpang tersebut dihubungkan dengan Pusat Kendali (CC-ROOM) yang berada di Kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda, disesuaikan dengan tingkat kepadatan arus kendaraan yang melintas di setiap titik lokasi simpang tersebut. Keberadaan ATCS bukan hanya sebatas penataan ritme lalu lintas dalam melakukan rekayasa lalu lintas sehingga diperoleh kondisi pergerakan lalu lintas secara efisien.



Gambar 2.5 Peta Jaringan Area Traffic Control System (ATCS)

Penataan siklus lampu lalu lintas berdasar input data lalu lintas yang diperoleh secara real time, melalui kamera CCTV pemantau lalu lintas pada titik-titik persimpangan. Penentuan waktu siklus lampu persimpangan dapat diubah berkali-kali dalam satu hari sesuai kebutuhan lalu lintas paling efisien yang mencakup keseluruhan wilayah tersebut. Dari teknologi Area Traffic Control System (ATCS) juga dapat memantau banjir, dan segera langsung menurunkan petugas lapangan Dinas Perhubungan untuk turun mengatur arus lalu lintas yang jadi penyebab kemacetan di area banjir tersebut.

2. Transportasi Sungai dan Penyeberangan

Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Kota Samarinda merupakan kota yang dilintasi oleh salah satu sungai terbesar di Indonesia yaitu Sungai Mahakam. Oleh karena itu, kegiatan transportasi air atau pelayaran merupakan sektor yang berperan cukup penting bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, peranan angkutan sungai masih sangat penting, mengingat



jaringan jalan yang ada masih sangat terbatas di daerah pedalaman, dan belum adanya angkutan umum (penumpang/barang) di daerah pedalaman, menjadikan angkutan sungai menjadi sangat dominan, tidak saja di daerah hulu sungai tetapi juga pada daerah muara.

Tabel 2.14. Kapal Sungai Dan Trayek Yang Melayani Angkutan Sungai
Kalimantan Timur

No	Nama Kapal	Jenis	Grt Isi Kotor	Kapasitas		Trayek
				Penumpang (Orang)	Barang (Ton)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Km. Mira Farisma-999	Kapal Motor	158.07	55	43.61	Samarinda - Long Bagun
2	Km. Makassar Utama	Kapal Motor	103.34	50	31.27	Samarinda - Long Bagun
3	Km. Sinar Bagun-2	Kapal Motor	103.48	37	36.46	Samarinda - Long Bagun
4	Km. Ratah Indah.Dc	Kapal Motor	160.00	105	48.00	Samarinda - Long Bagun
5	Km. Nor Dalia F.3	Kapal Motor	137.70	95	41.01	Samarinda - Long Bagun
6	Km. Dorry Putra.2	Kapal Motor	119	39	39.00	Samarinda - Long Bagun
7	Km. Nur Budi Express	Kapal Motor	110.75	44	35.79	Samarinda - Long Bagun
8	Km. Nur Budi.F.2	Kapal Motor	105.16	35	34.50	Samarinda - Long Bagun
9	Km. Nur Fitri Indah	Kapal Motor	140.70	32	37.32	Samarinda - Long Bagun
10	Km. Mamahak Raya	Kapal Motor	124.50	26	41.99	Samarinda - Long Bagun
11	Km. Makassar.C	Kapal Motor	125.35	31	42.25	Samarinda - Long Bagun
12	Km. Sadri.B	Kapal Motor	85	85	35.95	Samarinda - Long Bagun
13	Km. Sadri.A	Kapal Motor	71	96	37.21	Samarinda - Long Bagun
14	Km. Cahaya Budi.4	Kapal Motor	82	56	30.00	Samarinda - Long Bagun
15	Km. Rizki Ramadhan	Kapal Motor	112.26	39	31.71	Samarinda - Long Bagun
16	Km. Al-Mu'minun	Kapal Motor	135.92	39	18.73	Samarinda - Datah Bilang
17	Km. Karya Utama.77 F	Kapal Motor	178.83	54	59.07	Samarinda - Long Iram
18	Km. P. Mahakam Indah	Kapal Motor	115.82	50	37.13	Samarinda - Long Iram
19	Km. Cahaya Selebes	Kapal Motor	113.97	68	35.13	Samarinda - Long Iram
20	Km. Kelian. Dc	Kapal Motor	143	51	46	Samarinda - Long Iram
21	Km. Nur Budi. C.2	Kapal Motor	121.05	40	39.73	Samarinda - Long Iram
22	Km. Nurhasanah	Kapal Motor	133.05	53	43	Samarinda - Long Iram
23	Km. Karya Utama. 77	Kapal Motor	77.43	36	23.73	Samarinda - Long Iram
24	Km. Sama Maju	Kapal Motor	99.27	26	33.09	Samarinda - Datah Bilang
25	Km. Bima Sakti	Kapal Motor	116.73	31	38.88	Samarinda - Melak
26	Km. Muhammadan. B	Kapal Motor	106.14	32	25.07	Samarinda - Melak
27	Km. Assabirin. B	Kapal Motor	135	70	42	Samarinda - Melak
28	Km. Kurnia. F	Kapal Motor	180.31	50	59.89	Samarinda - Damai



No	Nama Kapal	Jenis	Grt Isi Kotor	Kapasitas		Trayek
				Penumpang (Orang)	Barang (Ton)	
29	Km. Sumber Rezeki. Vi	Kapal Motor	115.91	52	37.02	Samarinda - Damai
30	Km. Berkat Sebia. B	Kapal Motor	146.99	41	48.8	Samarinda - Damai
31	Km. Berkat Sebia. B2	Kapal Motor	66 Gt	43	36	Samarinda - Damai
32	Km. Sumber Indah	Kapal Motor	158.95	53	52.13	Samarinda - Damai
33	Km. Aspian Noor	Kapal Motor	297.34	59	61	Samarinda - Damai
34	Km. Berkat Rahmat	Kapal Motor	127.09	50	41.11	Samarinda - Damai
35	Km. Melya Noor B	Kapal Motor	101	60	31	Samarinda - Damai
36	Km. Belayan Sejati C	Kapal Motor	181.96	46	60.78	Samarinda - Tabang
37	Km. Belayan Indah	Kapal Motor	166.08	56	54.42	Samarinda - Tabang
38	Km. Berkat Karya C	Kapal Motor	125.69	40	41.36	Samarinda - Tabang
39	Km. Diana Mas	Kapal Motor	53.94	28	16.94	Samarinda - Tabang
40	Km. Didi Putra	Kapal Motor	86.8	55	26.52	Samarinda - Tabang
41	Km. Mardiana	Kapal Motor	33 Gt	50	24.56	Samarinda - Tabang
42	Km. Ganda Mutiara B	Kapal Motor	91.16	35	26.52	Samarinda - Tabang
43	Km. Iwan Putra	Kapal Motor	150	36	50	Samarinda - Tabang
44	Km. Nordiana B	Kapal Motor	114.49	52	36.51	Samarinda - Tabang
45	Km. Nilam Hijrah Dewi	Kapal Motor	60.52	52	21.03	Samarinda - Tabang
46	Km. Nilam Hijrah Dewi Putra C	Kapal Motor	114.94	40	31.78	Samarinda - Tabang
47	Km. Noor Rahmat B	Kapal Motor	103.91	47	32.47	Samarinda - Tabang
48	Km. Belayan Sejati B	Kapal Motor	124.21	47	60.39	Samarinda - Tabang
49	Km. Fadli Putra	Kapal Motor	110.49	47	35.5	Samarinda - Tabang
50	Km. Ganda Mutiara C	Kapal Motor	144.14	45	47.51	Samarinda - Tabang
51	Km. Rahmad D	Kapal Motor	124.6	35	43.98	Samarinda - Tabang
52	Km. Rahmad Y-2	Kapal Motor	88.64	31	28.96	Samarinda - Tabang
53	Km. Rahmad Y-3	Kapal Motor	138.73	35	39.36	Samarinda - Tabang
54	Km. Rahmad Y-4	Kapal Motor	181.06	46	60.46	Samarinda - Tabang
55	Km. Deni Putra	Kapal Motor	18.16	31	35.47	Samarinda - Tabang
56	Km. Masa Karya	Kapal Motor	10.83	40	29.98	Samarinda - Long Tesak
57	Km. Torangga Prima	Kapal Motor	101.72	42	27.63	Samarinda - Long Tesak
58	Km. Hasil Karya. Idh	Kapal Motor	54.14	27	17	Samarinda - Long Tesak
59	Km. Normala Sari B	Kapal Motor	95.73	45	33.79	Samarinda - Long Tesak
60	Km. Kassandra	Kapal Motor	89.51	18	30.25	Samarinda - Long Tesak
61	Km. Istigomah	Kapal Motor	71.36	27	24.53	Samarinda - Long Tesak
62	Km. Mutiara Prima	Kapal Motor	72.69	40	22.65	Samarinda - Long Tesak
63	Km. Rencana Mulia	Kapal Motor	98.29	40	31.7	Samarinda - Long Tesak
64	Km. Hidayah	Kapal Motor	76.42	30	22	Samarinda - Long Tesak
65	Km. Surya Permai B	Kapal Motor	113.44	32	37.64	Samarinda - Ma Ancalong
66	Km. Andika Raya	Kapal Motor	73.02	51	25.78	Samarinda - Ma Ancalong
67	Km. Kud. Mengayetna	Kapal Motor	108.79	37	35.6	Samarinda - Ma Ancalong
68	Km. Rencana Behaqla	Kapal Motor	84.89	43	26.74	Samarinda - Ma Ancalong
69	Km. Frolisa	Kapal Motor	98.16	40	37.43	Samarinda - Muara Wahau
70	Km. Jaya Wijaya	Kapal Motor	107.83	36	35.06	Samarinda - Muara Wahau
71	Km. Bintang Mas	Kapal Motor	130.78	53	46.17	Samarinda - Muara Wahau
72	Km. Daya Putra	Kapal Motor	60.24	29	19.09	Samarinda - Muara Wahau
73	Km. Rawa Indah	Kapal Motor	79.37	51	24.2	Samarinda - Muara Wahau
74	Km. Air Bunga	Kapal Motor	60.72	31	21.43	Samarinda - Muara Wahau
75	Km. Sinar Mas	Kapal Motor	114.39	43	37.15	Samarinda - Muara Wahau
76	Km. Hikmah. A	Kapal Motor	89.5	27	27.17	Samarinda - Muara Wahau
77	Km. Medisa Putra. D	Kapal Motor	123.83	49	40.04	Samarinda - Muara Wahau
78	Km. Diana Putra C	Kapal Motor	109.59	37	35.91	Samarinda - Muara Wahau
79	Km. Wahau Harapan	Kapal Motor	58 Gt	27	42.58	Samarinda - Muara Wahau
80	Km. Telaqa Putra B	Kapal Motor	123.94	51	39.83	Samarinda - Muara Wahau
81	Km. Acesa Raya	Kapal Motor	104.18	43	33.55	Samarinda - Muara Wahau
82	Km. Telaqa Putra F	Kapal Motor	90.75	75	32.03	Samarinda - Muara Wahau
83	Km. Pancuran Indah	Kapal Motor	53.31	30	16.56	Samarinda - Muara Wahau
84	Km. Sama Manis B	Kapal Motor	82.23	27	27	Samarinda - Muara Wahau
85	Km. Rahmat A4	Kapal Motor	86	39	27	Samarinda - Muara Wahau
86	Km. Mitra Sari	Kapal Motor	78.63	30	25.05	Samarinda - Muara Wahau
87	Km. Sama Indah A	Kapal Motor	120.96	48	36.6	Samarinda - Muara Wahau
88	Km. Kalimantan B	Kapal Motor	123.46	42	43.58	Samarinda - Muara Wahau



Di Kota Samarinda sendiri memiliki prasarana angkutan sungai yang telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang dimiliki oleh dermaga/pelabuhan, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.15. Dermaga Angkutan Sungai di Kota Samarinda

No	Nama Dermaga	Nama Sungai	Kab/Kota	Jumlah	Dermaga					Fasilitas Dermaga				Kondisi		
					Panjang (m)	Lebar (m)	Luas (m ²)	Konstruksi	Tahun Pembuatan	Terminal R. Tunggu (m ²)	Lap. Parkir (m ²)	Kantor (m ²)	Fas.Umum (m ²)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Mahakam Hilir	Mahakam	Samarinda	2	160,5	28	4.494	Besi/Kayu	1993	150	419	44,27	4,65	60%		
				1					1975							
				1						1992						
				2						1996	150					
				6												
2	Mahakam Hulu	Mahakam	Samarinda	7	399,3	22	8.785	Besi/Kayu	1993	196	705	106	-	60%		
				1					1993						60%	
				1						1976				33	75%	
				1						1976					50%	
				1						1987					40%	
				1						1976					20%	
3	Harapan Baru	Mahakam	Samarinda	1	227	12,3	709,5	Besi/Kayu	1976	-	1.365	48	-	50%		
				1					1976					50%		
				1					1997					70%		
4	Samarinda Seberang	Mahakam	Samarinda	1	50,75	7,1	178,3	Besi/Kayu	1995	72	-	12	-	60%		
				1					1976					50%		
5	Loa Janan	Mahakam	Samarinda	1		23	3,7	168	Kayu	1995	36	138	13,34	-	80%	

Sumber : *Profil Perhubungan Kalimantan Timur, 2004*

Kota Samarinda pada saat ini memiliki bandara udara APT Pranoto Samarinda, terletak di tengah Kota Samarinda dengan kapasitas bandar udara kelas IIIA dengan lingkup pelayanan daerah pedalaman dan perkotaan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2023, Bandar udara tersebut melayani 384.600 orang penumpang yang datang dan berangkat sebanyak 368.313 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.16. Jumlah Penumpang Pesawat Udara di Bandar Udara APT Pranoto Samarinda, 2023

No	Bulan	Datang	Berangkat	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Januari	38.744	34.235	72.979
2	Pebruari	27.591	30.115	57.706
3	Maret	28.795	32.309	61.104
4	April	40.505	44.868	85.373
5	Mei	37.261	29.438	66.699
6	Juni	34.263	38.790	73.053
7	Juli	44.544	37.682	82.226
8	Agustus	32.868	34.715	67.583
9	September	34.446	34.356	68.802
10	Oktober	32.834	33.712	66.546



No	Bulan	Datang	Berangkat	Jumlah
11	Nopember	34.151	33.973	68.124
12	Desember	36.413	38.966	75.379
Jumlah Total		422.775	423.159	845.934

Sumber : Kota Samarinda Dalam Angka Tahun 2024

Dari tabel diatas memperlihatkan bahwa puncak pelayanan Bandar udara di Kota Samrinda terjadi pada bulan Desember dan Juli. Dengan adanya lalu lintas melalui bandara tersebut juga mempengaruhi tingkat pelayanan jalan, terutama jalan akses yang menghubungkan ke/dari bandara.

F. Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Perhubungan

Adapun kelompok layanan Dinas Perhubungan tidak hanya menyoar pengguna jalan atau angkutan saja tetapi juga seluruh ekosistem transportasi agar tercipta keselamatan, kelancaran, keterjangkauan dan keteraturan dalam mobilitas masyarakat.

Berikut adalah kelompok sasaran layanan Dinas Perhubungan :

- Masyarakat Umum/Pengguna Transportasi meliputi Penumpang Angkutan umum dan pengguna jalan raya
- Penyelenggara Jasa Transportasi meliputi perusahaan angkutan, operator terminal bandara stasiun dan perusahaan logistik
- Pengemudi/Awak transportasi meliputi supir angkutan umum, pengemudi angkutan barang
- Pelaku usaha terkait transportasi meliputi Bengkel, agen tiket dan UMKM
- Pemerintah daerah dan instansi terkait sebagai pendukung perencanaan tata ruang kota dan transportasi serta menjadi pengawas regulasi dan kebijakan
- Kelompok Rentan meliputi pelajar, lansia dan penyandang disabilitas yang membutuhkan aksesibilitas transportasi ramah inklusif.

G. Mitra Dinas Perhubungan dalam Pemberian Pelayanan

Seiring dengan berkembangnya era globalisasi yang semakin maju, semakin berkembang pula tingkat mobilitas masyarakat dalam kegiatan dan akitivitas sosial dan ekonominya. Karenanya diperlukan adanya prasarana dan sarana transportasi



yang dapat menopang kegiatan dan mobilitas masyarakat yang semakin berkembang tersebut. Kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana transportasi yang menunjang tersebut tidak dapat berdiri sendiri melalui peran satu pihak saja. Diperlukan adanya peran serta antara lembaga yang terkait.

Dalam struktur lembaga pemerintah daerah melalui dinas, perencanaan dan pembangunan transportasi di daerah dapat dibedakan lingkup kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan sector perhubungan. Dinas yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan penyelenggaraan transportasi adalah Dinas Perhubungan, namun tidak dapat melingkupi keseluruhan aspek-aspek yang berkaitan dengan pelayanan, keselamatan, keamanan, kenyamanan transportasi yang efektif dan efisien. Adapun dinas pemerintah yang memiliki keterkaitan tidak langsung adalah dinas yang dalam pelaksanaan lingkup kewenangannya berkaitan dengan sistem transportasi.

Disamping hal tersebut diatas, terdapat lembaga di luar dari pemerintah yang memiliki kapasitas dalam menentukan baik atau buruknya sistem transportasi. Lembaga-lembaga non pemerintah tersebut dapat berupa lembaga usaha dan lembaga masyarakat yang kemudian bermitra dengan lembaga pemerintah dalam mewujudkan dan mensukseskan arah kebijakan pada sector transportasi yang diselenggarakan.

Untuk memetakan kelembagaan yang berkaitan dengan sector perhubungan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.17. Lembaga-Lembaga Yang Berkaitan Dengan Sektor Perhubungan Menurut Kewenangannya

No	Kelembagaan	Lingkup Yang Berhubungan Perhubungan
	Bapperida	Perencanaan dan Penganggaran
	Disperkim	Koordinasi, Konsultasi dan Pmebangunan
	Dinas PUPR	Perencanaan dan Pembangunan prasarana
	BPTD Kelas II Kaltim	Koordinasi, Konsultasi dan Pengendalian
	Dishub Provinsi	Koordinasi, Konsultasi dan Pengendalian
	SATPOL PP	Penertiban dan penegakan hukum



No	Kelembagaan	Lingkup Yang Berhubungan Perhubungan
	Polresta	Penertiban, penegakan hukum, pendidikan, pelatihan, bimbingan dan penyuluhan
	Polairud	Penertiban dan penegakan hukum
	UPBU APT. PRANOTO	Koordinasi dan Konsultasi
	KSOP Kelas	Koordinasi dan Konsultasi
	BAPENDA	Retribusi
	BPKAD	Penganggaran
	Dinas Lingkungan Hidup	Pemantauan dampak dan pengendalian
	DPMPTSP	Perizinan
	Dinas Koperasi,UKM dan Perindustrian	Koordinasi, distribusi, dan perizinan
	Dinas Perdagangan	Koordinasi, distribusi, dan perizinan
	Organda	Perlindungan, penggunaan, dan pemanfaatan
	Orgamu	Perlindungan, penggunaan, dan pemanfaatan
	Asosisasi Angkutan	Perlindungan, penggunaan, dan pemanfaatan
	Perusahaan Ekspedisi	Perlindungan, penggunaan, dan pemanfaatan
	Masyarakat	Perlindungan, penggunaan, dan pemanfaatan

Lembaga teknis dan operasional pada sector perhubungan terdiri atas Bappeda sebagai lembaga perencanaan yang bersifat makro dan melakukan pembiayaan yang berkaitan dengan sector transportasi, Dinas Perhubungan yang berperan sebagai manajemen transportasi, Dinas Pekerjaan Umum sebagai bidang penyedia prasarana jalan, dan POLRI yang berperan sebagai lembaga penegak hukum. Peran serta keempat lembaga tersebut dapat menciptakan suatu tujuan terbentuknya sistem transportasi yang aman, lancar, dan tertib. Perhubungan sendiri adalah suatu tataran sistem penyelenggaraan transportasi darat, udara maupun perairan daratan yang saling berkaitan satu sama lain dan berintegasi secara keseluruhan dengan ruang lalu lintas (jalan, jembatan, dan atau rel) yang berada di bawah sistem otonomi daerah. Dinas Perhubungan adalah suatu lembaga yang terdiri secara mandiri dalam melaksanakan peran pelaksanaan kebijakan berdasarkan pemerintahan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah memberikan desentralisasi pada Dinas Perhubungan untuk melaksanakan otonomi

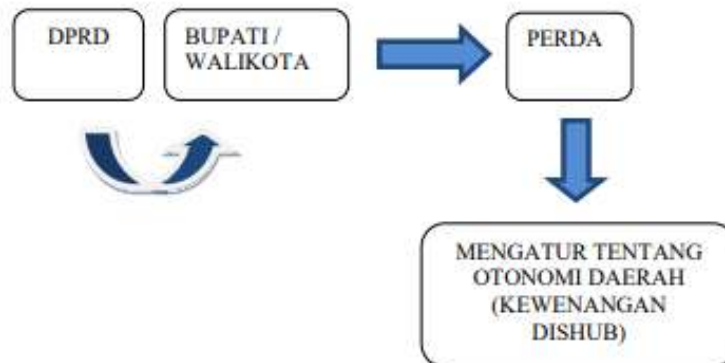


seluas-luasnya berikut semua aparatur dan keuangannya kecuali hal-hal yang bersifat nasional yang akan diatur dengan undang-undang. Berikut ini kedudukan Kemenhub (Pemerintah Pusat) dalam bentuk bagan.

Kedudukan Pemerintah Pusat



Kedudukan Perda dalam Otonomi



Berdasarkan bagan di atas dapat dilihat bahwa Kemenhub adalah lembaga yang mempunyai wewenang mengeluarkan kebijakan dan/atau aturan hukum yang mengatur tentang masalah transportasi. Kebijakan atau aturan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat adalah suatu aturan hukum yang mengikat segala pihak yang terlibat dalam kegiatan transportasi. Namun setelah adanya otonomi daerah, Dinas Perhubungan mempunyai kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri segala urusan rumah tangganya (transportasi) sesuai dengan ketentuan otonomi daerah yang diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang kewenangan otoritas Dinas Perhubungan dalam



menjalankan fungsinya. Dinas Perhubungan adalah lembaga yang berdiri berdasarkan desentralisasi.

Desentralisasi di sini mengandung pengertian pelepasan diri dari pusat, atau pelimpahan kekuasaan pemerintah dari pusat pada daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri (daerah otonom). Namun tidak banyak pula pihak yang dapat mengapresiasi peran Dinas Perhubungan dengan segala kewenangan dan fungsinya. Sering kali hanyalah fungsi teknis lapangan saja yang dipahami oleh masyarakat. Contoh tindakan teknis yang paling banyak diketahui oleh masyarakat adalah kegiatan mengatur lalu lintas jalan, penggantian lampu *traffic light*, pemasangan rambu lalu lintas, menilang angkutan umum yang melnaggar peraturan (menarik retribusi), atau kegiatan teknis lapangan lainnya.

Dalam struktur organisasi Dinas Perhubungan terdapat fungsi lain yang tidak kalah penting dengan fungsi teknis seperti fungsi administratif dan atau fungsi pengaturan. Fungsi ini berkaitan dengan penyiapan perumusan kebijakan di bidang transportasi serta penyusunan norma pedoman kriteria dan prosedur di bidang transportasi. Dalam fungsinya sebagai pihak pelaksana kebijakan untuk membentuk sistem transportasi yang aman, tertib, dan lancar (dalam hal ini angkutan umum), Dinas Perhubungan juga berperan untuk menjaga kelancaran lalu lintas dalam lingkup terminal dan/atau jembatan timbang sesuai dengan kewenangannya.

Salah satu contoh peran Dinas Perhubungan dalam menjaga terjaganya sistem lalu lintas yang terpadu adalah dengan penegakan Pasal 276 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek tidak singgah di Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)" Jika dikaji dari ketentuan pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran Dinas Perhubungan dalam menertibkan aturan lalu lintas angkutan umum adalah suatu upaya implementasi atas kewenangannya dalam menjaga ketertiban lalu lintas di terminal, serta aturan yang sudah diatur sebelumnya agar tercipta suatu sistem transportasi yang aman tertib dan lancar, karena berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah diatur ketentuan, "Setiap Kendaran Bermotor Umum dalam trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek" hal ini sebagai upaya pengembalian fungsi Terminal yang belakangan sudah tidak diperhatikan oleh pengemudi kendaraan bermotor umum. Terminal sebenarnya merupakan wadah untuk mobilitas publik suatu wilayah tertentu, atau sebagai pintu masuk datangnya orang-orang dari luar daerah ke wilayah tertentu.



Sedangkan lembaga non teknis yang juga dalam naungan pemerintah kota, terdapat beberapa dinas pemerintahan yang memiliki keeratan yang kuat dalam menunjang sistem transportasi yang aman, tertib, lancar, efektif dan efisien. Dinas-dinas tersebut adalah Dinas Tata Ruang sebagai perencanaan ruang dimana unsur transportasi sebagai pembentuk dari suatu ruang dalam bentuk pemanfaatan dan penggunaan lahan, Dinas Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas transportasi sehingga membutuhkan suatu pemantauan dan pengendalian yang dilakukan secara koordinatif, Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai lembaga pemerintah yang berkaitan dengan pola distribusi dan koleksi serta kegiatan yang melingkupi operasional kendaraan angkutan barang, dan PD Perpustakaan adalah lembaga khusus daerah yang melingkupi pendapatan melalui jasa perpustakaan melalui pemanfaatan ruang-ruang atau lokasi yang ditetapkan sebagai daerah parkir.

Adapun lembaga lainnya yang dibentuk berdasarkan jenis moda dan perkembangannya yang berupa Organda, Asosiasi angkutan online dan angkutan lainnya, perusahaan ekspedisi dan masyarakat adalah sebagai pengguna dari perencanaan perhubungan. Sebagai pengguna sangat berharap dapat dilakukan secara efektif dan efisien dengan mekanisme perizinan. Berkaitan dengan perencanaan transportasi, pengguna dilibatkan dalam setiap tahapan perencanaan dan pembangunan sehingga pelaksanaan kegiatan sector perhubungan dapat diwujudkan dengan baik.

Sedangkan dalam hirarki Dinas Perhubungan Kota dapat dijabarkan secara vertikal dan horizontal terkait dengan perencanaan dan pembangunan sector transportasi. Jabaran kewenangan Dinas Perhubungan Kota untuk prasarana dan sarana transportasi didasarkan pada status dan lingkup pelayanan prasarana dan sarana transportasi itu sendiri. Meskipun beberapa diantaranya bagian dari sector transportasi merupakan pada dinas yang lainnya, seperti pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan yang merupakan kewenangan perencanaan dan pembangunannya pada Dinas PU Binamarga. Selain itu, perencanaan dan pembangunan trotoar sebagai fasilitas pejalan kaki yang juga merupakan lingkup program Dinas PU dan Dinas Tata Ruang. Jenis kegiatan dan lingkup prasarana transportasi lainnya seperti perpustakaan, pemanfaatan sungai sebagai media transportasi dan lain sebagainya.

Untuk keperluan dan kepentingan perencanaan dan pembangunan transportasi lainnya seperti kereta api, transportasi laut dan udara, dengan lingkup program yang dibawah kewenangan lembaga lainnya, seperti PT, KAI, Pelindo, PT. Angkasa Pura, lembaga pemerintahan tingkat provinsi dan pusat yang menekankan pada posisi Dinas Perhubungan Kota membutuhkan penguatan melalui jalur



koordinasi secara vertikal. Kegiatan ini tentu saja akan menghasilkan kapasitas Dinas Perhubungan untuk memadukan dan mensinergikan program perencanaan dan penataan sector transportasi dalam wilayah administrasinya. Dengan demikian, peranan Dinas Perhubungan Kota tidak hanya pada kegiatan yang bersifat teknis, akan tetapi menjadi bagian dari perwujudan sistem jaringan transportasi yang handal, efektif dan efisien.

Sedangkan pada level wilayah yang terdiri atas beberapa kelembagaan dan pengusaha jasa transportasi, Dinas Perhubungan Kota lebih menekankan pada program pembinaan dan pelayanan guna terwujudnya suatu pelayanan dan ketersediaan jaringan transportasi yang memadai. Dalam kegiatan pembinaan dalam tataran wilayah administrasinya yang berkaitan dengan penyelenggaraan transportasi meliputi pembinaan pada pelaku penyedia jasa transportasi maupun lembaga atau organisasi jasa angkutan yang terbentuk dan lain sebagainya. Sedangkan fungsi pelayanan adalah memberikan layanan administrasi dan perizinan yang terkait dengan jasa usaha pengangkutan.

2.2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan

A. Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan

1. Permasalahan Sekretariat

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat, antara lain :

- a. Terbatasnya Kualitas dan kuantitas SDM yang bersertifikat keahlian di bidang perhubungan
- b. Gedung kantor yang ada kurang representatif untuk mendukung pelayanan PD, suasana kerja dan tata ruang kantor kurang mendukung aparatur untuk bekerja maksimal
- c. Sarana dan Prasarana Peralatan dan Pendukung Kantor, dan Sarana dan Prasarana Operasional yang ada kurang memadai baik secara kualitas dan kuantitas.

2. Permasalahan Bidang Lalu Lintas Jalan

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bidang Lalu Lintas Jalan, antara lain :



- a. Belum adanya langkah konkrit terhadap pengendalian lalu lintas angkutan barang yang melebihi muatan sumbu terberat (MST) yang diijinkan
- b. Fungsi ruas jalan yang berstatus jalan Nasional dan jalan Provinsi yang belum tertata sesuai fungsi dan peruntukannya, terkait rekayasa dan management lalu lintas
- c. Masih banyaknya pemanfaatan ruang manfaat jalan (RUMAJA) dan ruang milik jalan (RUMIJA) yang dipergunakan tidak sesuai dengan fungsinya sehingga mengurangi kinerja jalan
- d. Belum optimalnya penegakan atas aturan atau regulasi terhadap pergerakan lalu lintas angkutan jalan pada ruas jalan pada wilayah kota
- e. Terbatasnya jumlah petugas penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) sehingga belum dapat optimal dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian baik di bidang lalu lintas angkutan jalan dan bidang lalu lintas angkutan sungai
- f. Tingginya kasus pelanggaran lalu lintas sehingga perlu dilakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penindakan terhadap pelanggar ketentuan dalam berlalu lintas secara bersama-sama dengan instansi terkait
- g. Belum optimalnya pelaksanaan tugas yang disebabkan terbatasnya sarana utama dalam pelaksanaan tugas dalam bentuk kendaraan operasional serta peralatan dan perlengkapan pendukung lainnya
- h. Belum optimalnya koordinasi dalam hal penyelarasan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan dengan instansi lainnya dalam pelaksanaan tugas di lapangan
- i. Belum terlayannya bandara dan pelabuhan sungai oleh trayek angkutan kota yang menyebabkan dominasinya layanan oleh angkutan carteran
- j. Guna memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, Seksi Perparkiran memiliki beberapa permasalahan antara lain :
 - 1) Belum optimalnya pembinaan terhadap para juru parkir sehingga sisi pelayanan dan pendapatan asli daerah belum mendapat hasil yang diharapkan, hal ini perlu dilakukan upaya pembekalan dan pembinaan sikap dan mental, serta teknis pelaksanaan tugas
 - 2) Perbandingan petugas juru parkir dengan wilayah yang dilayani tidak sebanding sehingga diperlukan penambahan petugas sebagai juru parkir
 - 3) Kurangnya ketersediaan pembangunan kantong parkir dan gedung parkir serta penerapan teknologi tepat guna yang dapat menampung sejumlah kendaraan sehingga aktifitas parkir tepi jalan dapat dikurangi secara drastis atau dihilangkan sama sekali
 - 4) Kurangnya kendaraan operasional sehingga kinerja petugas tidak dapat optimal dan baik
 - 5) Belum optimalnya peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait guna pembinaan dan peningkatan kinerja.



3. Permasalahan Bidang Prasarana

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bidang Prasarana, antara lain :

- a. Belum optimalnya penyediaan fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan sesuai dengan kebutuhan sehingga belum bisa memberikan kepastian dan keamanan serta informasi berlalu lintas secara baik dan optimal kepada masyarakat
- b. Belum tersedianya rencana induk pengembangan transportasi sungai
- c. Masih banyak terminal angkutan sungai yang belum memiliki studi lingkungan
- d. Kurang tersedianya fasilitas penunjang berupa rambu-rambu navigasi, halte dan fasilitas lainnya untuk alur pelayaran
- e. Adanya pemahaman yang berbeda antara Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dengan KM Perhubungan Nomor 58 Tahun 2007 terhadap penanganan kapal-kapal yang berlayar di perairan daratan
- f. Belum adanya kepastian informasi berkaitan penanganan kerjasama dengan Pelindo dan KSOP untuk Terminal Peti Kemas Palaran dan Terminal Penumpang Umum
- g. Belum terdatanya Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan galangan – galangan kapal yang berada dalam wilayah DLKp dan DLKr Pelabuhan Laut Samarinda
- h. Belum optimalnya kegiatan pendataan dan inventrisasi terhadap fasilitas keselamatan dan keamanan di sektor perhubungan secara baik sehingga akan berdampak pada kurang optimalnya kinerja sektor perhubungan
- i. Guna memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa angkutan umum di terminal, Seksi Prasarana Jalan selaku pengelola terminal memiliki beberapa permasalahan anata lain :
 - 1) Kurangnya kompetensi petugas terminal dalam pelaksanaan tugas
 - 2) Kurangnya jumlah personi terminal yang proporsional
 - 3) Belum memadainya fisik fasilitas utama dan pendukung terminal sehingga fungsi pelayanan kepada masyarakat dan penyedia jasa angkutan belum optimal.

4. Permasalahan Bidang Keselamatan

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bidang Keselamatan, antara lain :



- a. Kurangnya kesadaran dan Kedisiplinan Masyarakat dalam berlalu lintas perlu ditingkatkan
- b. Tingginya jumlah angka kecelakaan Lalu Lintas di jalan raya
- c. Kondisi permukaan jalan yang memiliki kinerja kurang baik untuk digunakan untuk lalu lintas angkutan jalan dan kendaraan lainnya karena adanya kerusakan jalan dengan tingkat ringan, sedang hingga berat yang belum segera dilakukan perbaikan
- d. Minimnya fasilitas keselamatan pelayaran transportasi sungai
- e. Pendangkalan alur pelayaran transportasi sungai di beberapa titik (spot) sepanjang sungai
- f. Sangat terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi keahlian di bidang sungai
- g. Manajemen perusahaan angkutan umum yang masih konvensional atau tradisional
- h. Belum dilaksanakannya investigasi dan audit pelayanan transportasi sungai
- i. Belum terbentuknya Dewan Maritim Kota
- j. Perlunya pemisahan kewenangan penanganan kapal-kapal GT 7 ke bawah dan GT 7 ke atas.
- k. Untuk memberikan jaminan atas kelaikan kendaraan angkutan penumpang umum dan kendaraan barang yang beroperasi di jalan, Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor memiliki permasalahan dalam pelaksanaan tugas antara lain :
 - 1) Sumber daya manusia berkualifikasi penguji dengan berbagai tingkatannya sesuai dengan kompetensinya sangat terbatas dan perlu dilakukan penambahan dengan cara penerimaan pegawai baru sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi dan / atau mengirimkan pegawai untuk mengikuti pendidikan kompetensi dimaksud
 - 2) Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas sehingga kecermatan dan keakuratan terhadap hasil pengujian kendaraan bermotor dapat tercapai
 - 3) Belum optimalnya kecepatan dan efisiensi waktu serta keakuratan hasil pengujian pada pengujian kendaraan bermotor yang harus didukung dengan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

5. Permasalahan Bidang Angkutan

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bidang Angkutan, antara lain :



- a. Berkurangnya minat masyarakat terhadap penggunaan jasa angkutan umum
- b. Perlunya peningkatan dan pembinaan kepada para pemilik pengusaha serta operator lapangan dalam peningkatan kualitas pelayanan bagi angkutan umum agar dapat berkompetisi dalam persaingan pasar yang sehat
- c. Koneksitas terhadap jaringan pelayanan angkutan umum yang belum terintegrasi dengan moda transportasi lainnya dengan baik sehingga berdampak pada pemborosan waktu biaya dan kondisi lainnya.
- d. Kinerja pelayanan angkutan sungai yang masih rendah
- e. Rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan jasa angkutan sungai
- f. Belum terciptanya pelaporan angkutan sungai baik penumpang dan atau barang secara periodik
- g. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam hal pengawasan teknis baik di transportasi jalan raya maupun transportasi sungai
- h. Pengawasan dan pengendalian bagi kapal pada lalu lintas angkutan sungai belum optimal karena keterbatasan sarana dan fasilitas utama berupa kapal cepat dan kapal patroli.

Berdasarkan hal tersebut diatas yang memperlihatkan bahwa permasalahan-permasalahan pada sector perhubungan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang merupakan kota memiliki 4 (empat) jenis moda yang diselenggarakan, yakni transportasi angkutan jalan, transportasi sungai, transportasi kereta api, dan transportasi udara. Keempat moda transportasi tersebut memiliki karakteristik perkembangannya masing-masing dan tidak semua moda transportasi tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Kota sehingga dibutuhkan kegiatan koordinasi.

Permasalahan-permasalahan perhubungan di Kota Samarinda yang memerlukan perhatian dan penanganan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dipetakan sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 2.18. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Lalu lintas Jalan		
1	Kualitas Pelayanan Bidang Perhubungan Yang Belum memenuhi Standar	Pengelolaan Perparkiran Belum Optimal untuk mengatasi Kemacetan dan Peningkatan PAD	➤ Belum Optimalnya Pembinaan Terhadap Para Juru Parkir Sehingga dalam Sisi Pelayanan Dan



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>Pendapatan Asli Daerah Belum Mendapat Hasil Yang Diharapkan</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Kurangnya Ketersediaan Kantong Parkir dan Gedung Parkir Serta Belum adanya Penerapan Teknologi Tepat Guna Sehingga aktivitas Parkir Tepi jalan Cenderung Memicu Kemacetan➤ SRP (Satuan Ruang Parkir) Yang Di gunakan Untuk Kegiatan Usaha / PKL.
		Ketersediaan Perlengkapan Jalan Belum Optimal dari Segi Kuantitas dan Kualitas	<ul style="list-style-type: none">➤ Belum Optimalnya Penyediaan Fasilitas Perlengkapan dan Kselamatan Jalan Sesuai Dengan Kebutuhan➤ Belum Optimalnya Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas Untuk Jaringan Jalan Belum Optimal	<ul style="list-style-type: none">➤ Fungsi Ruas Jalan yang Berstatus Jalan Nasional dan Jalan Provinsi Yang Belum Tertata Sesuai Fungsi dan Peruntukannya, Terkait Rekayasa dan Manajemen Lalu Lintas➤ Masih Banyaknya Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan (RUMAJA) dan ruang Milik Jalan (RUMIJA) Yang Digunakan tidak Sesuai dengan Fungsinya Sehingga Mengurangi Kinerja Jalan.➤ Belum ada Langkah Konkrit Terhadap Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Barang Yang melebihi Muatan Sumbu Terberat (MST) yang di Izinkan.



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		Menurunnya Kinerja Angkutan umum Di kota Samarinda	<ul style="list-style-type: none">➤ Sarana Angkutan Umum Kurang Layak, Rata-rata Usia Kendaraan Diatas 15 Tahun ;➤ Kepastian Waktu tunggu Kendaraan, Waktu perjalanan , dan rute Yang dilewati tidak Bisa Di prediksi Sehingga Banyak Masyarakat yang Kurang Berminat Menggunakan Angkutan Umum➤ Belum Semua Jaringan Jalan dan Daerah Pemukiman/ Perumahan Terjangkau Trayek Angkutan Menuju Lokasi Aktivitas Masyarakat (Kantor, Sekolah, Pusat Perbelanjaan dll)
		Menurunnya Kewajiban Melakukan Wajib Uji Berkala	<ul style="list-style-type: none">➤ Masih Banyak Beroperasinya Kendaraan Kategori Over Dimensi dan Over Load Sehingga Tidak Mau mengujikan Kendaraanya Pada UPTD PKB➤ Pengawasan Dan penindakan Bagi Pelanggar Tidak Bisa Dilakukan, Karena Kewenangan Petugas Terbatas (PPNS)
		Banyaknya Bangunan Gedung Kantor Pelabuhan/ Dermaga Yang Belum Memadai Sebagai Penunjang Fasilitas Umum Pada Pengguna Jasa Trasnportasi Diperairan Sungai Mahakam	<ul style="list-style-type: none">➤ Belum Terpenuhinya Pengembangan Dan Pembangunan Pelabuhan/ Dermaga Yang dikelola Dinas Perhubungan

B. Issu Strategis Dinas Perhubungan



Sebagai tolok ukur dalam pencapaian yang telah dilakukan Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tupoksinya adalah sebagai berikut :

- Tersedianya Angkutan Umum yang melayani wilayah yang memiliki jaringan jalan untuk jaringan jalan kota;
- Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kota;
- Tersedianya halte pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek;
- Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek;
- Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kota;
- Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten/kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji;
- Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kota yang telah memiliki terminal;
- Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalin, pengelolaan parkir pada kota;
- Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap angkutan umum;
- Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kota;
- Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan dapat dilayari;
- Tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam Kota yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari;
- Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau;



- Terpenuhi standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi antar pelabuhan dalam satu kota;
- Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau.

C. Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

1. Kekuatan dalam Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

- a. Posisi dan kedudukan Kota Samarinda sebagai ibukota provinsi dan sebagai kota yang berpengaruh besar dengan pengembangan IKN. Sebagai Kawasan perkotaan dengan populasi penduduk yang akan berkembang membutuhkan system manajemen transportasi perkotaan yang efektif dan efisien.
- b. Secara geohidrologis wilayah Kota Samarinda dibelah oleh Sungai Mahakam sebagai sungai besar di Indonesia yang difungsikan sebagai media transportasi dan sekaligus sebagai ikon wilayah yang mengarah pada *water front city*
- c. Keberadaan moda transportasi udara, kereta api, angkutan sungai dan angkutan jalan sebagai potensi untuk pengembangan system transportasi multimoda, baik antar maupun intra moda.
- d. Tingkat mobilitas penduduk perkotaan yang semakin meningkat yang membutuhkan aktu pergerakan dan layanan yang dituntut semakin cepat
- e. Dukungan kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam rangka pengembangan system transportasi angkutan massal dan angkutan yang ramah lingkungan

2. Kelemahan Dalam Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

1. Pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan tingkat pendidikan dan pendapatan
2. Makin meningkatnya kemauan masyarakat akan pelayanan jasa transportasi yang handal, nyaman dan terjangkau



3. Kebijakan yang tidak seiring dengan teori transportasi angkutan massal
4. Pertumbuhan jenis kendaraan yang semakin meningkat, yang tidak seiring dengan ketersediaan lahan
5. Pembebasan lahan
6. Percepatan pembangunan ekonomi
7. Jaringan transportasi jalan yang ada telah di kelilingi kawasan pemukiman masyarakat sehingga terkendala dalam pembebasan lahan
8. Kebijakan sektor dan sub sektor terkait kurang mendukung kebijakan transportasi, sehingga terjadi ketidakpaduan program pada tingkat operasional, seperti pengembangan tata ruang yang memerlukan sinergi dengan pengembangan jaringan jalan.
9. Keterbatasan sumber dana dalam pembiayaan pembangunan dan pengembangan moda dan prasarana transportasi, sedangkan tuntutan pemakai jasa transportasi terhadap kualitas dan kuantitas pelayanan tetap menjadi perhatian.
10. Berkurangnya kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah berdasarkan undang-undang No 23 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Perhubungan No 52 Tahun 2011 tentang alur pelayaran sungai
11. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai.

3. Peluang dalam Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

- a. Dukungan kebijakan maupun pendanaan kegiatan dari pemerintah (walau masih terbatas) baik sumber dana APBN, Provinsi maupun APBD Kota sebagai faktor pendukung keberhasilan operasional pelayanan sektor transportasi
- b. Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima terhadap layanan publik perhubungan mendorong untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dan melakukan inovasi pelayanan
- c. Kebutuhan dasar dibidang infrastruktur perhubungan dalam upaya peningkatan layanan kepada masyarakat pengguna dan pemakai jasa perhubungan
- d. Masyarakat sangat mendambakan terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai, aman dan nyaman, sehingga layanan perhubungan mendapat perhatian dan penanganan yang optimal
- e. Kuantitas personil yang memadai
- f. Adanya kemauan para pemangku kepentingan dan stakeholder serta masyarakat, untuk dapat bertransportasi yang aman dan lancar



- g. Kondisi geografis yang masih belum padat penduduk dan atau terpakai secara utuh, masih memungkinkan untuk pengembangan kawasan transportasi
- h. Visi dan misi Walikota terpilih memiliki misi pembangunan yang semuanya memiliki keterkaitan erat dengan sector perhubungan dan mewujudkan Kota Samarinda Maju.

4. Ancaman Dalam Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

- a. Munculnya kawasan-kawasan baru yang berbasis profit komersil yang sering menjadi penyebab terjadinya kemacetan lalu lintas seperti di manfaatkannya ruas jalan atau koridor jalan sebagai pasar malam
- b. Meningkatnya angka kecelakaan, khusus pengguna transportasi jalan
- c. Belum optimalnya pelayanan angkutan umum sehingga memberi dampak tingginya pengguna kendaraan pribadi.
- d. Telah terbentuknya pola pikir masyarakat bahwa menggunakan kendaraan pribadi lebih efisien dari pada kendaraan umum
- e. Munculnya berbagai jenis kendaraan alternative yang juga beroperasi sebagai layanan angkutan umum dan beroperasi pada ruas-ruas jalan yang padat lalu lintas.
- f. Tingginya penggunaan bagian ruas jalan sebagai tempat parkir kendaraan, terutama di Kawasan pusat-pusat perdagangan dan jasa yang seringkali menjadi penyebab terjadinya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Visi dan Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pada dasarnya dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan penjabaran secara terperinci dari perencanaan pembangunan daerah Kota Samarinda, dengan demikian setiap tahapan-tahapan yang disusun dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Samarinda harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2025-2029. Sebagaimana Visi dan Misi Pemerintah Kota Samarinda untuk periode 2025-2029 yakni “SAMARINDA MAJU UNTUK KALTIM MAJU”. Kata MAJU dalam hal ini adalah anonim dari **Mandiri, Adil, ber-Jaya, dan Unggul**.

Mengacu pada Visi Kota Samarinda tersebut, kemudian ditetapkan 6 (enam) Misi pembangunan Kota Samarinda Tahun 2025-2029 sebagai bentuk upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi tersebut. Adapun Misi Kota Samarinda, yakni :

1. Sumber Daya Manusia
Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing
2. Ekonomi Kota
Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan
3. Infrastruktur
Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.
4. Lingkungan Kota
Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis
5. Pemerintahan
Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel

Dalam rangka perwujudan visi dan misi tersebut, terdapat 6 (enam) program aksi yang akan dilaksanakan sebagai berikut :



1. Melanjutkan dan Menuntaskan Program Unggulan
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang Unggul, Berbudaya, dan Berdaya Saing
3. Samarinda sebagai Kota Perekonomian yang Inklusif, Mandiri dan Berkelanjutan
4. Infrastruktur Berkualitas dan Berkeadilan
5. Samarinda dengan Lingkungan Hijau, Asri, dan Sehat
6. Samarinda dengan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Berketahanan, dan Adaptif

Berkaitan dengan Visi, Misi dan program aksi Pemerintah Kota Samarinda tahun 2025-2029 tersebut, secara inklusif Dinas Perhubungan Kota Samarinda sangat dituntut dan diharapkan untuk mewujudkan visi misi Pemerintah Kota Samarinda dalam bidang sector perhubungan. Dengan tema Visi “SAMARINDA MAJU UNTUK KALTIM MAJU” yang mengindikasikan sesuatu yang harus bergerak, maka hal tersebut sangat relevan dengan tupoksi Dinas Perhubungan. Oleh karena itu, “MAJU” akan diartikan suatu elemen kota yang harus lancar dan terbebas dari masalah kemacetan, berkembang melalui infrastruktur perhubungan sesuai dengan dinamika perkembangan kota, dan cepat dalam hal pelayanan bidang perhubungan.

Kota Samarinda sebagai wilayah otonom yang berperan sebagai wilayah administrasi dan sekaligus sebagai wilayah ibukota Provinsi Kalimantan Timur. Kedudukan ini sangat mempengaruhi perkembangan dan permasalahan yang terjadi dalam wilayah Kota Samarinda, terutama pada sector perhubungan. Kemajuan wilayah Provinsi Kalimantan Timur sangat dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi di Kota Samarinda, begitupula sebaliknya bahwa Kota Samarinda sebagai cerminan bagi kemajuan wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Kota Samarinda memiliki perkembangan dan pertumbuhan yang begitu pesat yang tidak hanya secara fisik lingkungan, akan tetapi perkembangan dan pertumbuhan pada sector perhubungan. Selain itu, terjadinya pemusatan pelayanan kegiatan transportasi sehingga dibutuhkan suatu pembangunan dan penyediaan infrastruktur transportasi yang handal dan terpadu. Infrastruktur transportasi tersebut juga dapat mempengaruhi orientasi perkembangan secara fisik ruang di Kota Samarinda sehingga dibutuhkan suatu penanganan dan pengarahannya secara efektif dan efisien terwujudnya Kota Samarinda yang MAJU dimasa mendatang.

Sehubungan dengan hal tersebut, 5 misi pemerintah daerah Kota Samarinda yang menjadi capaian hingga 5 tahun mendatang kaitannya dengan sector perhubungan, yakni dalam hal :

a. Sumber Daya Manusia

SDM Dinas Perhubungan Kota Samarinda dituntut memiliki profesionalisme dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diembangkannya. SDM ini



berkaitan dengan rekrutmen, kapasitas ilmu dan pengetahuan individual, penempatan posisi sesuai bidangnya, kinerja layanan dan di lapangan.

Kapasitas dan tanggungjawab SDM Perhubungan dapat menghasilkan penanganan dan penguraian permasalahan-permasalahan di sektor perhubungan di Kota Samarinda, terutama SDM yang secara langsung melaksanakan tugas di lapangan. Kemampuan untuk menjawab fenomena bidang perhubungan kedalam konsepsi bidang transportasi menurut social, ekonomi dan budaya masyarakat secara efektif dan efisien dalam aspek yang lebih luas.

b. Ekonomi Kota

Melalui program-program perhubungan yang berdampak langsung maupun tidak dalam kegiatan perekonomian kota yang semakin membaik dan berkembang. Sektor perhubungan melalui program-program kegiatan Dinas Perhubungan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat melalui aksesibilitas yang lancar dan tingkat movilitas pergerakan penumpang dan barang yang semakin meningkat. Hal ini tentu saja harus dibarengi dengan peningkatnya peran dan jangkauan layanan prasarana dan sarana transportasi sesuai orientasi perkembangan kota saat ini dan dimasa mendatang.

Peningkatan dan kemajuan perekonomian masyarakat yang menjadi landasan bagi ekonomi kota tidak hanya dipengaruhi oleh sector perhubungan, akan tetapi juga berbagai sector lainnya, terutama terkait dengan kebijakan pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, sector perhubungan tidak hanya diarahkan pada pemenuhan produktifitas ruang kota, akan tetap dibutuhkan keterpaduan dan terintegrasinya semua sector yang berkembang melalui koordinasi antar sector.

c. Infrastruktur

Penyesuaian dan pengembangan infrastruktur perhubungan yang dilakukan secara mandiri intansional, terlebih secara kolektif dan teintegrasi dengan dinas lainnya, termasuk hubungan dan keterkaitan dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya. Hal ini sangat beralasan karena beberapa aspek yang memiliki kewenangan yang berbeda dalam bidang transportasi sehingga dibutuhkan suatu keselarasan dan terintegrasi secara proporsional.

Infrastruktur pada sector perhubungan yang cakupannya yang sangat luas dibutuhkan suatu perencanaan dan penanganan secara berkesinambungan. Beberapa jenis infrastruktur transportasi yang masih membutuhkan pembangunan dan pengembangan seperti yang berkaitan dengan fasilitas pejalan kaki, parkir, perambuan, manajemen lalu lintas dan lain sebagainya.

d. Lingkungan Kota

Melalui pendekatan dengan pengembangan elemen perhubungan yang berwawasan lingkungan, termasuk penekanan adanya timbulan emisi yang



berpolutan. Hal ini sangat berkaitan dengan permasalahan kemacetan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan, penggunaan dan manajemen sistem angkutan perkotaan melalui pemilihan jenis kendaraan yang berwawasan lingkungan.

Permasalahan kemacetan disebabkan oleh tingginya penggunaan kendaraan pribadi yang tidak sebanding dengan kapasitas ruang jalan yang digunakan. Hal ini juga berkaitan dengan semakin rendahnya masyarakat menggunakan kendaraan angkutan umum yang mengakibatkan tingginya kepemilikan kendaraan. Kedua hal tersebut pada dasarnya berdampak pada aspek penurunan kualitas lingkungan akibat tingginya polusi udara dari hasil pembakaran yang tidak seimbang pada kendaraan bermotor.

Dalam rangka perlindungan dan peningkatan kualitas lingkungan kota, maka orientasi yang memerlukan penanganan adalah pengembangan sistem angkutan umum massal, termasuk pemilihan jenis kendaraan yang non fosil yaitu kendaraan yang menggunakan tenaga listrik (batteray). Pengembangan ini secara tidak langsung dapat mengurangi ketergantungan kendaraan pribadi yang pada gilirannya dapat mengurangi pembebanan ruas jalan. Sedangkan pada ruas jalan yang memiliki kerawanan kemacetan dapat dilengkapi dengan sistem manajemen lalu lintas yang proporsional, termasuk penempatan SDM Perhubungan pada waktu-waktu tertentu dalam pengaturan arus lalu lintas.

e. Pemerintahan

Dinas Perhubungan salah satu bagian organisasi pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan pada sector perhubungan. Permasalahan-permasalahan dan penanganan yang dibutuhkan dalam mengoptimalkan sector perhubungan, terdapat beberapa dinas lainnya yang juga memiliki kesamaan dan keterkaitan yakni dengan melakukan keterpaduan dan terintegrasi secara internal dan eksternal dalam pemerintahan Kota Samarinda untuk terhindarnya ketidak efektifan dan efisiensi program kegiatan.

3.2 Tinjauan RTRW Kota Samarinda

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda tahun 2023 – 2042 sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023 – 2042 merupakan dokumen perencanaan pembangunan wilayah dan menjadi instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. Sebagai arah kebijakan penataan ruang hingga tahun 2034, rumusan tujuan penataan ruang Kota Samarinda adalah :

“Tujuan Penataan Ruang untuk mewujudkan Kota Samarinda sebagai Kota Tepian dengan fokus pengembangan perdagangan dan jasa serta



industri berskala regional dengan peningkatan kualitas lingkungan yang nyaman dan berkelanjutan”

Berdasarkan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda tahun 2023-2042 tersebut memiliki karakteristik pelayanan masing-masing sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki. Dari 10 (sepuluh) wilayah kecamatan di Kota Samarinda, terdapat beberapa wilayah kecamatan yang memiliki perubahan atau mengalami peningkatan fungsi, yakni dari fungsi lokal menjadi fungsi regional dan nasional yang secara langsung berkaitan dengan sector perhubungan. Adapun hasil review terhadap RTRW Kota Samarinda tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kecamatan Samarinda Ulu merupakan wilayah yang menjadi daerah perlintasan utama kearah wilayah Bontang dan Tenggarong serta ke beberapa wilayah kecamatan lainnya di Kota Samarinda melalui jaringan jalan RE. Martidinata Jl. Gajah Mada. Sedangkan kearah Bontang melalui Jalan P. Antasari – Jl. Ir. Juanda – Jl. Letjen Suprpto atau pada jalan P. Antasari – Jl. A. Wahab Sahranie. Sedangkan lintasan ke arah Tenggarong adalah pada Jl. Antasari – Jl. P. Suryanata. Pada ruas jalan tersebut melintasi intensitas tata guna lahan yang tinggi dan sebagai jalur lintasan angkutan umum.
- b. Wilayah Kecamatan Palaran yang berada pada bagian selatan Kota Samarinda memiliki fungsi utama sebagai pusat pelayanan transportasi regional untuk pelabuhan nasional, pusat olahraga (stadion), transportasi penyeberangan, transportasi kereta api dan arah pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala kota. Adanya orientasi kegiatan yang akan dikembangkan di Kecamatan Palaran tersebut tentu saja akan mempengaruhi pembangunan dan ketersediaan infrastruktur, terutama jaringan jalan untuk menghubungkan semua pusat-pusat kegiatan tersebut.
- c. Wilayah kecamatan Samarinda Ulu yang diarahkan sebagai pusat pelayanan nasional dengan hanya ditunjang oleh lokasi terminal type B, sementara fungsi lainnya diarahkan pada wilayah kecamatan lainnya, seperti pemerintahan provinsi diarahkan pada Kecamatan Sabutan. Sedangkan kegiatan perdagangan, jasa dan pelayanan sosial lainnya dengan skala regional juga diarahkan pada beberapa wilayah kecamatan lainnya, sehingga peran Kecamatan Samarinda Ulu lebih pada kegiatan perumahan dan permukiman eksisting. Oleh karena itu, Kecamatan Samarinda Ulu dapat dijadikan sebagai landmark kawasan perkotaan Samarinda dengan fungsi sebagai pusat perkantoran Kota Samarinda dan atau kegiatan perkantoran swasta, termasuk pelayanan jasa perkotaan. Hal ini tentu saja didukung oleh sistem jaringan jalan eksisting dengan status sebagai jalan nasional dan kolektor.



- d. Kecamatan Samarinda Seberang dengan fungsi utama sebagai pusat pelayanan transportasi jalan skala regional. Hal ini dapat dilihat dari arah pengembangan terminal type A dan didukung dengan keberadaan jalan nasional dan provinsi. Wilayah ini relatif padat sehingga dalam pengembangannya dapat menimbulkan permasalahan transportasi dimasa mendatang yang disebabkan akumulasi pergerakan yang cukup tinggi karena merupakan daerah permukiman lama. Disamping itu, pergerakan AKAP yang berasal dari kota-kota pada provinsi Kalimantan Utara akan memasuki wilayah pusat kota dengan melalui beberapa daerah yang relatif padat, seperti Kecamatan Samarinda Kota dan Samarinda Ulu. Dengan posisi pada kedua wilayah kecamatan tersebut dapat menimbulkan permasalahan lalulintas disepanjang jalan yang akan dilalui oleh AKDP maupun AKAP yang secara bersama-sama dengan angkutan kota.
- e. Kecamatan Samarinda Utara dengan fungsi utama sebagai wilayah perencanaan pembangunan bandar udara utama dan merupakan lokasi pengembangan atau pemindahan bandar udara lama (bandara Temindung). Disamping itu, wilayah ini juga diarahkan sebagai titik pertemuan lintasan kereta api yang tentu saja akan dibangun stasiun. Sementara, pada transportasi jalan akan disediakan terminal type C. Ketiga lokasi prasarana ini relatif dekat sehingga potensial dikembangkan sebagai pusat pelayanan multimoda dan pelayanan terminal potensial melayani AKAP dan AKDP.

3.3 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Samarinda

Bertitik tolak dari visi dan misi pembangunan Pemerintah Kota Samarinda, dimana pembangunan urusan perhubungan memiliki keterkaitan 5 aspek dalam misi pembangunan tersebut, yakni aspek SDM, infrastruktur, ekonomi kota, lingkungan kota dan pemerintahan. Terwujudnya misi pembangunan tersebut, sector perhubungan memiliki peranan yang penting dan bahkan juga dapat menjadi sector yang dapat mempengaruhi secara negatif misi pembangunan tersebut jika sector perhubungan tidak diarahkan dan dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu perencanaan strategis yang dapat dilakukan untuk mendukung dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan Kota Samarinda.

Visi Pembangunan Kota Samarinda yang mengusung “Samarinda Maju, Kaltim Maju” memiliki syarat makna terhadap sector perhubungan yang juga senantiasa akan bergerak maju. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Samarinda tersebut, maka diperlukan suatu harapan secara sektoral dalam melaksanakan visi dan misi pembangunan Kota Samarinda, maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di Bidang Perhubungan yang terarah dan fokus kepada hasil yang akan dicapai disusunlah Visi Dinas Perhubungan Kota Samarinda, yaitu (<https://dishubsamarinda.com/visi-misi/>, 15 Maret 2025):



Visi:

Menjadi lembaga perhubungan yang unggul, inovatif, dan berwawasan lingkungan dalam mendukung terciptanya sistem transportasi yang efisien, aman, dan terintegrasi di Kota Samarinda.

Misi:

1. Meningkatkan Kualitas Layanan Transportasi:

Dishub Samarinda berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan transportasi, baik itu transportasi publik, angkutan barang, maupun transportasi pribadi, guna mendukung mobilitas warga dan memperlancar kegiatan ekonomi di Kota Samarinda.

2. Menyusun dan Menerapkan Kebijakan Transportasi Berkelanjutan:

Kami akan terus mengembangkan dan melaksanakan kebijakan transportasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, dengan memprioritaskan penggunaan teknologi ramah lingkungan seperti kendaraan listrik dan transportasi berbasis aplikasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pencemaran udara di kota.

3. Meningkatkan Infrastruktur dan Fasilitas Transportasi:

Memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur transportasi, seperti terminal, jalan raya, jalur sepeda, serta fasilitas pendukung lainnya. Pembangunan dan pemeliharaan yang berkualitas akan memastikan kenyamanan dan keselamatan masyarakat dalam menggunakan sarana transportasi yang ada.

4. Mengoptimalkan Sistem Transportasi Terintegrasi:

Dishub Samarinda berupaya untuk menciptakan sistem transportasi yang terintegrasi antar moda transportasi, seperti bus kota, angkutan online, dan transportasi pribadi, untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan perpindahan antar moda. Hal ini akan mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi waktu perjalanan.

5. Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas:

Kami berkomitmen untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di Samarinda melalui pengawasan yang ketat, penerapan rambu lalu lintas yang jelas dan memadai, serta edukasi keselamatan bagi pengguna jalan, baik pengendara kendaraan pribadi maupun pengemudi angkutan umum.

6. Mendorong Penggunaan Teknologi dalam Pengelolaan Transportasi:

Dishub Samarinda akan terus menerapkan teknologi terkini untuk pengelolaan dan pemantauan transportasi. Ini mencakup penggunaan aplikasi untuk pemantauan lalu lintas, sistem parkir pintar, serta



pengelolaan angkutan umum berbasis digital untuk memudahkan akses masyarakat terhadap informasi transportasi.

7. **Membangun Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan:**
Dishub Samarinda berusaha untuk menjalin kerja sama yang lebih erat dengan pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, serta lembaga-lembaga terkait guna menciptakan kebijakan dan solusi transportasi yang lebih efektif dan berdampak positif bagi semua pihak.
8. **Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Berperilaku Tertib Lalu Lintas:**
Edukasi mengenai keselamatan berkendara dan kedisiplinan dalam berlalu lintas akan terus dilakukan untuk membangun budaya tertib lalu lintas yang lebih baik di masyarakat. Kami percaya bahwa kepedulian masyarakat terhadap keselamatan jalan dapat mengurangi risiko kecelakaan dan menciptakan kota yang lebih aman untuk semua.
9. **Menyesuaikan Sistem Transportasi dengan Pertumbuhan Penduduk dan Pembangunan Kota:**

Seiring dengan berkembangnya Kota Samarinda, Dishub Samarinda akan menyesuaikan perencanaan dan pengelolaan transportasi dengan kebutuhan mobilitas yang semakin kompleks. Kami akan memastikan bahwa infrastruktur dan sistem transportasi yang ada dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat.

Visi dan misi Dishub Samarinda mengarah pada terciptanya sistem transportasi yang aman, efisien, dan berkelanjutan untuk mendukung mobilitas masyarakat dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial kota. Dengan langkah-langkah nyata dalam pengelolaan transportasi yang berbasis teknologi, peningkatan infrastruktur, dan kebijakan transportasi yang ramah lingkungan, Dinas Perhubungan Kota Samarinda bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi seluruh masyarakat Samarinda, menuju kota yang lebih maju dan nyaman dihuni.

3.4 Strategi dan Arah Kebijakan Perhubungan Kota Samarinda

Dinas Perhubungan Kota Samarinda sebagai salah satu Dinas yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perhubungan di wilayah Kota Samarinda mempunyai tugas dan fungsi sangat strategis. Salah satu tugas yang diemban oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang sangat strategis yaitu pelayanan di bidang transportasi, diantaranya adalah masalah penanggulangan kemacetan yang dirasakan cukup signifikan di beberapa ruas jalan terutama pada jam-jam sibuk baik pada hari kerja maupun pada saat hari libur (khususnya pada saat *long week end*). Penanganan



kemacetan di Kota Samarinda cukup memberikan dampak pada pencapaian Walikota Kota Samarinda termasuk diantaranya Samarinda bebas Macet.

Pada kondisi saat ini disadari bahwa isu strategis yang ada saat ini adalah Kualitas pelayanan bidang Perhubungan yang memenuhi standar Minimal Pelayanan masih dibutuhkan perencanaan dan penanganan secara berkelanjutan. Dalam upaya meningkatkan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Samarinda khususnya di bidang transportasi melahirkan suatu tantangan dan juga peluang tersendiri. Tantangan ini menjadi peluang tersendiri bagi Pemerintah Kota Samarinda khususnya Dinas Perhubungan untuk mengoperasikan angkutan umum massal yang mana hal ini diharapkan bisa menekan penggunaan kendaraan pribadi untuk kembali beralih menggunakan sarana transportasi umum.

Berdasarkan hal tersebut, Beberapa isu strategis pembangunan dan pengembangan sektor Perhubungan yang terangkat berdasarkan kondisi faktual di lapangan, inventarisasi permasalahan permasalahan kunci, evaluasi capaian kinerja dalam jangka waktu 5 tahun terakhir dan memperhatikan Rencana Pembangunan Kota Samarinda 2025-2029, maka langkah-langkah strategis pembangunan dan pengembangan sektor Perhubungan untuk 5 tahun kedepan adalah :

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi.
Dalam upaya mengurangi/menurunkan tingkat kecelakaan dari sektor transportasi, pemerintah terus berupaya secara bertahap membenahi sistem keselamatan dan keamanan transportasi menuju kondisi *Zero To Accident*. Upaya yang dilakukan pemerintah tidak saja bertumpu kepada penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan namun peningkatan kualitas SDM transportasi, pembenahan regulasi di bidang keselamatan/keamanan maupun sosialisasi kepada para pemangku kepentingan.
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah.
Kebutuhan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi yang perlu mendapatkan perhatian adalah aksesibilitas di kawasan yang belum sepenuhnya berkembang, termasuk pada daerah perbatasan antar kabupaten/kota. Selain itu, pemanfaatan sungai sebagai media transportasi sungai dapat dikembangkan sebagai istem angkutan alternatif bagi masyarakat untuk tidak berorientasi pada pemanfaatan angkutan jalan.
3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi
Pemerintah secara bertahap dengan dana yang terbatas melakukan rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur, sedangkan belum seluruh masyarakat pengguna jasa



memiliki daya beli yang memadai. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan, perlu diupayakan peningkatan kinerja pelayanan jasa transportasi menuju kepada kondisi yang dapat memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat, melalui rehabilitasi dan perawatan sarana dan prasarana transportasi.

4. Mengembangkan system layanan transportasi untuk mendukung lingkungan kota yang berkelanjutan

Pemicu terbesar meningkatnya polusi udara di daerah perkotaan adalah disebabkan oleh sector transportasi. Oleh karena itu, penekanan polusi udara dapat dilakukan dengan pendekatan peningkatan layanan angkutan umum, terutama angkutan umum massal dan orientasi penggunaan bahan bakar listrik yang sudah dikembangkan sebagai pilihan penggunaan sarana angkutan. Disamping itu, keberadaan ruang terbuka hijau, terutama pada daerah-daerah yang dilintasi oleh kendaraan bermotor dikembangkan yang sekaligus memberikan kesan estetika ruang kota yang lebih baik.

5. Melaksanakan kegiatan kajian dan penelitian pengembangan bidang perhubungan

Dalam rangka perencanaan dan pembangunan serta pengembangan pada sector perhubungan sangat diperlukan adanya kajian awal sebagai gambaran tujuan. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan melakukan pelibatan stakeholder, baik bersifat konsultatif, pelibatan Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta, ataupun dilakukan secara swakelola. Hal ini dimaksudkan untuk tersedianya dokumentasi perencanaan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan program aksi kegiatan, termasuk orientasi pembuatan peraturan-peraturan daerah terkait dengan sector perhubungan.

6. Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi di bidang peraturan, kebijakan dan standar.

Posisi Kementerian Perhubungan sebagai regulator dan melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perhubungan kepada daerah dalam bentuk dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Reformasi di bidang regulasi (*regulatory reform*) diarahkan kepada penghilangan restriksi yang memungkinkan swasta berperan secara penuh dalam penyelenggaraan jasa transportasi. Begitupula dengan kedudukan Dinas Perhubungan Kota dalam memadukan dan mengintegrasikan semua komponen aspek transportasi yang bukan dalam kewenangannya melalui pelibatan secara koordinatif antara pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Penegakan hukum dilakukan secara konsisten dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa transportasi. Restrukturisasi dan reformasi di bidang SDM diarahkan kepada pembentukan kompetensi dan profesionalisme insan



perhubungan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki wawasan global dengan tetap mempertahankan jati dirinya sebagai manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Isu strategis tersebut dijabarkan kedalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan dan pengembangan sektor Perhubungan.

Selain hal tersebut diatas dan dengan melihat isu strategis menurut aspek kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman jangka menengah Dinas Perhubungan Kota Samarinda serta mempertimbangkan faktor kebijakan global, nasional dan regional pada sector perhubungan adalah dasar pemikiran dalam perumusan kebijakan perhubungan tersebut. Kegiatan ini tentu saja akan dilakukan oleh perangkat daerah, dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Kota Samarinda, baik yang bersifat koordinatif maupun pelaksanaan kegiatan secara langsung yang dilakukannya.

Suatu wilayah akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan di masa datang sejalan dengan era perkembangan ekonomi dan demografis. Tuntutan pembangunan dan demokratisasi di segala sektor kehidupan serta tuntutan efisiensi pemberdayaan sumber daya alam. Oleh sebab itu, strategi yang diterapkan harus disesuaikan dengan potensi dan kondisi serta permasalahan di bidang perhubungan yang ada di Kota Samarinda.

Strategi yang diambil harus mampu menjawab segala permasalahan perhubungan, sehingga hasil pembangunan dan pengembangan jaringan pelayanan dan prasarana transportasi berkualitas dan berkesinambungan dalam mewujudkan Samarinda Maju, Kaltim Maju. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan penyusunan Rencana Strategi Perhubungan yang menjadi pedoman dan indicator atas pelaksanaan program-program kegiatan di Dinas Perhubungan untuk 5 tahun kedepan khususnya dan untuk jangka Panjang pada umumnya yang terus berkesinambungan.

Perwujudan misi Pembangunan Daerah Kota Samarinda yang paling urgen dari 5 misi tersebut adalah pada misi ke-2, yakni terkait dengan Infrastruktur, yakni mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan. Sector perhubungan dengan unsur utama adalah infrastruktur transportasi yang terdiri atas jaringan prasarana dan jaringan pelayanan transportasi melalui Peningkatan pelayanan perhubungan sebagai fungsi utama. Fungsi utama tersebut menjadi rumusan untuk capaian tujuan pembangunan daerah sebagai visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Kota Samarinda 2025-2029 sebagaimana diperlihatkan dalam tabel berikut.



Tabel 3.1. Perumusan Sektor Perhubungan Dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Daerah

NO	Core business (Fungsi utama) Perangkat Daerah.	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	VISI	MISI	PROGRAM AKSI	TUJUAN (Tujuan OPD adalah sasaran Kepala Daerah)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Peningkatan pelayanan perhubungan	Belum maksimalnya pelayanan perhubungan	Kualitas pelayanan bidang Perhubungan yang memenuhi standar Minimal Pelayanan	Samarinda Maju, Untuk Kaltim Maju	Mewujudkan infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Peningkatan dan pemerataan Infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, fasilitas umum, pusat layanan umum, dan transportasi untuk mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.	Terwujudnya Infrastruktur yang Berkualitas



Dalam rangka peningkatan pelayanan perhubungan akibat belum maksimalnya pelayanan perhubungan, maka program aksi OPD yang akan ditempuh adalah melalui peningkatan dan pemerataan Infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, fasilitas umum, pusat layanan umum, dan transportasi untuk mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu dibutuhkan suatu langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan tersebut.

Secara garis besar, Rencana Strategi Dinas Perhubungan Kota Samarinda harus mampu mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda. Hal ini kemudian akan menghasilkan rumusan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh dalam perwujudan tersebut sebagaimana dalam table berikut.



Tabel 3.2. Keterkaitan Kinerja RPJMD - Renstra Dinas

VISI : SAMARINDA MAJU UNTUK KALTIM MAJU			
MISI 3 : MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>
Terwujudnya Infrastruktur yang berkualitas	Meningkatkan kualitas keselamatan dan kualitas layanan transportasi	Mewujudkan ketersediaan sarana prasarana sistem transportasi darat dan sungai	Penyediaan infrastruktur transportasi dan fasilitas perlengkapan jalan
			Penyediaan infrastruktur transportasi sungai
			Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik



Berdasarkan penyesuaian kinerja RPJMD - Renstra Dinas Perhubungan Kota Samarinda, diperoleh 3 pokok utama kebijakan yang akan dilaksanakan. Kebijakan-kebijakan tersebut akan melahirkan beberapa program kegiatan yang menjadi parameter pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam mewujudkan visi-misi pembangunan Kota Samarinda dalam horizon waktu 5 tahun kedepan dan dapat dilanjutkan untuk jangka panjang yang disesuaikan dengan dinamika di sector perhubungan. Dinamika perhubungan senantiasa akan mengalami perubahan seiring dengan semakin berkembangnya teknologi, perkembangan jumlah penduduk, kemajuan kegiatan ekonomi, dan factor-faktor lainnya seperti aspek politik, penyesuaian secara global dan lain sebagainya.

Untuk lebih terarahnya pelaksanaan kebijakan tersebut, maka perlu diperjelas lagi hubungan eksternal dan internal OPD Dinas Perhubungan. Secara eksternal, maka pencapaian dan penyesuaian akan dilakukan antar OPD dalam lingkup Pemerintah Kota Samarinda, sedangkan secara internal dilakukan antar bidang dalam kelembagaan OPD Dinas Perhubungan. Dalam pencapaian kebijakan tersebut dalam horizon waktu 5 tahun kedepan, ditetapkan teknik murumuskan tujuan dan sasaran dalam bentuk rencana target kinerja secara terukur sebagai upayah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah menjadi *roadmap* OPD Dinas Perhubungan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahunan. Adapun teknik murumuskan tujuan dan sasaran dalam bentuk rencana target kinerja pencapaian arahan kebijakan eksternal dan internal OPD Dinas Perhubungan Kota Samarinda tersebut, lebih jelasnya dapat dilihat dalam table berikut.



Tabel 3.3. Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan Kota Samarinda											
Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas	Terwujudnya Infrastruktur Yang berkualitas		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) (Indeks)	-	76,24	78	80	82	84	86	
		Meningkatnya Kualitas Keselamatan dan Kualitas Layanan Transportasi	Rasio Konektivitas (Nilai)	92,22	57,67	42,97	53,74	68,79	79,56	100	



Tabel 3.4. Perwujudan Kebijakan Lintas OPD (Eksternal)

Sasaran Daerah	SASARAN STRATEGIS RENSTRA PD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI	STAKEHOLDER	BIDANG	FASILITASI LINTAS STAKEHOLDER
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Keselamatan dan Kualitas Layanan Transportasi	Mewujudkan ketersediaan sarana prasarana sistem transportasi darat dan sungai	1 Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan	Disperindagkop Kaltim, Bapperida, BPKAD, Inspektorat Serta OPD Terkait	Sekertariat	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen
					Penyediaan Gaji, Tunjangan serta pelaporan keuangan	Bapperida, BPKAD, Inspektorat		Penyediaan Anggaran dan Pelaporan
					Pelaporan Retribusi Daerah	Bapperida, Bapenda, BPKAD, Inspektorat		Pelaporan Retribusi Daerah Bidang perhubungan
					Penyediaan Jasa pelayanan umum	Bapperida, BPKAD, Inspektorat		Penyediaan Anggaran dan Evaluasi Pelaksanaan
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Bapperida, BPKAD, Inspektorat		Penyediaan Anggaran dan Evaluasi Pelaksanaan
			2 Penyediaan infrastruktur transportasi dan fasilitas perlengkapan jalan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan jalan	PUPR Kota , Dinas Perhubungan provinsi , diskominfo	Bidang Sarana Prasarana	Koordinatif dan Sosialisasi Rencana Aksi Program
					Penyediaan Angkutan Umum Massal	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan provinsi, PUPR Kota Samarinda Bapenda Kota Samarinda, Bappeda provinsi , Bapperida	Bidang Angkutan Bidang Lalu Lintas Bidang Sarana Prasarana	
					Pengujian Kendaraan Bermotor	Kementerian Perhubungan, Balai Transportasi darat Kelas II Kalimantan Timur Kementerian Perhubungan, Dinas	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	



Sasaran Daerah	SASARAN STRATEGIS RENSTRA PD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI	STAKEHOLDER	BIDANG	FASILITASI LINTAS STAKEHOLDER
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
						Perhubungan Provinsi Kalimantan timur,		
			3 Penyediaan infrastruktur transportasi dan fasilitas Pelabuhan Dermaga Sungai dan Danau	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Penyediaan Sarana dan Prasarana Sungai Pelabuhan dan Dermaga	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan provinsi, PUPR Kota Samarinda Bapenda Kota Samarinda, Bapedda provinsi , Bapperida	Bidang Angkutan Bidang Sarana Prasarana	
					Pengoperasian dan Pengawasan Angkutan Umum Sungai Pelabuhan dan Dermaga	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan provinsi,KSOP Kelas I Samarinda, POLAIRUD	Bidang Angkutan Bidang Keselamatan	



Tabel 3.5. Perwujudan Kebijakan Lintas Antar Bidang OPD (Internal)

Sasaran Daerah	SASARAN STRATEGIS RENSTRA PD	INDIKATOR	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI	BIDANG	FASILITASI LINTAS STAKEHOLDER
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Keselamatan dan Kualitas Layanan Transportasi	Ratio Konektivitas Kota	Mewujudkan ketersediaan sarana prasarana sistem transportasi darat dan sungai	1 Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan	Sekertariat	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen
						Penyediaan Gaji, Tunjangan serta pelaporan keuangan		Penyediaan Anggaran dan Pelaporan
						Pelaporan Retribusi Daerah		Pelaporan Retribusi Daerah Bidang perhubungan
						Penyediaan Jasa pelayanan umum		Penyediaan Anggaran dan Evaluasi Pelaksanaan
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah		Penyediaan Anggaran dan Evaluasi Pelaksanaan
				2 Penyediaan infrastruktur transportasi dan fasilitas perlengkapan jalan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan jalan	Bidang Sarana Prasarana	Koordinatif dan Penguatan
						Penyediaan Angkutan Umum Massal	Bidang Angkutan Bidang Lalu Lintas Bidang Sarana Prasarana	
						Pengujian Kendaraan Bermotor	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	
				3 Penyediaan infrastruktur transportasi dan fasilitas Pelabuhan Dermaga Sungai	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Penyediaan Sarana dan Prasarana Sungai Perlabuhan dan Dermaga	Bidang Angkutan Bidang Sarana Prasarana	



Pemerintah Kota Samarinda
Dinas Perhubungan Kota Samarinda



Sasaran Daerah	SASARAN STRATEGIS RENSTRA PD	INDIKATOR	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI	BIDANG	FASILITASI LINTAS STAKEHOLDER
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
				dan Danau				
						Pengoperasian dan Pengawasan Angkutan Umum Sungai Pelabuhan dan Dermaga	Bidang Angkutan Bidang Keselamatan	



3.5 Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Samarinda

Untuk merumuskan tujuan penyelenggaraan perhubungan di Kota Samarinda, maka dilakukan penyelarasan misi pembangunan daerah Kota Samarinda dan misi penyelenggaraan Dinas Perhubungan Kota Samarinda sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3.6. Kesesuaian Misi Pembangunan dan Misi Perhubungan Sebagai Dasar Tujuan Renstra Perhubungan

No	Misi Pembangunan Kota Samarinda	Misi Dinas Perhubungan	Keterangan
(01)	(02)	(03)	(04)
1	Sumber Daya Manusia	➤ Mendorong Penggunaan Teknologi dalam Pengelolaan Transportasi	Kemajuan teknologi di bidang transportasi mengalami perkembangan pesat dan dibutuhkan kesiapan SDM yang memiliki kemampuan untuk menguasai dan mengoperasikannya
2	Ekonomi Kota	➤ Menyesuaikan Sistem Transportasi dengan Pertumbuhan Penduduk dan Pembangunan Kota	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Factor kependudukan menjadi salah satu indicator kemajuan ekonomi suatu kota dan kependudukan tersebut mempengaruhi system transportasi yang ada di suatu kota ➤ Suatu kota akan berkembang dalam pembangunanya yang mengindikasikan tingkat perekonomian suatu kota. Salah satu indikator kemajuan suatu kota adalah bergantung pada infrastrukturnya
3	Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan Kualitas Layanan Transportasi ➤ Meningkatkan Infrastruktur dan Fasilitas Transportasi ➤ Mengoptimalkan Sistem Transportasi Terintegrasi ➤ Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Salah satu bagian dari infrastruktur yang memiliki peranan penting suatu kota adalah infrastruktur transportasi. ➤ Kemajuan penyediaan dan penyelenggaraan infrastruktur transportasi sangat dipengaruhi oleh kualitas, kuantitas, jangkauan, kapasitas, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan transportasi
4	Lingkungan Kota	➤ Menyusun dan Menerapkan Kebijakan Transportasi Berkelanjutan	➤ Tingkat kualitas lingkungan suatu kota bergantung pada tingkat polusi yang ditimbulkannya, terutama



No	Misi Pembangunan Kota Samarinda	Misi Dinas Perhubungan	Keterangan
(01)	(02)	(03)	(04)
		<ul style="list-style-type: none">➤ Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Berperilaku Tertib Lalu Lintas	<ul style="list-style-type: none">polusi udara oleh aktivitas transportasi➤ Kondisi lingkungan kota terhadap transportasi bergantung pada kebijakan dan tingkat kesadaran masyarakat memanfaatkan aspek transportasi,
5	Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none">➤ Membangun Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan	<ul style="list-style-type: none">➤ Dinas Perhubungan salah satu unsur pemerintahan daerah yang memiliki ketarkaitan dengan dinas atau sector lainnya.➤ Hubungan fungsional suatu dinas dilakukan secara hubungan horizontal maupun secara vertical.

Berdasarkan penyesuaian misi pembangunan daerah Kota Samarinda dengan misi Dinas Perhubungan Kota Samarinda serta tujuan RTRW Kota Samarinda, maka sesuai dengan fungsi utama perangkat daerah dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Kota Samarinda adalah **Peningkatan Pelayanan Perhubungan** dalam wilayah Kota Samarinda. Fungsi utama tersebut dibutuhkan adanya program aksi melalui peningkatan dan pemerataan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, fasilitas umum, pusat layanan umum, dan transportasi untuk mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis:

Merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan darat, keselamatan, sarana dan prasarana, perparkiran, angkutan sungai dan danau, transportasi kereta api, transportasi udara dan lain sebagainya.

b. Penyusunan rencana kerja:

Menyusun rencana kerja Dinas Perhubungan, termasuk rencana program dan anggaran.

c. Pelayanan, pembinaan, dan pengendalian:

Melaksanakan pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

d. Evaluasi dan pelaporan:



Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

e. Koordinasi:

Menyelenggarakan koordinasi dengan berbagai pihak terkait di bidang perhubungan, termasuk unit pelaksana teknis dinas.

f. Pengelolaan urusan administrasi:

Mengelola urusan administrasi keuangan, koordinasi penyusunan program, pengolahan data dan informasi di bidang perhubungan.

g. Bimbingan dan fasilitasi:

Memberikan bimbingan di bidang perhubungan dan fasilitasi pembiayaan.

h. Pelaksanaan tugas lain:

Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Dalam pelaksanaan fungsi utama Dinas Perhubungan ini yang berkaitan secara langsung dengan aspek infrastruktur, dibutuhkan program aksi melalui peningkatan dan pemerataan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, fasilitas umum, pusat layanan umum, dan transportasi untuk mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi. Dengan demikian, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun mendatang (tahun 2025-2029) yang didasarkan pada visi dan misi pembangunan daerah dan sektoral serta keterkaitannya dengan kebijakan-kebijakan secara eksternal dalam tataran wilayah provinsi dan nasional, adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di sector perhubungan Kota Samarinda.

Berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Samarinda untuk Jangka Menengah, maka perlu diketahui hasil yang diharapkan dengan terlaksananya tujuan dan sasaran tersebut. Hasil yang diperoleh haruslah terukur untuk memudahkan mengetahui tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu tertentu dalam bentuk Rencana Tindak Pengendalian (RTP) sebagaimana pada table berikut.



Tabel 3.7. Tujuan, Sasaran, Program dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Perhubungan Jangka Menengah

TUJUAN (Tujuan OPD adalah sasaran Kepala Daerah)	SASARAN (OPD)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR SASARAN (IKU Ka. OPD)	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target 2025	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	JABATAN PENANGGUNG JAWAB	TARGET	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	Target 2025	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi	
(9)	(14)	(27)	(28)	(15)	(30)						(31)	(33)	(34)	(48)	(49)			
					Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah 2. Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	1. 82 2. 87,48	Perencanaan , penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai SOP	SEKERTARIS	100		Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan waktu perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100,00	Subbag Perencanaan program	Samarinda	
													Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	12	Subbag Perencanaan program	Samarinda
													Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	2	Subbag Perencanaan program	Samarinda
													Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	28	Subbag Perencanaan program	Samarinda
													Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara Hasil Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah pada Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	2		
								Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan sesuai SOP			100		Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100		
													Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	149	Subbag umum & kepegawaian	Samarinda
													Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	Subbag umum & kepegawaian	Samarinda



TUJUAN (Tujuan OPD adalah sasaran Kepala Daerah)	SASARAN (OPD)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR SASARAN (IKU Ka. OPD)	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target 2025	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	JABATAN PENANGGUNG JAWAB	TARGET	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	Target 2025	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
(9)	(14)	(27)	(28)	(15)	(30)							(31)	(33)	(34)	(48)	(49)	
												Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	4	Subbag Keuangan	Samarinda
								Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Laju Peningkatan Pendapatan Perangkat Daerah		85		Meningkatnya Pendapatan Daerah sesuai kewenangan Perangkat Daerah	%	85		
												Analisa dan pengembangan retribusi daerah serta penyusunan kebijakan retribusi daerah	Jumlah dokumen hasil analisis serta pengembangan retribusi daerah dan kebijakan retribusi daerah	Dokumen	4	Subbag Keuangan	Samarinda
												Pelaporan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	Dokumen	4	Subbag Keuangan	Samarinda
								Administrasi umum perangkat daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapatkan Pelayanan Kepegawaian		100		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100		
												Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	5 Jenis	Subbag umum & kepegawaian	Samarinda
												Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	5 Jenis	Subbag umum & kepegawaian	Samarinda
												Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	50 Buah	Subbag umum & kepegawaian	Samarinda
												Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	5 Jenis	Subbag umum & kepegawaian	Samarinda
												Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4 Dokumen	Subbag umum & kepegawaian	Samarinda



TUJUAN (Tujuan OPD adalah sasaran Kepala Daerah)	SASARAN (OPD)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR SASARAN (IKU Ka. OPD)	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target 2025	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	JABATAN PENANGGUNG JAWAB	TARGET	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	Target 2025	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
(9)	(14)	(27)	(28)	(15)	(30)							(31)	(33)	(34)	(48)	(49)	
												Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	Subbag umum & kepegawaian	Samarinda
												Peyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	24 SPPD	Subbag umum & kepegawaian	Samarinda
												Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Dokumen	4	Subbag umum & kepegawaian	Samarinda
													Meningkatnya Pemenuhan Barang Milik Daerah yang menunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100		
												Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	-	Subbag umum & kepegawaian	Samarinda
												Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	-	Subbag umum & kepegawaian	Samarinda
								Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang		100	Pengadaan alat angkutan darat tak bermotor	Jumlah unit alat angkutan darat tak bermotor yang disediakan	Unit	-	Subbag umum & kepegawaian	Samarinda
												Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit	-	Subbag umum & kepegawaian	Samarinda
												Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	-	Subbag umum & kepegawaian	Samarinda
												Pengadaan aset tak berwujud	Jumlah yang aset tak berwujud yang disediakan	Unit	-	Subbag umum & kepegawaian	Samarinda



TUJUAN (Tujuan OPD adalah sasaran Kepala Daerah)	SASARAN (OPD)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR SASARAN (IKU Ka. OPD)	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target 2025	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	JABATAN PENANGGUNG JAWAB	TARGET	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	Target 2025	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
(9)	(14)	(27)	(28)	(15)	(30)							(31)	(33)	(34)	(48)	(49)	
												Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	-	Subbag umum & kepegawaian	Samarinda
												Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	-	Subbag umum & kepegawaian	Samarinda
													Meningkatnya Kualitas Layanan Penyediaan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	%	100		
						Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Jasa Penunjang yang terpenuhi sesuai SOP		100	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	11112 Bukti pembayaran	Subbag umum & kepegawaian	Samarinda
												Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	-	Subbag umum & kepegawaian	Samarinda
												Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	10 Bukti pembayaran	Subbag umum & kepegawaian	Samarinda
													Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah yang menunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100		
						Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik		100	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	-	Subbag umum & kepegawaian	Samarinda
												Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	50 Unit	Subbag umum & kepegawaian	Samarinda



TUJUAN (Tujuan OPD adalah sasaran Kepala Daerah)	SASARAN (OPD)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR SASARAN (IKU Ka. OPD)	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target 2025	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	JABATAN PENANGGUNG JAWAB	TARGET	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	Target 2025	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi		
(9)	(14)	(27)	(28)	(15)	(30)							(31)	(33)	(34)	(48)	(49)			
												Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	-	Subbag umum & kepegawaian	Samarinda		
												Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit	5 Gedung	Subbag umum & kepegawaian	Samarinda		
												Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit	20 Jenis	Subbag umum & kepegawaian	Samarinda		
Meningkatnya Layanan Infrastruktur	Meningkatkan Kualitas Keselamatan dan Kualitas Layanan Transportasi	Mewujudkan ketersediaan sarana prasarana sistem transportasi darat dan sungai	Penyediaan infrastruktur transportasi dan fasilitas perlengkapan jalan	Ratio Konektivitas Kota	Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Persentase Kelengkapan Jalan yang terpasang Terhadap Kondisi Ideal	40%	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Jumlah perlengkapan jalan tersedia	KABID PRASARANA	9 Jenis	Pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten/kota	Jumlah prasarana jalan di jalan kabupaten / kota yang terbangun	Unit	1 Jenis	Seksi Prasarana jalan			
														Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Jumlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten / kota yang tersedia	Unit	7 Jenis	Seksi Prasarana jalan	
														Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	Jumlah prasarana jalan yang terhabilitasi dan terpelihara	Unit	1 Jenis	Seksi Prasarana jalan	
														Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang terhabilitasi dan terpelihara	Unit	7 Jenis	Seksi Prasarana jalan	
								Pengelolaan terminal penumpang tipe C	Jumlah terminal tipe C terkelola					Pembangunan terminal penumpang Tipe C yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang	Jumlah Terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang	Unit	1 Lokasi (Terminal pasar pagi)	Seksi Prasarana jalan	
														Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal tipe C (fasilitas utama dan penunjang)	Jumlah terminal tipe C (fasilitas utama dan penunjang) yang terhabilitasi dan terpelihara	Unit	1 Lokasi (Terminal pasar pagi)	Seksi Prasarana jalan	



TUJUAN (Tujuan OPD adalah sasaran Kepala Daerah)	SASARAN (OPD)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR SASARAN (IKU Ka. OPD)	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target 2025	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	JABATAN PENANGGUNG JAWAB	TARGET	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	Target 2025	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
(9)	(14)	(27)	(28)	(15)	(30)							(31)	(33)	(34)	(48)	(49)	
								Pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor yang di uji dan layak uji				Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Unit	24 Alat uji	Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Samarinda
													Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor	Orang	15 Sertifikasi	Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Samarinda
													Registrasi kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor	Unit	45.000	Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Samarinda
													Penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	Dokumen	19.500 smart card	Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Samarinda
						Persentase kendaraan layak uji	54%			KABID KESELAMATAN Kepala UPT. PKB	18.000 Unit		Sosialisasi standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor	Laporan	50 Kegiatan	Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Samarinda
													Identifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan bermotor wajib uji	Laporan	48 Uji Lokasi	Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Samarinda
													Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Unit	10.000 meter persegi	Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Samarinda
													Koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	Laporan	5 Rapat Teknis	Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Samarinda



TUJUAN (Tujuan OPD adalah sasaran Kepala Daerah)	SASARAN (OPD)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR SASARAN (IKU Ka. OPD)	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target 2025	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	JABATAN PENANGGUNG JAWAB	TARGET	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	Target 2025	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
(9)	(14)	(27)	(28)	(15)	(30)							(31)	(33)	(34)	(48)	(49)	
												Penetapan tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah laporan penetapan tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor	Laporan	3 Dokumen	Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Samarinda
												Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	Laporan	5 Dokumen	Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Samarinda
								Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	Jumlah laporan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ		4 Laporan	Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan terminal	Jumlah laporan inpeksi ,audit dan pemantauan terminal	Laporan	4	Seksi keselamatan jalan	Samarinda
												Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/kota	Jumlah laporan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/kota	Laporan	12	Seksi keselamatan jalan	Samarinda
												Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum	Jumlah laporan inspeksi, audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum	Laporan	4	Seksi keselamatan jalan	Samarinda
												Peningkatan kapasitas auditor dan inspektor lalu lintas dan angkutan jalan	Jumlah auditor dan inspektor lalu lintas dan angkutan jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	8	Seksi keselamatan jalan	Samarinda
												Pelaksanaan pengawasan melalui uji petik terhadap unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan	Jumlah laporan uji petik terhadap unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor	Laporan	4	Seksi keselamatan jalan	Samarinda



TUJUAN (Tujuan OPD adalah sasaran Kepala Daerah)	SASARAN (OPD)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR SASARAN (IKU Ka. OPD)	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target 2025	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	JABATAN PENANGGUNG JAWAB	TARGET	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	Target 2025	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
(9)	(14)	(27)	(28)	(15)	(30)								(31)	(33)	(34)	(48)	(49)
												bermotor					
								Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	Jumlah laporan Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir		100 Titik	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas parkir kewenangan kabupaten / kota	Laporan	100 Titik	Seksi Perparkiran	Samarinda
								Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas		1 Dokumen	Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten / kota	Laporan	4 Dokumen	Seksi Lalu lintas	Samarinda
												Sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Jumlah Laporan Sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Dokumen	12 Kali	Seksi Daltib	Samarinda
												Forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Laporan	10 Kali & 1 Penghargaan	Seksi Lalu lintas	Samarinda
												Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Laporan	4 Laporan	Seksi Lalu lintas	Samarinda
								Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan persetujuan hasil Andalalin			1 Dokumen	Pengawasan pelaksanaan rekomendasi rekomendasi persetujuan teknis Andalalin	Jumlah laporan rekomendasi persetujuan teknis Andalalin yang terawasi	Laporan	4 Laporan	Seksi Lalu lintas
					Konektivitas Darat					KABID LALU LINTAS							



TUJUAN (Tujuan OPD adalah sasaran Kepala Daerah)	SASARAN (OPD)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR SASARAN (IKU Ka. OPD)	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target 2025	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	JABATAN PENANGGUNG JAWAB	TARGET	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	Target 2025	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi	
(9)	(14)	(27)	(28)	(15)	(30)								(31)	(33)	(34)	(48)	(49)	
								Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan angkutan barang yang tersedia		1 Dokumen	Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan / atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten / kota	Laporan	4 Laporan	Seksi Angkutan Khusus	Samarinda	
								Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota				Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah armada angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	Unit	-	Seksi Angkutan Jalan		
								Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan	KABID ANGKUTAN	1 Dokumen	Pelaksanaan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota	Dokumen	1	Seksi Angkutan Jalan	Samarinda	
							Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota					1	Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota	Jumlah dokumen penetapan kebijakan dan tersosialisasinya rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota	Dokumen	1	Seksi Angkutan Jalan	Samarinda
							Penetapan pelaksanaan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota					1	Pengendalian pelaksanaan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan pengendalian pelaksanaan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota	Dokumen	1	Seksi Angkutan Jalan	Samarinda
							Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi				1 Dokumen	Perumusan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan kabupaten / kota	Dokumen	1	Seksi Angkutan Jalan	Samarinda



TUJUAN (Tujuan OPD adalah sasaran Kepala Daerah)	SASARAN (OPD)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR SASARAN (IKU Ka. OPD)	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target 2025	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	JABATAN PENANGGUNG JAWAB	TARGET	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	Target 2025	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
(9)	(14)	(27)	(28)	(15)	(30)								(31)	(33)	(34)	(48)	(49)
												Sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan kabupaten / kota	Dokumen	1	Seksi Angkutan Jalan	Samarinda
								Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah/kota	Jumlah laporan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang		1 laporan	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten / kota	Laporan	4 Laporan	Seksi Angkutan Jalan	Samarinda
												Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah laporan pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten / kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Laporan (Unit)	4 Laporan	Seksi Angkutan Jalan	Samarinda
					Program Pengelolaan Pelayaran	Konektivitas Sungai	0,57	Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha	Jumlah laporan penerbitan izin usaha angkutan sungai	KABID ANGKUTAN	1 Dokumen	Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha kewenangan kabupaten/kota dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha kewenangan kabupaten / kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Dokumen	200 Dokumen	Seksi Angkutan & Dermaga Sungai	Samarinda



TUJUAN (Tujuan OPD adalah sasaran Kepala Daerah)	SASARAN (OPD)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR SASARAN (IKU Ka. OPD)	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target 2025	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	JABATAN PENANGGUNG JAWAB	TARGET	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	Target 2025	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
(9)	(14)	(27)	(28)	(15)	(30)								(31)	(33)	(34)	(48)	(49)
												Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha kewenangan kabupaten/kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha kewenangan kabupaten / kota	Laporan	-	Seksi Angkutan & Dermaga Sungai	Samarinda
								Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 daerah kabupaten/kota	KABID KESELAMATAN	1 Laporan	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 daerah kabupaten/kota kewenangan kabupaten/kota	Jumlah laporan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 daerah kabupaten/kota kewenangan kabupaten/kota	Laporan	4 Laporan	Seksi Keselamatan Pelayaran	Samarinda
								Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha	Jumlah laporan penerbitan izin usaha angkutan penyeberangan	KABID KESELAMATAN	1 Laporan	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha kewenangan kabupaten/kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha kewenangan kabupaten / kota	Laporan	-	Seksi Keselamatan Pelayaran	Samarinda
								Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan penetapan lintas penyeberangan	KABID ANGKUTAN KABID KESELAMATAN	1 Laporan	Penyediaan data dan informasi jaringan trayek sungai, danau dan penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan dalam kabupaten/kota	Jumlah data dan informasi jaringan trayek sungai, danau dan penyeberangan dan disetujuinya pengoperasian untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan dalam kabupaten/kota	Dokumen	-	Seksi Angkutan & Dermaga Sungai	Samarinda



TUJUAN (Tujuan OPD adalah sasaran Kepala Daerah)	SASARAN (OPD)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR SASARAN (IKU Ka. OPD)	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target 2025	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	JABATAN PENANGGUNG JAWAB	TARGET	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	Target 2025	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
(9)	(14)	(27)	(28)	(15)	(30)							(31)	(33)	(34)	(48)	(49)	
												Pengendalian dan pengawasan jaringan trayek sungai, danau dan penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan dalam kabupaten/kota	Jumlah laporan Pengendalian dan pengawasan jaringan trayek sungai, danau dan penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan pengoperasian untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota	Laporan	-	Seksi Keselamatan Pelayaran	Samarinda
								Penerbitan ijin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal	Jumlah laporan penerbitan ijin usaha jasa perawatan dan perbaikan kapal	KABID ANGKUTAN KABID KESELAMATAN	1 Dokumen	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Dokumen	-	Seksi Angkutan & Dermaga Sungai	Samarinda
												Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa terkait dengan perawatan kapal dan perbaikan kapal	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal	Laporan	4 Laporan	Seksi Keselamatan Pelayaran	Samarinda
								Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi	KABID ANGKUTAN	1 Laporan	Analisis tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen analisis tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten / kota	Dokumen	-	Seksi Angkutan & Dermaga Sungai	Samarinda
												Penyediaan data dan informasi tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah data dan informasi tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota	Dokumen	-	Seksi Angkutan & Dermaga Sungai	Samarinda



TUJUAN (Tujuan OPD adalah sasaran Kepala Daerah)	SASARAN (OPD)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR SASARAN (IKU Ka. OPD)	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target 2025	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	JABATAN PENANGGUNG JAWAB	TARGET	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	Target 2025	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
(9)	(14)	(27)	(28)	(15)	(30)								(31)	(33)	(34)	(48)	(49)
												Pengendalian dan pengawasan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten / kota	Laporan	-	Seksi Angkutan & Dermaga Sungai	Samarinda
								Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau	Jumlah Laporan penetapan rencana induk DLKR/DLKP pelabuhan sungai	KABID PRASARANA	1 Laporan	Pelaksanaan penyusunan rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR)/Daerah lingkungan kepentingan (DLKP) untuk pelabuhan sungai dan danau	Jumlah dokumen rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR) / daerah lingkungan kepentingan (DLKP) pelabuhan sungai dan danau	Dokumen	1 Dokumen	Seksi prasarana sungai	Samarinda
												Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR)/Daerah lingkungan kepentingan (DLKP) untuk pelabuhan sungai dan danau	Jumlah dokumen penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR) / daerah lingkungan kepentingan (DLKP) pelabuhan sungai dan danau	Dokumen	-	Seksi prasarana sungai	Samarinda
												Pengendalian pelaksanaan rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR)/Daerah lingkungan kepentingan (DLKP) untuk pelabuhan sungai dan danau	Jumlah laporan pengendalian pelaksanaan rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR) / daerah lingkungan kepentingan (DLKP) pelabuhan sungai dan danau	Laporan	-	Seksi prasarana sungai	Samarinda
								Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	Jumlah laporan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	KABID ANGKUTAN KABID PRASARANA	1 dokumen	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perizinan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	Jumlah dokumen pemenuhan persyaratan perizinan pelabuhan sungai dan danau yang dilaksanakan	Dokumen	-		Samarinda



TUJUAN (Tujuan OPD adalah sasaran Kepala Daerah)	SASARAN (OPD)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR SASARAN (IKU Ka. OPD)	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target 2025	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	JABATAN PENANGGUNG JAWAB	TARGET	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	Target 2025	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
(9)	(14)	(27)	(28)	(15)	(30)							(31)	(33)	(34)	(48)	(49)	
												Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau	Jumlah pelabuhan sundai dan danau yang beroperasi dan terpelihara	Unit	5 Unit		Samarinda
												Pembangunan dermaga sungai dan danau	Jumlah dermaga sungai dan danau yang dibangun	Unit	5		Samarinda
Indikator Tujuan	Indikator Sasaran											Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah dermaga sungai dan danau yang dipelihara	Unit	5		Samarinda
Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Rasio Konektivitas Kota											Pemenuhan fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan sungai dan danau penyeberangan	Jumlah fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan sungai dan danau penyeberangan	Unit	5		Samarinda
Target 2025 : Belum di tentukan	Target 2025 : 57,67							Penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal	Jumlah laporan penerbitan izin pengelolaan TUKS			Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR / DLKP pelabuhan pengumpan lokal	Laporan	4 Laporan	Seksi Prasarana multimoda	Samarinda



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

Untuk mewujudkan strategi dan arah kebijakan yang telah disusun pada bab sebelumnya guna mendukung tujuan dan sasaran jangka menengah pada Dinas Perhubungan Kota Samarinda, maka perlu dilakukan penyusunan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda pada periode Renstra tahun 2025-2029 dengan uraian sebagai berikut.

4.1 Program Sektor Perhubungan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program dapat ditetapkan berdasarkan kebutuhan dengan tetap mengacu kepada tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi. Kegiatan merupakan bagian dari program yang lebih luas dan bertujuan untuk mencapai tujuan yang lebih spesifik. Kegiatan mencakup berbagai aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Sedangkan subkegiatan adalah merupakan bentuk implementasi yang didasarkan pada NSPK dari masing-masing berwenang.

Beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun program dan kegiatan selain mendukung tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Samarinda melalui RPK Kota Samarinda, tugas dan fungsi Dinas Perhubungan sebagai penyelenggara urusan pemerintah Kota Samarinda di bidang Perhubungan menjadi tanggung jawab utama untuk memberikan pelayanan transportasi kepada Masyarakat. Pencapaian Tujuan Internasional SDGs juga menjadi pertimbangan sehingga setiap kegiatan selain mendukung visi misi pembangunan daerah Kota Samarinda juga mendukung tujuan Provinsi, nasional dan internasional. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dan upaya dalam mengantisipasi berbagai permasalahan di Bidang Perhubungan, maka disusun program kerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil



Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan memperhatikan sub bidang urusan pada Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran I tentang matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, yaitu:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan:
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA – SKPD
 - c) Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA – SKPD
 - d) Koordinasi dan penyusunan DPA – SKPD
 - e) Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA – SKPD
 - f) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - g) Evaluasi kinerja perangkat daerah
 - h) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
 - c) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
 3. Kegiatan : Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah
Sub Kegiatan :
 - a) Analisa dan pengembangan retribusi daerah serta penyusunan kebijakan retribusi daerah
 - b) Pelaporan pengelolaan retribusi daerah
 4. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - c) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
 5. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor



- d) Penyediaan peralatan rumah tangga
 - e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
 - g) Fasilitasi kunjungan tamu
 - h) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - i) Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan :
- a) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - c) Pengadaan alat angkutan darat tak bermotor
 - d) Pengadaan mebel
 - e) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - f) Pengadaan aset tak berwujud
 - g) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - h) Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
- a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - d) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - e) Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
- b. Program Penyelenggaraan Lalulintas Angkutan Jalan
1. Kegiatan : Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota
Sub Kegiatan:
 - a) Pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten/kota
 - b) Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota
 - c) Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan
 - d) Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan
 2. Kegiatan : Pengelolaan terminal penumpang tipe C
Sub Kegiatan:



- a) Pembangunan terminal penumpang Tipe C yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang
- b) Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal tipe C (fasilitas utama dan penunjang)
3. Kegiatan : Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir
Sub Kegiatan:
 - a) Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota
4. Kegiatan : Pengujian berkala kendaraan bermotor
Sub Kegiatan:
 - a) Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor
 - b) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor
 - c) Registrasi kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor
 - d) Penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor
 - e) Sosialisasi standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor
 - f) Identifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan bermotor wajib uji
 - g) Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor
 - h) Koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor
 - i) Penetapan tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor
 - j) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor
5. Kegiatan : Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan:
 - a) Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/Kota
 - b) Sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota
 - c) Forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota
 - d) Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota
6. Kegiatan : Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan:



- c) Pengawasan pelaksanaan rekomendasi persetujuan teknis Andalalin
7. Kegiatan : Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan
Sub Kegiatan:
- c) Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan terminal
 - b) Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/kota
 - c) Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum
 - d) Peningkatan kapasitas auditor dan inspektur lalu lintas dan angkutan jalan
 - e) Pelaksanaan pengawasan melalui uji petik terhadap unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor
8. Kegiatan : Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
Sub Kegiatan:
- a) Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota
 - b) Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
9. Kegiatan : Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
Sub Kegiatan:
- a) Pelaksanaan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
 - b) Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
 - c) Pengendalian pelaksanaan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
10. Kegiatan : Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
Sub Kegiatan:
- a) Perumusan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan kabupaten/kota
 - b) Sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan kabupaten/kota



11. Kegiatan : Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah/kota
Sub Kegiatan:
 - a) Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota
 - b) Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
12. Kegiatan : Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
Sub Kegiatan:
 - a) Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan kabupaten/kota dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
 - b) Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan kabupaten/kota
13. Kegiatan : Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
Sub Kegiatan:
 - a) Analisis tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
 - b) Penyediaan data dan informasi tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
 - c) Pengendalian dan pengawasan tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
- c. Program Pengelolaan Pelayaran
 1. Kegiatan : Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha
Sub Kegiatan:
 - a) Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha kewenangan kabupaten/kota dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
 - b) Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili



- orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha kewenangan kabupaten/kota
2. Kegiatan : Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 daerah kabupaten/kota
Sub Kegiatan:
 - a) Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 daerah kabupaten/kota kewenangan kabupaten/kota
 3. Kegiatan : Penerbitan ijin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha
Sub Kegiatan:
 - a) Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha kewenangan kabupaten/kota
 4. Kegiatan : Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota
Sub Kegiatan:
 - a) Penyediaan data dan informasi jaringan trayek sungai, danau dan penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan dalam kabupaten/kota
 - b) Pengendalian dan pengawasan jaringan trayek sungai, danau dan penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan dalam kabupaten/kota
 5. Kegiatan : Penerbitan ijin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal
Sub Kegiatan:
 - a) Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
 - b) Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa terkait dengan perawatan kapal dan perbaikan kapal
 6. Kegiatan : Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota
Sub Kegiatan:
 - a) Analisis tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota



- b) Penyediaan data dan informasi tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota
- c) Pengendalian dan pengawasan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar daerah kabupaten/kota
7. Kegiatan : Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau
Sub Kegiatan:
 - a) Pelaksanaan penyusunan rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR)/Daerah lingkungan kepentingan (DLKP) untuk pelabuhan sungai dan danau
 - b) Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR)/Daerah lingkungan kepentingan (DLKP) untuk pelabuhan sungai dan danau
 - c) Pengendalian pelaksanaan rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR)/Daerah lingkungan (DLKP) untuk pelabuhan sungai dan danau
8. Kegiatan : Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau
Sub Kegiatan:
 - a) Fasilitasi pemenuhan persyaratan perizinan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau
 - b) Pembangunan pelabuhan sungai dan danau
 - c) Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau
 - d) Pembangunan dermaga sungai dan danau
 - e) Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau
 - f) Pemenuhan fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan sungai dan danau penyeberangan
9. Kegiatan : Penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal
Sub Kegiatan:
 - a) Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal
- d. Program Pengelolaan Perkeretaapian
 1. Kegiatan : Penetapan rencana induk perkeretaapian
Sub Kegiatan:
 - a) Pelaksanaan penyusunan rencana induk perkeretaapian
 - b) Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk perkeretaapian



2. Kegiatan : Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasional prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota

Sub Kegiatan:

- a) Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
- b) Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota .

Berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi *roadmap* pada OPD Dinas Perhubungan Kota Samarinda hingga 5 tahun mendatang, selanjutnya adalah perencanaan target dan pembiayaan pada setiap program tersebut. Sebagaimana dalam bab 3 sebelumnya, penetapan target pada setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada OPD Dinas Perhubungan Kota Samarinda, masing-masing program kegiatan memiliki tingkat kebutuhan pembiayaan yang tidak hanya tertuju pada pelaksanaan teknis, juga meliputi kegiatan administrasi, honorarium, pengadaan dan lain sebagainya. Secara garis besarnya, kebutuhan sumberdaya pembiayaan tersebut lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 4.1. Program Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Samarinda (Tahun 2026-2030)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					83.458.313.958		85.433.313.000		86.588.000.000		88.280.769.500		90.105.639.950	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					54.458.313.958		55.765.313.000		56.500.500.000		57.630.510.750		58.783.120.950	
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	79	80	82	54.458.313.958	84	55.765.313.000	86	56.500.500.000	88	57.630.510.750	89	58.783.120.950	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	87,28	87,48	87,68		87,98		88,18		88,48		88,78		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					25.145.000.000		25.724.335.000		26.087.937.500		26.650.696.250		27.235.769.000	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat (Rasio)	0,89	0,57	0,31	23.170.000.000	0,46	23.749.335.000	0,62	24.112.937.500	0,77	24.675.696.250	1,00	25.260.769.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan



Pemerintah Kota Samarinda
Dinas Perhubungan Kota Samarinda



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	-	40%	45%		50%		55%		60%		65%		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase kendaraan layak uji (%)	-	53%	55%		56%		58%		59%		61%		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase kendaraan layak uji (%)	-	53	55	1.975.000.000	56	1.975.000.000	58	1.975.000.000	59	1.975.000.000	61	1.975.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					3.855.000.000		3.943.665.000		3.999.562.500		3.999.562.500		4.086.750.000	
Meningkatnya kualitas layanan Transportasi Sungai	Konektivitas Sungai (Rasio)	1	0,57	0,71	3.855.000.000	0,71	3.943.665.000	0,86	3.999.562.500	0,86	3.999.562.500	1	4.086.750.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
TOTAL KESELURUHAN					83.458.313.958		85.433.313.000		86.588.000.000		88.280.769.500		90.105.639.950	



4.2 Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sub kegiatan Dinas Perhubungan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah adalah langkah-langkah spesifik yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam program prioritas Pembangunan daerah untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2025-2029. Tahapannya meliputi perumusan rancangan awal yang kemudian disempurnakan dan disajikan dalam forum konsultasi untuk mendapatkan masukan, dilanjutkan dengan verifikasi dan penetapan rancangan akhir yang akan menjadi dokumen Renstra PD. Adapun Sub Kegiatan Dinas Perhubungan dari Program Prioritas pembangunan daerah adalah sebagaimana Tabel dibawah ini.



Tabel 4.2. Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra PD Dalam Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Samarinda (Tahun 2025-2029)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan Kota Samarinda							
- Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas	Terwujudnya Infrastruktur Yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Keselamatan dan Kualitas Layanan Transportasi	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) (Indeks)		
					Rasio Konektivitas (Nilai)		
					Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)	2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.15.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.15.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.15.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2.15.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.15.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.15.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.15.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.15.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.15.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.15.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Laju peningkatan pendapatan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.15.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.15.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.15.01.2.04.0002 - Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.15.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Persentase pegawai perangkat daerah yang mendapat	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.15.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				pelayanan kepegawaian			
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.15.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.15.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.15.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.15.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tingkat pemenuhan barang milik daerah penunjang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar	
					Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07.0004 - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.15.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.15.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.15.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.15.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.15.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.15.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.15.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.15.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)	2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.15.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.15.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	2.15.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	
					Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	2.15.01.2.09.0004 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.15.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.15.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.15.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	2.15.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.15.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.15.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.15.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)	2.15.01.2.09.0012 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat		Konektivitas Darat (Rasio)	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
					Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
					Persentase kendaraan layak uji (%)	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Jumlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten / kota yang tersedia	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit)	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit)	2.15.02.2.02.0001 - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	2.15.02.2.02.0003 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	
					Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	2.15.02.2.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
				Jumlah Terminal Tipe C Terkelola	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi. (Orang)	2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
					Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun (Dokumen)	2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
					Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi (Dokumen)	2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
					Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
					Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang (Unit)	2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
					Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang) (Unit)	2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
					Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun (Dokumen)	2.15.02.2.03.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi (Dokumen)	2.15.02.2.03.0006 - Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	
					Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang) (Unit)	2.15.02.2.03.0007 - Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	
					Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang (Unit)	2.15.02.2.03.0009 - Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	
					Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi. (Orang)	2.15.02.2.03.0010 - Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	
					Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	2.15.02.2.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	
				Jumlah laporan Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah laporan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	2.15.02.2.04.0001 - Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan)	2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.06.0004 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.06.0014 - Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.06.0015 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan)	2.15.02.2.06.0017 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
				Jumlah laporan persetujuan hasil Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi (Laporan)	2.15.02.2.07 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi (Laporan)	2.15.02.2.07.0006 - Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	
				Jumlah laporan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	2.15.02.2.08 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	
					Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.08 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)	2.15.02.2.08 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	
					Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal (Laporan)	2.15.02.2.08 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	
					Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	2.15.02.2.08 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	
					Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal (Laporan)	2.15.02.2.08.0003 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	
					Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.08.0004 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)	2.15.02.2.08.0007 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	
					Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	2.15.02.2.08.0008 - Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	
					Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	2.15.02.2.08.0009 - Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah laporan angkutan barang yang tersedia	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	2.15.02.2.09 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.09 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.09.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	2.15.02.2.09.0003 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah dokumen penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.11 - Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.11 - Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.11 - Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.11.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.11.0002 - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.11.0003 - Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah dokumen penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.13 - Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.13 - Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.13.0001 - Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.13.0002 - Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah laporan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.14 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Unit)	2.15.02.2.14 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.14.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Unit)	2.15.02.2.14.0003 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
				Jumlah laporan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.15 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Persetujuan Izin Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan. (Unit)	2.15.02.2.15 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Persetujuan Izin Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan. (Unit)	2.15.02.2.15.0003 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.15.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah Laporan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.16 - Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.16.0003 - Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas layanan Transportasi Sungai		Konektivitas Sungai (Rasio)	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
				Jumlah laporan Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	2.15.03.2.04 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.03.2.04 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	2.15.03.2.04.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.03.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah laporan penetapan lintas penyeberangan		2.15.03.2.06 - Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah laporan penetapan lintas penyeberangan		2.15.03.2.06 - Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	
					Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.03.2.07 - Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.03.2.07 - Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.03.2.07.0003 - Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.03.2.07.0004 - Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Laporan penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi	Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.03.2.09 - Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Laporan penetapan rencana induk DLKR/DLKP pelabuhan sungai	Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.03.2.09.0002 - Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Laporan penetapan rencana induk DLKR/DLKP pelabuhan sungai	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau (Dokumen)	2.15.03.2.11 - Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	
				Jumlah Laporan penetapan rencana induk DLKR/DLKP pelabuhan sungai	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau (Dokumen)	2.15.03.2.11 - Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau (Laporan)	2.15.03.2.11 - Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	
					Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau (Dokumen)	2.15.03.2.11.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	
					Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau (Dokumen)	2.15.03.2.11.0002 - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	
					Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau (Laporan)	2.15.03.2.11.0003 - Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	
				Jumlah laporan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara (Unit)	2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	
					Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan (Unit)	2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	
					Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan (Dokumen)	2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	
					Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia (Unit)	2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	
					Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Laporan)	2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	
					Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)	2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	
					Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun (Unit)	2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	
					Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi (Orang)	2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Orang)	2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	
					Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan (Dokumen)	2.15.03.2.13.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	
					Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun (Unit)	2.15.03.2.13.0002 - Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	
					Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)	2.15.03.2.13.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	
					Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan (Unit)	2.15.03.2.13.0006 - Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	
					Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara (Unit)	2.15.03.2.13.0007 - Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	
					Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Orang)	2.15.03.2.13.0008 - Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	
					Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi (Orang)	2.15.03.2.13.0009 - Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Angkutan Sungai dan Danau	
					Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Laporan)	2.15.03.2.13.0010 - Pengawasan Pengoperasian	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	
					Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia (Unit)	2.15.03.2.13.0011 - Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	
				Jumlah laporan penerbitan izin pengelolaan TUKS		2.15.03.2.19 - Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	
						2.15.03.2.19 - Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	
2.15.0.00.0.00.01.0001 - UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor							
- Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas	Terwujudnya Infrastruktur Yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Keselamatan dan Kualitas Layanan Transportasi	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat		Persentase kendaraan layak uji (%)	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Jumlah Kendaraan Motor yang di Uji dak Laik Jalan	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar (Unit)	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (Laporan)	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	2.15.02.2.05.0001 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	2.15.02.2.05.0002 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar (Unit)	2.15.02.2.05.0003 - Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	2.15.02.2.05.0004 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	2.15.02.2.05.0005 - Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (Laporan)	2.15.02.2.05.0006 - Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	2.15.02.2.05.0007 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	2.15.02.2.05.0008 - Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	2.15.02.2.05.0009 - Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	2.15.02.2.05.0010 - Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	



4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) Perangkat Daerah

Dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M/PAN/5/2007 Tentang Indikator Kinerja Utama, OPD dalam mewujudkan tujuan dan sasaran OPD dalam RPJMD Kota Samarinda hingga tahun 2029, secara optimistas akan ditargetkan capaian dan realisasi sebagaimana dalam tabel berikut.



Tabel 4.3. Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan OPD Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				117.500.111.789		83.458.313.958		85.433.313.000		86.588.000.000		88.280.769.500		90.105.639.950		
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				55.095.983.413		54.458.313.958		55.765.313.000		56.500.500.000		57.630.510.750		58.783.120.950		
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	79	80	55.095.983.413	82	54.458.313.958	84	55.765.313.000	86	56.500.500.000	88	57.630.510.750	89	58.783.120.950	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan Kota Samarinda	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	87,28	87,48		87,68		87,98		88,18		88,48		88,78			
2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				221.556.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	28	221.556.000	28	250.000.000	28	250.000.000	28	250.000.000	28	250.000.000	28	250.000.000		
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2	2		2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	2		2		2		2		2		2		2	



Pemerintah Kota Samarinda
Dinas Perhubungan Kota Samarinda



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	12		12		12		12		12		12			
2.15.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				138.829.500		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	12	138.829.500	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000		
2.15.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				41.152.750		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	2	41.152.750	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000		
2.15.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				41.573.750		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	28	41.573.750	28	50.000.000	28	50.000.000	28	50.000.000	28	50.000.000	28	50.000.000		
2.15.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2	2	0	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000		



Pemerintah Kota Samarinda
Dinas Perhubungan Kota Samarinda



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				25.564.328.334		26.175.858.577		27.482.857.619		28.218.044.619		29.348.055.369		30.500.665.569		
Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	4	25.564.328.334	4	26.175.858.577	4	27.482.857.619	4	28.218.044.619	4	29.348.055.369	4	30.500.665.569		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4	4		4		4		4		4		4			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	111	149		150		150		150		150		150		150	
2.15.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				16.870.887.632		17.479.086.625		18.132.586.146		18.500.179.646		19.065.185.021		19.641.490.121		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	111	150	16.870.887.632	150	17.479.086.625	150	18.132.586.146	150	18.500.179.646	150	19.065.185.021	150	19.641.490.121		
2.15.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				8.646.771.952		8.646.771.952		9.300.271.473		9.667.864.973		10.232.870.348		10.809.175.448		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4	4	8.646.771.952	4	8.646.771.952	4	9.300.271.473	4	9.667.864.973	4	10.232.870.348	4	10.809.175.448		
2.15.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				46.668.750		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	4	46.668.750	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000		



Pemerintah Kota Samarinda
Dinas Perhubungan Kota Samarinda



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				37.680.939		37.680.939		37.680.939		37.680.939		37.680.939		37.680.939		
Laju peningkatan pendapatan perangkat daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1	37.680.939	1	37.680.939	2	37.680.939	2	37.680.939	2	37.680.939	2	37.680.939		
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	4	1		1		2		2		2		2			
2.15.01.2.04.0002 - Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah				18.802.514		18.802.514		18.802.514		18.802.514		18.802.514		18.802.514		
Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	4	1	18.802.514	1	18.802.514	2	18.802.514	2	18.802.514	2	18.802.514	2	18.802.514		
2.15.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				18.878.425		18.878.425		18.878.425		18.878.425		18.878.425		18.878.425		
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1	18.878.425	1	18.878.425	2	18.878.425	2	18.878.425	2	18.878.425	2	18.878.425		
2.15.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Persentase pegawai perangkat daerah yang mendapat pelayanan kepegawaian	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	1	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.15.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	1	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.460.070.698		532.940.000		532.940.000		532.940.000		532.940.000		532.940.000		



Pemerintah Kota Samarinda
Dinas Perhubungan Kota Samarinda



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan (Paket)	4	4	1.460.070.698	4	532.940.000	4	532.940.000	4	532.940.000	4	532.940.000	4	532.940.000		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24	24		24		24		24		24		24			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	50	50		50		50		50		50		50			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5		5		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5		5		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5		5		5		5		5		5			
2.15.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				61.080.400		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	61.080.400	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000		



Pemerintah Kota Samarinda
Dinas Perhubungan Kota Samarinda



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				760.202.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	760.202.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000		
2.15.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	50	50	0	50	20.000.000	50	20.000.000	50	20.000.000	50	20.000.000	50	20.000.000		
2.15.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				27.940.000		27.940.000		27.940.000		27.940.000		27.940.000		27.940.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	27.940.000	5	27.940.000	5	27.940.000	5	27.940.000	5	27.940.000	5	27.940.000		
2.15.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				346.692.150		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	346.692.150	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000		
2.15.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	1	0	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		
2.15.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				43.770.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	43.770.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
2.15.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				220.386.148		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24	24	220.386.148	24	200.000.000	24	200.000.000	24	200.000.000	24	200.000.000	24	200.000.000		



Pemerintah Kota Samarinda
Dinas Perhubungan Kota Samarinda



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.511.010.000		1.071.360.000		1.071.360.000		1.071.360.000		1.071.360.000		1.071.360.000		
Tingkat pemenuhan barang milik daerah penunjang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10	10	1.511.010.000	10	1.071.360.000	10	1.071.360.000	10	1.071.360.000	10	1.071.360.000	10	1.071.360.000		
	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)															
	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)															
	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)															
	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)															
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)															
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2	2		2		2		2		2		2			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	10		10		10		10		10		10			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)															
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)															
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau															



Pemerintah Kota Samarinda
Dinas Perhubungan Kota Samarinda



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)															
2.15.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		941.360.000		941.360.000		941.360.000		941.360.000		941.360.000		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	10	0	10	941.360.000	10	941.360.000	10	941.360.000	10	941.360.000	10	941.360.000		
2.15.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.011.075.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2	2	1.011.075.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000		
2.15.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar				0		0		0		0		0		0		
Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		0		
2.15.01.2.07.0004 - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				0		0		0		0		0		0		
Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		0		
2.15.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				499.935.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10	10	499.935.000	10	30.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000		
2.15.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		0		0		0		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		0		
2.15.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		0		0		0		
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		0		



Pemerintah Kota Samarinda
Dinas Perhubungan Kota Samarinda



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		0		0		0		
Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		0		
2.15.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		0		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		0		
2.15.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		0		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		0		
2.15.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		0		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		0		
2.15.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				25.171.729.542		25.171.729.542		25.171.729.542		25.171.729.542		25.171.729.542		25.171.729.542		
Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	25.171.729.542	1	25.171.729.542	1	25.171.729.542	1	25.171.729.542	1	25.171.729.542	1	25.171.729.542		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1			



Pemerintah Kota Samarinda
Dinas Perhubungan Kota Samarinda



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)															
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	1		1		1		1		1		1			
2.15.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		0		0		0		0		0		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)			0		0		0		0		0		0		
2.15.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				25.009.949.542		25.009.949.542		25.009.949.542		25.009.949.542		25.009.949.542		25.009.949.542		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	25.009.949.542	1	25.009.949.542	1	25.009.949.542	1	25.009.949.542	1	25.009.949.542	1	25.009.949.542		
2.15.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	1	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.15.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				111.780.000		111.780.000		111.780.000		111.780.000		111.780.000		111.780.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	111.780.000	1	111.780.000	1	111.780.000	1	111.780.000	1	111.780.000	1	111.780.000		
2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.179.607.900		1.168.744.900		1.168.744.900		1.168.744.900		1.168.744.900		1.168.744.900		
Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	5	1.179.607.900	5	1.168.744.900	5	1.168.744.900	5	1.168.744.900	5	1.168.744.900	5	1.168.744.900		



Pemerintah Kota Samarinda
Dinas Perhubungan Kota Samarinda



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)															
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	50	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)															
	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)															
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)															
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	20	20	20	20	0	20	20	20	20	20	20	20	20		
	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)															



Pemerintah Kota Samarinda
Dinas Perhubungan Kota Samarinda



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)															
	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)															
2.15.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		70.000.000			70.000.000			70.000.000			70.000.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	5	0	5	70.000.000	5	70.000.000	5	70.000.000	5	70.000.000	5	70.000.000		
2.15.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				848.744.900		848.744.900		848.744.900		848.744.900		848.744.900		848.744.900		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	50	60	848.744.900	60	848.744.900	60	848.744.900	60	848.744.900	60	848.744.900	60	848.744.900		
2.15.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				0		0		0		0		0		0		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)			0		0		0		0		0		0		
2.15.01.2.09.0004 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				0		0		0		0		0		0		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)			0		0		0		0		0		0		



Pemerintah Kota Samarinda
Dinas Perhubungan Kota Samarinda



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0		0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)			0		0		0		0		0		0		
2.15.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	5	0	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000		
2.15.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)			0		0		0		0		0		0		
2.15.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)			0		0		0		0		0		0		
2.15.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				139.624.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5	139.624.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000		
2.15.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				191.239.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	20	20	191.239.000	20	100.000.000	0	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000		
2.15.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0		0		0		0		0		0		



Pemerintah Kota Samarinda
Dinas Perhubungan Kota Samarinda



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)															
2.15.01.2.09.0012 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah				0		0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)			0		0		0		0		0		0		
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				57.421.976.626		25.145.000.000		25.724.335.000		26.087.937.500		26.650.696.250		27.235.769.000		
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase kendaraan layak uji (%)	-	53%	54.750.241.626	55%	23.170.000.000	56%	23.749.335.000	58%	24.112.937.500	59%	24.675.696.250	61%	25.260.769.000	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan Kota Samarinda	
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	-	40%		45%		50%		55%		60%		65%			
	Konektivitas Darat (Rasio)	0,89	0,58		0,31		0,46		0,62		0,77		1,00			
2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				47.099.709.000		16.964.523.000		17.543.858.000		17.907.460.500		18.470.219.250		19.055.292.000		
Jumlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten / kota yang tersedia	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit)	1	1	47.099.709.000	1	16.964.523.000	1	17.543.858.000	1	17.907.460.500	1	18.470.219.250	1	19.055.292.000		
	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	7	7		7		7		7		7		7			
	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	7	7		7		7		7		7		7			
	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	1	1		1		1		1		1		1			
2.15.02.2.02.0001 - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				76.430.000		358.700.000		358.700.000		358.700.000		358.700.000		358.700.000		



Pemerintah Kota Samarinda
Dinas Perhubungan Kota Samarinda



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit)	1	1	76.430.000	1	358.700.000	1	358.700.000	1	358.700.000	1	358.700.000	1	358.700.000		
2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				45.533.609.042		14.705.823.000		15.285.158.000		15.648.760.500		16.211.519.250		16.796.592.000		
Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	7	7	45.533.609.042	7	14.705.823.000	7	15.285.158.000	7	15.648.760.500	7	16.211.519.250	7	16.796.592.000		
2.15.02.2.02.0003 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan				500.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	1	1	500.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000		
2.15.02.2.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan				2.989.670.907		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	7	7	2.989.670.907	7	1.500.000.000	7	1.500.000.000	7	1.500.000.000	7	1.500.000.000	7	1.500.000.000		
2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				0		0		0		0		0		0		
Jumlah Terminal Tipe C Terkelola	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi. (Orang)			0		0		0		0		0		0		
	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi (Dokumen)															
	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)															
	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang (Unit)															



Pemerintah Kota Samarinda
Dinas Perhubungan Kota Samarinda



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang) (Unit)															
	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun (Dokumen)															
2.15.02.2.03.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C				0		0		0		0		0		0		
Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun (Dokumen)			0		0		0		0		0		0		
2.15.02.2.03.0006 - Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C				0		0		0		0		0		0		
Terlaksananya pengawasan terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi (Dokumen)			0		0		0		0		0		0		
2.15.02.2.03.0007 - Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)				0		0		0		0		0		0		
Terlaksananya Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang) (Unit)			0		0		0		0		0		0		
2.15.02.2.03.0009 - Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang				0		0		0		0		0		0		
Terbangunnya Terminal Tipe C yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang (Unit)			0		0		0		0		0		0		
2.15.02.2.03.0010 - Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C				0		0		0		0		0		0		
Terlaksana Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia			0		0		0		0		0		0		



Pemerintah Kota Samarinda
Dinas Perhubungan Kota Samarinda



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi. (Orang)															
2.15.02.2.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)				0		0		0		0		0		0		
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)			0		0		0		0		0		0		
2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				3.875.107.302		2.750.000.000		2.750.000.000		2.750.000.000		2.750.000.000		2.750.000.000		
Jumlah laporan Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangannya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)			3.875.107.302		2.750.000.000		2.750.000.000		2.750.000.000		2.750.000.000		2.750.000.000		
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangannya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	4	4		4		4		4		4		4			
2.15.02.2.04.0001 - Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				0		0		0		0		0		0		



Pemerintah Kota Samarinda
Dinas Perhubungan Kota Samarinda



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)			0		0		0		0		0		0		
2.15.02.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				3.875.107.302		2.750.000.000		2.750.000.000		2.750.000.000		2.750.000.000		2.750.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	4	4	3.875.107.302	4	2.750.000.000	4	2.750.000.000	4	2.750.000.000	4	2.750.000.000	4	2.750.000.000		
2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1.922.520.000		1.525.000.000		1.525.000.000		1.525.000.000		1.525.000.000		1.525.000.000		
Jumlah laporan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	4	4	1.922.520.000	4	1.525.000.000	4	1.525.000.000	4	1.525.000.000	4	1.525.000.000	4	1.525.000.000		
	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1	1		1		1		1		1		1			



Pemerintah Kota Samarinda
Dinas Perhubungan Kota Samarinda



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)															
	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan)	4	4		4		4		4		4		4			
2.15.02.2.06.0004 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				1.448.588.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	4	4	1.448.588.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000		
2.15.02.2.06.0014 - Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				214.602.500		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		
Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	214.602.500	1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000		
2.15.02.2.06.0015 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				60.600.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		
Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan	1	1	60.600.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000		



Pemerintah Kota Samarinda
Dinas Perhubungan Kota Samarinda



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kabupaten/Kota (Laporan)															
2.15.02.2.06.0017 - Penataan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				198.729.500		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan)	4	4	198.729.500	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000		
2.15.02.2.07 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota				99.107.500		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Jumlah laporan persetujuan hasil Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi (Laporan)	4	4	99.107.500	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000		
2.15.02.2.07.0006 - Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin				99.107.500		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi (Laporan)	4	4	99.107.500	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000		
2.15.02.2.08 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				444.869.750		565.000.000		565.000.000		565.000.000		565.000.000		565.000.000		
Jumlah laporan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12	444.869.750	12	565.000.000	12	565.000.000	12	565.000.000	12	565.000.000	12	565.000.000		
	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	4	4		4		4		4		4		4			



Pemerintah Kota Samarinda
Dinas Perhubungan Kota Samarinda



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal (Laporan)															
	Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	8	10		10		10		10		10		10			
	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)	0	4		4		4		4		4		4			
2.15.02.2.08.0003 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				0		0		0		0		0		0		
Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal (Laporan)			0		0		0		0		0		0		
2.15.02.2.08.0004 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				250.717.500		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12	250.717.500	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000		
2.15.02.2.08.0007 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan	0	4	0	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000		



Pemerintah Kota Samarinda
Dinas Perhubungan Kota Samarinda



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)															
2.15.02.2.08.0008 - Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan				129.716.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Meningkatnya Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	8	10	129.716.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000		
2.15.02.2.08.0009 - Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor				64.436.250		115.000.000		115.000.000		115.000.000		115.000.000		115.000.000		
Terlaksananya Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	4	4	64.436.250	4	115.000.000	4	115.000.000	4	115.000.000	4	115.000.000	4	115.000.000		
2.15.02.2.09 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1.060.005.000		647.602.000		647.602.000		647.602.000		647.602.000		647.602.000		
Jumlah laporan angkutan barang yang tersedia	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	0	24	1.060.005.000	24	647.602.000	40	647.602.000	53	647.602.000	67	647.602.000	80	647.602.000		
	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	4	4		4		4		4		4					



Pemerintah Kota Samarinda
Dinas Perhubungan Kota Samarinda



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.02.2.09.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				90.181.000		97.602.000		97.602.000		97.602.000		97.602.000		97.602.000		
Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	4	4	90.181.000	4	97.602.000	4	97.602.000	4	97.602.000	4	97.602.000	4	97.602.000		
2.15.02.2.09.0003 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				969.824.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		
Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	0	24	969.824.000	24	550.000.000	40	550.000.000	53	550.000.000	67	550.000.000	80	550.000.000		
2.15.02.2.10 - Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		0		
2.15.02.2.11 - Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				113.368.625		375.000.000		375.000.000		375.000.000		375.000.000		375.000.000		
Jumlah dokumen penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	113.368.625	1	375.000.000	1	375.000.000	1	375.000.000	1	375.000.000	1	375.000.000		



Pemerintah Kota Samarinda
Dinas Perhubungan Kota Samarinda



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
2.15.02.2.11.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0		150.000.000			150.000.000			150.000.000			150.000.000	
Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		
2.15.02.2.11.0002 - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				113.368.625		225.000.000			225.000.000			225.000.000			225.000.000	
Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	113.368.625	1	225.000.000	1	225.000.000	1	225.000.000	1	225.000.000	1	225.000.000		
2.15.02.2.11.0003 - Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0		0			0			0			0	



Pemerintah Kota Samarinda
Dinas Perhubungan Kota Samarinda



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0		
2.15.02.2.12 - Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		0		
2.15.02.2.13 - Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		0		
Jumlah dokumen penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0		
	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		1			
2.15.02.2.13.0001 - Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam				0		0		0		0		0		0		



Pemerintah Kota Samarinda
Dinas Perhubungan Kota Samarinda



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota																
Terciptanya Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0		
2.15.02.2.13.0002 - Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		0		
Tersosialisasinya dan Terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0		
2.15.02.2.14 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				135.553.500		242.875.000		242.875.000		242.875.000		242.875.000		242.875.000		
Jumlah laporan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan	4	4	135.553.500	4	242.875.000	4	242.875.000	4	242.875.000	4	242.875.000	4	242.875.000		



Pemerintah Kota Samarinda
Dinas Perhubungan Kota Samarinda



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kabupaten/Kota (Laporan)															
	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.15.02.2.14.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		0		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	4	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0		
2.15.02.2.14.0003 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				135.553.500		242.875.000		242.875.000		242.875.000		242.875.000		242.875.000		
Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan	0	0	135.553.500	0	242.875.000	0	242.875.000	0	242.875.000	0	242.875.000	0	242.875.000		



Pemerintah Kota Samarinda
Dinas Perhubungan Kota Samarinda



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Unit)															
2.15.02.2.15 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		0		
Jumlah laporan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0		
	Jumlah Persetujuan Izin Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan. (Unit)	50	50		50		50		50		50		50			
2.15.02.2.15.0003 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				0		0		0		0		0		0		



Pemerintah Kota Samarinda
Dinas Perhubungan Kota Samarinda



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Persetujuan Izin Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan. (Unit)	50	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0		
2.15.02.2.15.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota				0		0				0			0			
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0		
2.15.02.2.16 - Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0		0				0			0			
Jumlah Laporan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0		



Pemerintah Kota Samarinda
Dinas Perhubungan Kota Samarinda



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.02.2.16.0003 - Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		0		
Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0		
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase kendaraan layak uji (%)	-	53	2.671.735.000	55	1.975.000.000	56	1.975.000.000	58	1.975.000.000	59	1.975.000.000	61	1.975.000.000	2.15.0.00.0.00.01.0001 - UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	
2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				2.671.735.000		1.975.000.000		1.975.000.000		1.975.000.000		1.975.000.000		1.975.000.000		
Jumlah Kendaraan Motor yang di Uji dak Laik Jalan	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (Laporan)			2.671.735.000		1.975.000.000		1.975.000.000		1.975.000.000		1.975.000.000		1.975.000.000		
	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	12.100	13.700		13.700		9.150		9.150		9.150		9.150			
	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)															
	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar (Unit)	1.400	1.400		1.400		1.400		1.400		1.400		1.400		1.400	
	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang	8	9		9		10		11		12		12			



Pemerintah Kota Samarinda
Dinas Perhubungan Kota Samarinda



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)															
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	175	125	125		115		130		120		130				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	85	100	100		100		100		100		100				
	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	4	4	4		4		4		4		4				
	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)															
	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)															
2.15.02.2.05.0001 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				975.281.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	175	151	975.281.000	125	400.000.000	115	400.000.000	130	400.000.000	120	400.000.000	130	400.000.000		
2.15.02.2.05.0002 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				190.728.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000		
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang	8	8	190.728.000	9	175.000.000	10	175.000.000	11	175.000.000	12	175.000.000	12	175.000.000		



Pemerintah Kota Samarinda
Dinas Perhubungan Kota Samarinda



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)															
2.15.02.2.05.0003 - Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terdaftaranya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar (Unit)	1.400	1.400	100.000.000	1.400	100.000.000	1.400	100.000.000	1.400	100.000.000	1.400	100.000.000	1.400	100.000.000		
2.15.02.2.05.0004 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				80.726.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		
Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	12.100	12.100	80.726.000	13.700	400.000.000	9.150	400.000.000	9.150	400.000.000	9.150	400.000.000	9.150	400.000.000		
2.15.02.2.05.0005 - Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersosialisasinya Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	4	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000		
2.15.02.2.05.0006 - Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji				0		0		0		0		0		0		
Terlaksananya Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (Laporan)			0		0		0		0		0		0		
2.15.02.2.05.0007 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1.225.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	85	85	1.225.000.000	100	800.000.000	100	800.000.000	100	800.000.000	100	800.000.000	100	800.000.000		
2.15.02.2.05.0008 - Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				0		0		0		0		0		0		



Pemerintah Kota Samarinda
Dinas Perhubungan Kota Samarinda



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)			0		0		0		0		0		0		
2.15.02.2.05.0009 - Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				0		0		0		0		0		0		
Ditetapkannya Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)			0		0		0		0		0		0		
2.15.02.2.05.0010 - Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				0		0		0		0		0		0		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)			0		0		0		0		0		0		
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				4.982.151.750		3.855.000.000		3.943.665.000		3.999.562.500		3.999.562.500		4.086.750.000		
Meningkatnya kualitas layanan Trasportasi Sungai	Konektivitas Sungai (Rasio)	1	0,57	4.982.151.750	0,71	3.855.000.000	0,71	3.943.665.000	0,86	3.999.562.500	0,86	3.999.562.500	1	4.086.750.000	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan Kota Samarinda	
2.15.03.2.03 - Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha				0		0		0		0		0		0		
2.15.03.2.04 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		0		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah laporan Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)			0		0		0		0		0		0		
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)		4		4		4		4		4		4			
2.15.03.2.04.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				0		0		0		0		0		0		
Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota			0		0		0		0		0		0		



Pemerintah Kota Samarinda
Dinas Perhubungan Kota Samarinda



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)															
2.15.03.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota			1	80.605.500		0		0		0		0		0		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)		4	80.605.500	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0		
2.15.03.2.05 - Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha				0		0		0		0		0		0		
2.15.03.2.06 - Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		0		
Jumlah laporan penetapan lintas penyeberangan				0		0		0		0		0		0		
2.15.03.2.07 - Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				205.000.000		205.000.000		205.000.000		205.000.000		205.000.000		205.000.000		



Pemerintah Kota Samarinda
Dinas Perhubungan Kota Samarinda



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTPUT / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah laporan penetapan lintas penyeberangan	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	205.000.000	1	205.000.000	1	205.000.000	1	205.000.000	1	205.000.000	1	205.000.000		
	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	0	4		4		4		4		4		4			
2.15.03.2.07.0003 - Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		
Tersedianya Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah	0	1	0	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000		



Pemerintah Kota Samarinda
Dinas Perhubungan Kota Samarinda



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kabupaten/Kota (Dokumen)															
2.15.03.2.07.0004 - Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				138.814.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		
Terkendalinya dan Terawasinya Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan terkendalinya dan terawasinya izin persetujuan pengoperasian untuk angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	0	4	138.814.000	4	125.000.000	4	125.000.000	4	125.000.000	4	125.000.000	4	125.000.000		
2.15.03.2.08 - Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal				0		0		0		0		0		0		
2.15.03.2.09 - Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		0		
Jumlah Laporan penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi	Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0		



Pemerintah Kota Samarinda
Dinas Perhubungan Kota Samarinda



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)															
2.15.03.2.09.0002 - Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		0		
Tersedianya Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0		
2.15.03.2.10 - Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Lokal				0		0		0		0		0		0		
2.15.03.2.11 - Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau				496.835.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
Jumlah Laporan penetapan rencana induk DLKR/DLKP pelabuhan sungai	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau (Laporan)	0	0	496.835.000	0	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000		
	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan	0	1		1											



Pemerintah Kota Samarinda
Dinas Perhubungan Kota Samarinda



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau (Dokumen)															
	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau (Dokumen)	1														
2.15.03.2.11.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau				496.835.000		0		0		0		0		0		
Tersusunnya rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau (Dokumen)	1		496.835.000		0		0		0		0		0		
2.15.03.2.11.0002 - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau				0		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan	0	1	0	1	250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		



Pemerintah Kota Samarinda
Dinas Perhubungan Kota Samarinda



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau (Dokumen)															
2.15.03.2.11.0003 - Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau				0		0		0		0		0		0		
Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau (Laporan)	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0		
2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau				4.265.897.250		3.400.000.000		3.488.665.000		3.544.562.500		3.544.562.500		3.631.750.000		
Jumlah laporan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia (Unit)	4	5	4.265.897.250	5	3.400.000.000	5	3.488.665.000	5	3.544.562.500	5	3.544.562.500	5	3.631.750.000		
	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Laporan)															
	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)	5	5		5		5		5		5		5			
	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun (Unit)															
	Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi (Orang)	0	4		4		4		4		4		4			



Pemerintah Kota Samarinda
Dinas Perhubungan Kota Samarinda



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Orang)															
	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara (Unit)	-	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			
	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan (Unit)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan (Dokumen)															
2.15.03.2.13.0001 - Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan (Dokumen)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.15.03.2.13.0002 - Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Terbangunnya Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun (Unit)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.15.03.2.13.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau				296.488.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000		
Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau	5	5	296.488.000	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000		



Pemerintah Kota Samarinda
Dinas Perhubungan Kota Samarinda



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)															
2.15.03.2.13.0006 - Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau				2.918.193.250		1.900.000.000		1.988.665.000		2.044.562.500		2.044.562.500		2.131.750.000		
Terlaksananya Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan (Unit)	1	1	2.918.193.250	1	1.900.000.000	1	1.988.665.000	1	2.044.562.500	1	2.044.562.500	1	2.131.750.000		
2.15.03.2.13.0007 - Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau				733.528.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara (Unit)	-	6	733.528.000	6	750.000.000	6	750.000.000	6	750.000.000	6	750.000.000	6	750.000.000		
2.15.03.2.13.0008 - Fasilitas Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan				0		0		0		0		0		0		
Meningkatnya Kompetensi Personil bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Orang)			0		0		0		0		0		0		
2.15.03.2.13.0009 - Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Angkutan Sungai dan Danau				0		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Meningkatnya Kompetensi Personil bidang Angkutan Sungai dan Danau	Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi (Orang)	0	4	0	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000		
2.15.03.2.13.0010 - Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan				0		0		0		0		0		0		
Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Laporan)			0		0		0		0		0		0		



Pemerintah Kota Samarinda
Dinas Perhubungan Kota Samarinda



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.03.2.13.0011 - Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan				317.688.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia (Unit)	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia (Unit)	4	5	317.688.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000		
2.15.03.2.19 - Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal				0		0		0		0		0		0		
Jumlah laporan penerbitan izin pengelolaan TUKS				0		0		0		0		0		0		



Berdasarkan tabel tersebut diatas, maka perlu disusun kegiatan dan subkegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah sebagai rancangan akhir dalam kurun waktu 5 tahun kedepan sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 4.4. Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra OPD Dinas Perhubungan Kota Samarinda

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan Kota Samarinda				
1.	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 2.15.02.2.02.0001 - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 2.15.02.2.02.0003 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan 2.15.02.2.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 2.15.02.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 2.15.02.2.06.0004 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 2.15.02.2.06.0014 - Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 2.15.02.2.06.0015 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 2.15.02.2.06.0017 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 2.15.02.2.07 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.07.0006 - Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	
			2.15.02.2.08 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	
			2.15.02.2.08.0004 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.08.0007 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	
			2.15.02.2.08.0008 - Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	
			2.15.02.2.08.0009 - Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	
			2.15.02.2.09 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.09.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.09.0003 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.11 - Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.11.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.11.0002 - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			2.15.02.2.14 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.14.0003 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
2.	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Meningkatnya kualitas layanan Trasportasi Sungai	2.15.03.2.07 - Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.15.03.2.07.0003 - Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.15.03.2.07.0004 - Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.15.03.2.11 - Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	
			2.15.03.2.11.0002 - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	
			2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	
			2.15.03.2.13.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	
			2.15.03.2.13.0006 - Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	
			2.15.03.2.13.0007 - Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			2.15.03.2.13.0009 - Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Angkutan Sungai dan Danau	
			2.15.03.2.13.0011 - Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	
2.15.0.00.0.00.01.0001 - UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor				
3.	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			2.15.02.2.05.0001 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			2.15.02.2.05.0002 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			2.15.02.2.05.0003 - Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	
			2.15.02.2.05.0004 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			2.15.02.2.05.0005 - Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			2.15.02.2.05.0007 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	



Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan Kota Samarinda									
2.	Rasio Konektivitas	Nilai	92,22	57,67	42,97	53,74	68,79	79,56	100	

Tabel 4.6. Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra PD

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
2.	Konektivitas Sungai		Rasio	1	0,57	0,71	0,71	0,86	0,86	1	
3.	Konektivitas Darat	positif	Rasio	0,89	0,57	0,31	0,46	0,62	0,77	1,00	
4.	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal		Persentase	-	40%	45%	50%	55%	60%	65%	
5.	Persentase kendaraan layak uji	positif	%	-	53	55	56	58	59	61	
6.	Persentase kendaraan layak uji	positif	%	-	53%	55%	56%	58%	59%	61%	



4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Dalam bagian ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan PD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab PD. Selain itu, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Bagian ini merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program prioritas. Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya.

Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun/periode atau sebaliknya, menjadi operasional di periode berikutnya. Dalam hal suatu urusan atau program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi. Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala PD. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategik, menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan.

Indikator kinerja dampak (impact) yang menggambarkan capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah sejatinya akan menjadi indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah yang dipertanggungjawabkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam mendukung pencapaian IKU Wali Kota dan Wakil Wali Kota selama periode yang sama. Sedangkan indikator kinerja hasil (outcome) yang menggambarkan capaian dari implementasi program perangkat daerah Dinas Perhubungan Kota Samarinda dijadikan sebagai indikator kinerja kunci (IKK) yang akan menjadi bagian dari kinerja yang harus dipertanggungjawabkan para pejabat eselon III lingkup Dinas Perhubungan Kota Samarinda untuk mendukung pencapaian IKU Perangkat Daerah. Selengkapnya target-target capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda untuk periode 2025–2030 yang akan Disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini :



Tabel 4.7. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perhubungan Tahun 2025

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan Kota Samarinda										
I	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Konektivitas Sungai	Rasio	1	0,57	0,71	0,71	0,86	0,86	1	
2	Konektivitas Darat	Rasio	0,89	0,57	0,31	0,46	0,62	0,77	1,00	
3	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Persentase	-	40%	45%	50%	55%	60%	65%	
4	Persentase kendaraan layak uji	%	-	53%	55%	56%	58%	59%	61%	
2.15.0.00.0.00.01.0001 - UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor										
II	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Persentase kendaraan layak uji	%	-	53	55	56	58	59	61	

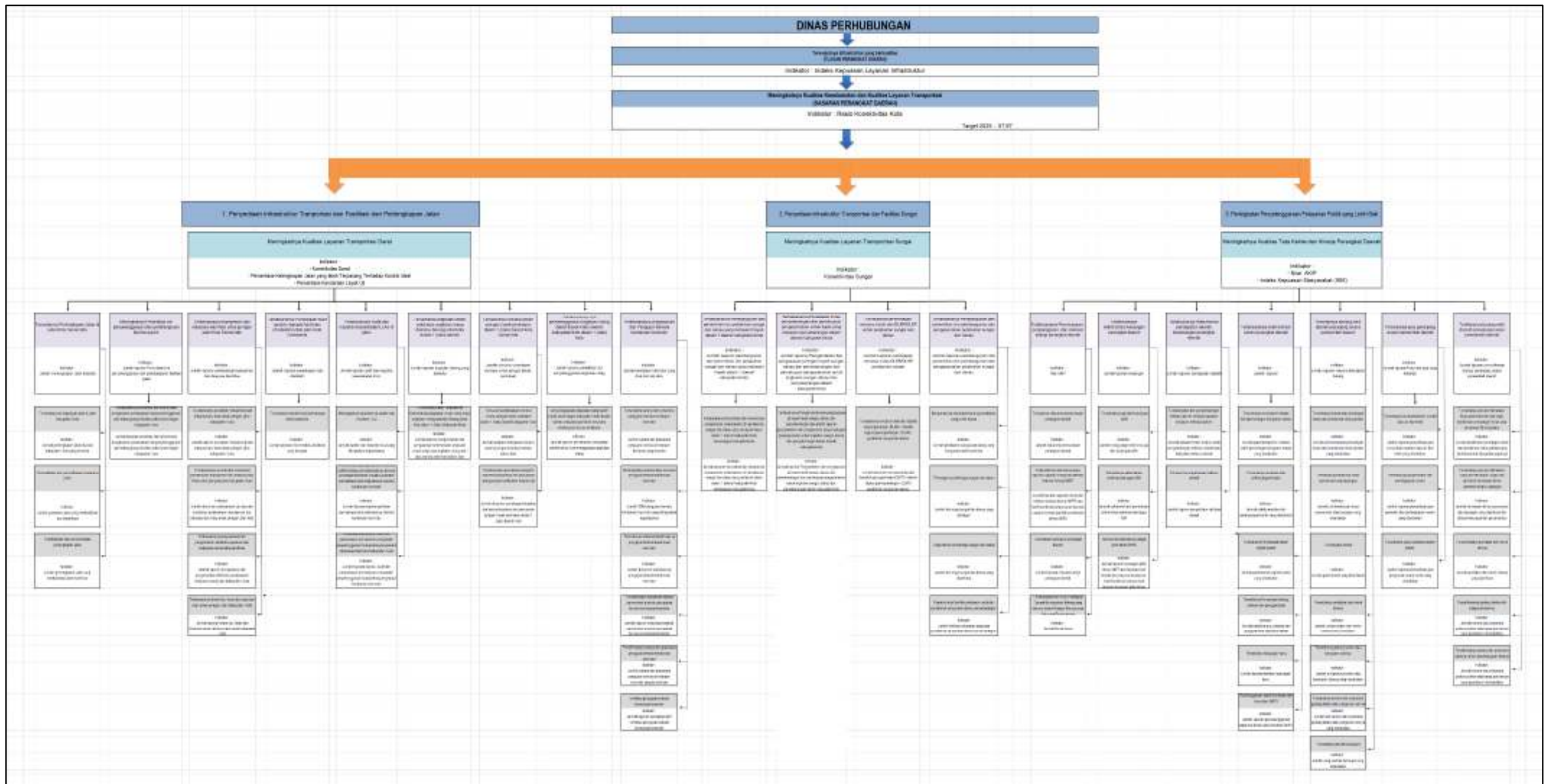
Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib dan pilihan). Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikasi rencana program prioritas PD berisi program-program, baik untuk mencapai Tujuan dan Sasaran pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan PD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi PD dalam penyusunan RENSTRA PD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pencapaian target kinerja program (outcome) di masing-masing urusan wajib/pilihan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD Kota Samarinda, APBD Propinsi dan APBN maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sumber-



sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat secara khusus diatur dalam Pasal 99 ayat (2) PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017, yaitu kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah yang didanai APBD dalam pencapaian sasarannya, melibatkan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun SDM dan teknologi. Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, penjelasan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.1 IKK gambar pohon kinerja dan tabel rencana kerja berikut ini:



Gambar 4.1. Pohon Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2025



Tabel 4.8. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2025-2030

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULASI/ INDIKATOR KELUARAN PADA OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
					KONDISI AWAL Tahun - 2025		Tahun - 2026		Tahun - 2027		Tahun-2028		Tahun-2029		Tahun-2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)
						117,500,111,789,00		83,458,313,958,00		85,433,313,000,00		86,588,000,000,00		88,280,769,500,00		90,105,639,950,00				
2.15.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai Akip	Nilai	80,00	55.095.983.413,00	82,00	54.458.313.958,00	84,00	55.765.313.000,00	86,00	56.500.500.000,00	88,00	57.630.510.750	89,00	58.783.120.950			Subbag Perencanaan program	Samarinda
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKM	Indeks	87,48		87,68		87,98		88,18		88,48		88,78				Sekretariat	Samarinda
2.15.01.2.01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Meningkatnya Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	%	100	221.556.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00				
2.15.01.2.01.0001	➢ Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	12	138.829.500,00	12	75.000.000,00	12	75.000.000,00	12	75.000.000,00	12	75.000.000,00	12	75.000.000,00			Subbag Perencanaan program	Samarinda
2.15.01.2.01.0002	➢ Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dokumen	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			Subbag Perencanaan program	Samarinda
2.15.01.2.01.0003	➢ Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA - SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Dokumen	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			Subbag Perencanaan program	Samarinda
2.15.01.2.01.0004	➢ Koordinasi dan penyusunan DPA - SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Dokumen	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			Subbag Perencanaan program	Samarinda
2.15.01.2.01.0005	➢ Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA - SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Dokumen	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			Subbag Perencanaan program	Samarinda
2.15.01.2.01.0006	➢ Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	2	41.152.750,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00			Subbag Perencanaan program	Samarinda
2.15.01.2.01.0007	➢ Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	28	41.573.750,00	28	50.000.000,00	28	50.000.000,00	28	50.000.000,00	28	50.000.000,00	28	50.000.000,00			Subbag Perencanaan program	Samarinda



KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULASI/ INDIKATOR KELUARAN PADA OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
					KONDISI AWAL Tahun - 2025		Tahun - 2026		Tahun - 2027		Tahun-2028		Tahun-2029		Tahun-2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)
2.15.01.2.02.0010	➢ Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara Hasil Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah pada Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara Hasil Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah pada Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	2	0,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00				
2.15.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	Meningkatnya Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	%	100	25.564.328.334,00	100	26.175.858.577,00	100	27.482.857.619,00	100	28.218.044.619,00	100	29.438.005.369,00	100	30.500.665.569,00				
2.15.01.2.02.0001	➢ Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	149	16.870.887.632,00	150	17.479.086.625,00		18.132.586.146,00		18.500.179.646,00		19.065.185.021,00		19.641.490.121,00			Subbag umum & kepegawaian	Samarinda
2.15.01.2.02.0002	➢ Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4	8.646.771.952,00	4	8.646.771.952,00	4	9.300.271.473,00	4	9.667.864.973,00	4	10.232.870.348,00	4	10.809.175.448,00			Subbag umum & kepegawaian	Samarinda
2.15.01.2.02.0005	➢ Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	4	46.668.750,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00			Subbag Keuangan	Samarinda
2.15.01.2.04	Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Meningkatnya Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Laju peningkatan pendapatan perangkat daerah	%	100	37.680.939,00	85	37.680.939,00	89	37.680.939,00	93	37.680.939,00	97	37.680.939,00	100	37.680.939,00				
2.15.01.2.04.0002	➢ Analisa dan pengembangan retribusi daerah serta penyusunan kebijakan retribusi daerah	Jumlah dokumen hasil analisis serta pengembangan retribusi daerah dan kebijakan retribusi daerah	Jumlah dokumen hasil analisis serta pengembangan retribusi daerah dan kebijakan retribusi daerah	Dokumen	4	18.802.514,00	1	18.802.514,00	2	18.802.514,00	2	18.802.514,00	2	18.802.514,00	2	18.802.514,00			Subbag Keuangan	Samarinda
2.15.01.2.04.0007	➢ Pelaporan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	Dokumen	4	18.878.425,00	1	18.878.425,00	2	18.878.425,00	2	18.878.425,00	2	18.878.425,00	2	18.878.425,00			Subbag Keuangan	Samarinda
2.15.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Meningkatnya Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase pegawai perangkat daerah yang mendapat pelayanan kepegawaian	%	8	0,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00				
2.15.01.2.05.0002	➢ Pengadaan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	-	0,00													Subbag umum & kepegawaian	Samarinda
2.15.01.2.05.0009	➢ Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			Subbag umum & kepegawaian	Samarinda
2.15.01.2.05.0011	➢ Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimek Peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimek Peraturan perundang-undangan	Orang	-	0,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00				
2.15.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	Meningkatnya Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	%	100	1.460.070.698,00	100	532.940.000,00	100	532.940.000,00	100	532.940.000,00	100	532.940.000,00	100	532.940.000,00				
2.15.01.2.06.0001	➢ Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah paket komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	5 Unit	61.080.400,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00			Subbag umum & kepegawaian	Samarinda



KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULASI/ INDIKATOR KELUARAN PADA OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
					KONDISI AWAL Tahun - 2025		Tahun - 2026		Tahun - 2027		Tahun-2028		Tahun-2029		Tahun-2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)
2.15.01.2.06.0002	➢ Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	5 Unit	760.202.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00			Subbag umum & kepegawaian	Samarinda
2.15.01.2.06.0003	➢ Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	50 Buah	0,00	50	20.000.000,00	50	20.000.000,00	50	20.000.000,00	50	20.000.000,00	50	20.000.000,00			Subbag umum & kepegawaian	Samarinda
2.15.01.2.06.0004	➢ Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	5 Unit	27.940.000,00	5	27.940.000,00	5	27.940.000,00	5	27.940.000,00	5	27.940.000,00	5	27.940.000,00			Subbag umum & kepegawaian	Samarinda
2.15.01.2.06.0005	➢ Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4 Dokumen	346.692.150,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00			Subbag umum & kepegawaian	Samarinda
2.15.01.2.06.0006	➢ Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	-	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00			Subbag umum & kepegawaian	Samarinda
2.15.01.2.06.0008	➢ Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Laporan	1	43.770.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00			Subbag umum & kepegawaian	Samarinda
2.15.01.2.06.0009	➢ Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	24 SPPD	220.386.148,00	24	200.000.000,00	24	200.000.000,00	24	200.000.000,00	24	200.000.000,00	24	200.000.000,00			Subbag umum & kepegawaian	Samarinda
2.15.01.2.06.0010	➢ Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Dokumen	4	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			Subbag umum & kepegawaian	Samarinda
2.15.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Meningkatnya Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan barang milik daerah penunjang	%	100	1.511.010.000,00	100	1.071.360.000,00	100	1.071.360.000,00	100	1.071.360.000,00	100	1.071.360.000,00	100	1.071.360.000,00				
2.15.01.2.07.0001	➢ Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	-	0,00	10	941.360.000,00	10	941.360.000,00	10	941.360.000,00	10	941.360.000,00	10	941.360.000,00			Subbag umum & kepegawaian	Samarinda
2.15.01.2.07.0002	➢ Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	-	1.011.075.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00			Subbag umum & kepegawaian	Samarinda
2.15.01.2.07.0004	➢ Pengadaan alat angkutan darat tak bermotor	Jumlah unit alat angkutan darat tak bermotor yang disediakan	Jumlah unit alat angkutan darat tak bermotor yang disediakan	Unit	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			Subbag umum & kepegawaian	Samarinda
2.15.01.2.07.0005	➢ Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit	-	499.935.000,00	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00			Subbag umum & kepegawaian	Samarinda
2.15.01.2.07.0006	➢ Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			Subbag umum & kepegawaian	Samarinda
2.15.01.2.07.0007	➢ Pengadaan aset tak berwujud	Jumlah yang aset tak berwujud yang disediakan	Jumlah yang aset tak berwujud yang disediakan	Unit	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			Subbag umum & kepegawaian	Samarinda
2.15.01.2.07.0009	➢ Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			Subbag umum & kepegawaian	Samarinda
2.15.01.2.07.0010	➢ Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			Subbag umum & kepegawaian	Samarinda
2.15.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Meningkatnya Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	%	100	25.121.729.542,00	100	25.171.729.542,00	100	25.171.729.542,00	100	25.171.729.542,00	100	25.171.729.542,00	100	25.171.729.542,00				
2.15.01.2.08.0002	➢ Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	11112 Bukti pembayaran	25.009.949.542,00	11112 Bukti pembayaran	25.009.949.542,00	11112 Bukti pembayaran	25.009.949.542,00	11112 Bukti pembayaran	25.009.949.542,00	11112 Bukti pembayaran	25.009.949.542,00	11112 Bukti pembayaran	25.009.949.542,00			Subbag umum & kepegawaian	Samarinda
2.15.01.2.08.0003	➢ Penyediaan jasa peralatan dan	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan	Laporan	-	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00			Subbag umum & kepegawaian	Samarinda



KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULASI/ INDIKATOR KELUARAN PADA OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Unit Kerja Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
					KONDISI AWAL Tahun - 2025		Tahun - 2026		Tahun - 2027		Tahun-2028		Tahun-2029		Tahun-2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)
	perlengkapan kantor	perlengkapan kantor yang disediakan	perlengkapan kantor yang disediakan																	
2.15.01.2.08.0004	➢ Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	10 Bukti pembayaran	111.780.000,00	10 Bukti pembayaran	111.780.000,00	10 Bukti pembayaran	111.780.000,00	10 Bukti pembayaran	111.780.000,00	10 Bukti pembayaran	111.780.000,00	10 Bukti pembayaran	111.780.000,00			Subbag umum & kepegawaian	Samarinda
2.15.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Meningkatnya Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik	%	100	1.179.607.900,00	100	1.168.744.900,00	100	1.168.744.900,00	100	1.168.744.900,00	100	1.168.744.900,00	100	1.168.744.900,00				
2.15.01.2.09.0001	➢ Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	-	0,00	5	70.000.000,00	5	70.000.000,00	5	70.000.000,00	5	70.000.000,00	5	70.000.000,00			Subbag umum & kepegawaian	Samarinda
2.15.01.2.09.0002	➢ Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	50 Unit	848.744.900,00	50	848.744.900,00	50	848.744.900,00	50	848.744.900,00	50	848.744.900,00	50	848.744.900,00			Subbag umum & kepegawaian	Samarinda
2.15.01.2.09.0006	➢ Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	-	0,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00			Subbag umum & kepegawaian	Samarinda
2.15.01.2.09.0009	➢ Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit	5 Gedung	139.624.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00			Subbag umum & kepegawaian	Samarinda
2.15.01.2.09.0010	➢ Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit	20 Unit	191.239.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00			Subbag umum & kepegawaian	Samarinda
2.15.02	Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Konektivitas Darat/Persentase Kelengkapan Jalan yang terpasang Terhadap Kondisi Ideal	Jumlah trayek yang dilayani pada kabupaten/kota dikali bobot trayek dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota	Rasio	0,58	57.421.976.626,00	0,31	25.145.000.000,00	0,46	25.724.335.000,00	0,62	26.087.937.500,00	0,77	26.650.696.250,00	1,00	27.235.769.000,00			Dinas Perhubungan	
2.15.02.2.02	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Persentase Kelengkapan Jalan yang terpasang Terhadap Kondisi Ideal	Jumlah perlengkapan jalan tersedia	Unit	9 Unit	47.099.709.949,00	9 Unit	16.964.523.000,00	9 Unit	17.543.858.000,00	9 Unit	17.907.460.500,00	9 Unit	18.470.219.250,00	9 Unit	19.055.292.000,00				
2.15.02.2.02.0001	➢ Pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten/kota	Jumlah prasarana jalan di jalan kabupaten / kota yang terbangun	Jumlah prasarana jalan di jalan kabupaten / kota yang terbangun	Unit	1 Unit	76.430.000,00	1 Unit	358.700.000,00	1 Unit	358.700.000,00	1 Unit	358.700.000,00	1 Unit	358.700.000,00	1 Unit	358.700.000,00			Seksi Prasarana jalan	
2.15.02.2.02.0002	➢ Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Jumlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten / kota yang tersedia	Jumlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten / kota yang tersedia	Unit	7 Unit	43.533.609.042,00	7 Unit	14.705.823.000,00	7 Unit	15.285.158.000,00	7 Unit	15.648.760.500,00	7 Unit	16.211.519.250,00	7 Unit	16.796.592.000,00			Seksi Prasarana jalan	
2.15.02.2.02.0003	➢ Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	Jumlah prasarana jalan yang terhabilitasi dan terpelihara	Jumlah prasarana jalan yang terhabilitasi dan terpelihara	Unit	1 Unit	500.000.000,00	1 Unit	400.000.000,00	1 Unit	400.000.000,00	1 Unit	400.000.000,00	1 Unit	400.000.000,00	1 Unit	400.000.000,00			Seksi Prasarana jalan	
2.15.02.2.02.0004	➢ Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang terhabilitasi dan terpelihara	Jumlah perlengkapan jalan yang terhabilitasi dan terpelihara	Unit	7 Unit	2.989.670.907,00	7 Unit	1.500.000.000,00	7 Unit	1.500.000.000,00	7 Unit	1.500.000.000,00	7 Unit	1.500.000.000,00	7 Unit	1.500.000.000,00			Seksi Prasarana jalan	
2.15.02.2.03	Pengelolaan terminal penumpang tipe C	Persentase Kelengkapan Jalan yang terpasang Terhadap Kondisi Ideal	Jumlah terminal tipe C terkelola	Unit	2 Unit	0,00	2 Unit	0,00	2 Unit	900.000.000,00	2 Unit	1.100.000.000,00	2 Unit	1.300.000.000,00	2 Unit	1.600.000.000,00				



KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULASI/ INDIKATOR KELUARAN PADA OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
					KONDISI AWAL Tahun - 2025		Tahun - 2026		Tahun - 2027		Tahun-2028		Tahun-2029		Tahun-2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)
2.15.02.2.03.0009	➢ Pembangunan terminal penumpang Tipe C yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang	Jumlah Terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang	Jumlah Terminal Tipe C yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang	Unit	1 Lokasi (Terminal pasar pagi)	0,00	1 Lokasi (Terminal pasar pagi)	0,00	1 Lokasi (Terminal pasar pagi)	0,00	1 Lokasi (Terminal pasar pagi)	0,00	1 Lokasi (Terminal pasar pagi)	0,00	1 Lokasi (Terminal pasar pagi)	0,00			Seksi Prasarana jalan	
2.15.02.2.03.0011	➢ Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal tipe C (fasilitas utama dan penunjang)	Jumlah terminal tipe C (fasilitas utama dan penunjang) yang terpelihara	Jumlah terminal tipe C (fasilitas utama dan penunjang) yang terpelihara	Unit	1 Lokasi (Terminal pasar pagi)	0,00	1 Lokasi (Terminal pasar pagi)	0,00	1 Lokasi (Terminal pasar pagi)	0,00	1 Lokasi (Terminal pasar pagi)	0,00	1 Lokasi (Terminal pasar pagi)	0,00	1 Lokasi (Terminal pasar pagi)	0,00			Seksi Prasarana jalan	
2.15.02.2.04	Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	Konektivitas Darat	Jumlah laporan Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	Laporan	4 Laporan	3.875.107.302,00	4 Laporan	2.750.000.000,00	4 Laporan	2.750.000.000,00	4 Laporan	2.750.000.000,00	4 Laporan	2.750.000.000,00	4 Laporan	2.750.000.000,00				
2.15.02.2.04.0002	➢ Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas parkir kewenangan kabupaten / kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas parkir kewenangan kabupaten / kota	Laporan	4 laporan	3.875.107.302,00	4 laporan	2.750.000.000,00	4 Laporan	2.750.000.000,00	4 laporan	2.750.000.000,00	4 laporan	2.750.000.000,00	4 laporan	2.750.000.000,00			Seksi Perparkiran	Samarinda
2.15.02.2.05	Pengujian berkala kendaraan bermotor	Persentase kendaraan layak uji	Jumlah kendaraan bermotor yang diuji dan laik jalan	Unit	18.000 Unit	2.671.735.000,00	18.500 Unit	1.975.000.000,00	19.000 Unit	1.975.000.000,00	19.500 Unit	1.975.000.000,00	20.000 Unit	1.975.000.000,00	20.500 Unit	1.975.000.000,00				
2.15.02.2.05.0001	➢ Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang tersedia	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang tersedia	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang tersedia	Unit	151 unit	975.281.000,00	125 unit	400.000.000,00	115 unit	400.000.000,00	130 unit	400.000.000,00	120 unit	400.000.000,00	130 unit	400.000.000,00			Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Samarinda
2.15.02.2.05.0002	➢ Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	8 orang	190.728.000,00	9 orang	175.000.000,00	10 orang	175.000.000,00	11 orang	175.000.000,00	12 orang	175.000.000,00	13 orang	175.000.000,00			Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Samarinda
2.15.02.2.05.0003	➢ Registrasi kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor yang terdaftar	Jumlah kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor yang terdaftar	Unit	1400 unit	100.000.000,00	1400 unit	100.000.000,00	1400 unit	100.000.000,00	1400 unit	100.000.000,00	1400 unit	100.000.000,00	1400 unit	100.000.000,00			Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Samarinda
2.15.02.2.05.0004	➢ Penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	Dokumen	12100 Dokumen	80.726.000,00	13700	400.000.000,00	9150	400.000.000,00	9150	400.000.000,00	13700	400.000.000,00	9150	400.000.000,00			Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Samarinda
2.15.02.2.05.0005	➢ Sosialisasi standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah laporan sosialisasi standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah laporan sosialisasi standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor	Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	4 Laporan	100.000.000,00	4 Laporan	100.000.000,00	4 Laporan	100.000.000,00	4 Laporan	100.000.000,00	4 Laporan	100.000.000,00			Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Samarinda
2.15.02.2.05.0006	➢ Identifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan bermotor wajib uji	Jumlah laporan identifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan bermotor wajib uji	Jumlah laporan identifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan bermotor wajib uji	Laporan	48 Uji Lokasi	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Samarinda
2.15.02.2.05.0007	➢ Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	Unit	85 Unit	1.225.000.000,00	100 Unit	800.000.000,00	90 Unit	800.000.000,00	90 unit	800.000.000,00	74 Unit	800.000.000,00	74 Unit	800.000.000,00			Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Samarinda
2.15.02.2.05.0008	➢ Koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	Laporan	5 Rapat Teknis	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Samarinda
2.15.02.2.05.0009	➢ Penetapan tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah laporan penetapan tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah laporan penetapan tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor	Laporan	3 Dokumen	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Samarinda



KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULASI/ INDIKATOR KELUARAN PADA OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
					KONDISI AWAL Tahun - 2025		Tahun - 2026		Tahun - 2027		Tahun-2028		Tahun-2029		Tahun-2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)
2.15.02.2.05.0010	➢ Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	Laporan	5 Dokumen	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	Samarinda
2.15.02.2.06	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Konektivitas Darat	Jumlah laporan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Laporan	1 Laporan	1.922.520.000,00	1 Laporan	1.525.000.000,00	1 Laporan	1.525.000.000,00	1 Laporan	1.525.000.000,00	1 Laporan	1.525.000.000,00	1 Laporan	1.525.000.000,00				
2.15.02.2.06.0004	➢ Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten / kota	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten / kota	Laporan	4 Dokumen	1.448.588.000,00	4 Dokumen	500.000.000,00	4 Dokumen	500.000.000,00	4 Dokumen	500.000.000,00	4 Dokumen	500.000.000,00	4 Dokumen	500.000.000,00			Seksi Lalu lintas	Samarinda
2.15.02.2.06.0014	➢ Sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Jumlah Laporan Sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Jumlah Laporan Sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Dokumen	12 Kali	214.602.500,00	12 Kali	750.000.000,00	12 Kali	750.000.000,00	12 Kali	750.000.000,00	12 Kali	750.000.000,00	12 Kali	750.000.000,00			Seksi Daltib	Samarinda
2.15.02.2.06.0015	➢ Forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Laporan	10 Kali & 1 Penghargaan	60.600.000,00	10 Kali & 1 Penghargaan	75.000.000,00	10 Kali & 1 Penghargaan	75.000.000,00	10 Kali & 1 Penghargaan	75.000.000,00	10 Kali & 1 Penghargaan	75.000.000,00	10 Kali & 1 Penghargaan	75.000.000,00			Seksi Lalu lintas	Samarinda
2.15.02.2.06.0017	➢ Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten / kota	Laporan	4 Laporan	198.729.500,00	4 Laporan	200.000.000,00	4 Laporan	200.000.000,00	4 Laporan	200.000.000,00	4 Laporan	200.000.000,00	4 Laporan	200.000.000,00			Seksi Lalu lintas	Samarinda
2.15.02.2.07	Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota	Konektivitas Darat	Jumlah laporan persetujuan hasil Andalalin	Laporan	4 Laporan	99.107.500,00	4 Laporan	100.000.000,00	4 Laporan	100.000.000,00	4 Laporan	100.000.000,00	4 Laporan	100.000.000,00	4 Laporan	100.000.000,00				
2.15.02.2.07.0006	➢ Pengawasan pelaksanaan rekomendasi persetujuan teknis Andalalin yang terawasi	Jumlah laporan rekomendasi persetujuan teknis Andalalin yang terawasi	Jumlah laporan rekomendasi persetujuan teknis Andalalin yang terawasi	Laporan	4 Laporan	99.107.500,00	4 Laporan	100.000.000,00	4 Laporan	100.000.000,00	4 Laporan	100.000.000,00	4 Laporan	100.000.000,00	4 Laporan	100.000.000,00			Seksi Lalu lintas	Samarinda
2.15.02.08	Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	Persentase kendaraan layak uji	Jumlah laporan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ	Laporan	1 Laporan	444.869.750,00	1 Laporan	565.000.000,00	1 Laporan	565.000.000,00	1 Laporan	565.000.000,00	1 Laporan	565.000.000,00	1 Laporan	565.000.000,00				
2.15.02.08.0003	➢ Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan terminal	Jumlah laporan inspeksi, audit dan pemantauan terminal	Jumlah laporan inspeksi, audit dan pemantauan terminal	Laporan	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			Seksi keselamatan jalan	Samarinda
2.15.02.08.0004	➢ Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/kota	Jumlah laporan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/kota	Jumlah laporan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/kota	Laporan	12	250.717.500,00	12	300.000.000,00	12	300.000.000,00	12	300.000.000,00	12	300.000.000,00	12	300.000.000,00			Seksi keselamatan jalan	Samarinda
2.15.02.08.0007	➢ Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum	Jumlah laporan inspeksi, audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum	Jumlah laporan inspeksi, audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum	Laporan	4	0,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00			Seksi keselamatan jalan	Samarinda



KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULASI/ INDIKATOR KELUARAN PADA OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
					KONDISI AWAL Tahun - 2025		Tahun - 2026		Tahun - 2027		Tahun-2028		Tahun-2029		Tahun-2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)
2.15.02.08.0008	➢ Peningkatan kapasitas auditor dan inspektur lalu lintas dan angkutan jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah auditor dan inspektur lalu lintas dan angkutan jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah auditor dan inspektur lalu lintas dan angkutan jalan	Orang	8	129.716.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00			Seksi keselamatan jalan	Samarinda
2.15.02.08.0009	➢ Pelaksanaan pengawasan melalui uji petik terhadap unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor	Jumlah laporan uji petik terhadap unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor	Jumlah laporan uji petik terhadap unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor	Laporan	4	64.436.250,00	4	115.000.000,00	4	115.000.000,00	4	115.000.000,00	4	115.000.000,00	4	115.000.000,00			Seksi keselamatan jalan	Samarinda
2.15.02.2.09	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Konektivitas Darat	Jumlah laporan angkutan barang yang tersedia	Laporan	4 Laporan	1.060.005.000,00	4 Laporan	647.602.000,00	4 Laporan	647.602.000,00	4 Laporan	647.602.000,00	4 Laporan	647.602.000,00	4 Laporan	647.602.000,00				
2.15.02.2.09.0002	➢ Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten / kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten / kota	Laporan	4 Laporan	90.181.000,00	4 Laporan	97.602.000,00	4 Laporan	97.602.000,00	4 Laporan	97.602.000,00	4 Laporan	97.602.000,00	4 Laporan	97.602.000,00			Seksi Angkutan Khusus	Samarinda
2.15.02.2.09.0003	➢ Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah armada angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	Jumlah angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	Unit	-	969.824.000,00	24 Unit	550.000.000,00	40 Unit	550.000.000,00	53 Unit	550.000.000,00	67 Unit	550.000.000,00	80 Unit	550.000.000,00			Seksi Angkutan Jalan	
2.15.02.2.11	Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Konektivitas Darat	Jumlah dokumen penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan	Dokumen	1 Dokumen	113.368.625,00	1 Dokumen	375.000.000,00	1 Dokumen	375.000.000,00	1 Dokumen	375.000.000,00	1 Dokumen	375.000.000,00	1 Dokumen	375.000.000,00				
2.15.02.2.11.0001	➢ Pelaksanaan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota	Jumlah dokumen kebijakan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota	Dokumen	-	0,00	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00			Seksi Angkutan Jalan	Samarinda
2.15.02.2.11.0002	➢ Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen penetapan kebijakan dan tersosialisasinya rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota	Jumlah dokumen penetapan kebijakan dan tersosialisasinya rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota	Dokumen	1 Dokumen	113.368.625,00	1 Dokumen	225.000.000,00	1 Dokumen	225.000.000,00	1 Dokumen	225.000.000,00	1 Dokumen	225.000.000,00	1 Dokumen	225.000.000,00			Seksi Angkutan Jalan	Samarinda
2.15.02.2.11.0003	➢ Pengendalian pelaksanaan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan pengendalian pelaksanaan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota	Jumlah dokumen kebijakan pengendalian pelaksanaan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota	Dokumen	1 Dokumen	0,00		0,00	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0,00			Seksi Angkutan Jalan	Samarinda



KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULASI/ INDIKATOR KELUARAN PADA OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
					KONDISI AWAL Tahun - 2025		Tahun - 2026		Tahun - 2027		Tahun-2028		Tahun-2029		Tahun-2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)
2.15.02.2.13	Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Konektivitas Darat	Jumlah dokumen penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi	Dokumen	-	0,00		0,00	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0,00		0,00				
2.15.02.2.13.0001	➢ Perumusan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan kabupaten / kota	Jumlah dokumen kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan kabupaten / kota	Dokumen	-	0,00		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			Seksi Angkutan Jalan	Samarinda
2.15.02.2.13.0002	➢ Sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan kabupaten / kota	Jumlah dokumen sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan kabupaten / kota	Dokumen	-	0,00		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			Seksi Angkutan Jalan	Samarinda
2.15.02.2.14	Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah/kota	Konektivitas Darat	Jumlah laporan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang	Laporan	4 Laporan	135.553.500,00	4 Laporan	242.875.000,00	4 Laporan	242.875.000,00	4 Laporan	242.875.000,00	4 Laporan	242.875.000,00	4 Laporan	242.875.000,00				
2.15.02.2.14.0002	➢ Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten / kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten / kota	Laporan	4 Laporan	0,00	4 Laporan	0,00	4 Laporan	0,00	4 Laporan	0,00	4 Laporan	0,00	4 Laporan	0,00			Seksi Angkutan Jalan	Samarinda
2.15.02.2.14.0003	➢ Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah laporan pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten / kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah laporan pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten / kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Laporan (Unit)	4 Laporan	135.553.500,00	4 Laporan	242.875.000,00	4 Laporan	242.875.000,00	4 Laporan	242.875.000,00	4 Laporan	242.875.000,00	4 Laporan	242.875.000,00			Seksi Angkutan Jalan	Samarinda
2.15.02.2.15	Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Konektivitas Darat	Jumlah laporan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi	Laporan	4 Laporan	0,00	4 Laporan	0,00	4 Laporan	0,00	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0,00				



KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULASI/ INDIKATOR KELUARAN PADA OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
					KONDISI AWAL Tahun - 2025		Tahun - 2026		Tahun - 2027		Tahun-2028		Tahun-2029		Tahun-2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)
2.15.02.2.15.0003	➢ Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah persetujuan izin angkutan taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang telah memenuhi persyaratan	Jumlah persetujuan izin angkutan taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang telah memenuhi persyaratan	Unit	50 Unit	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			Seksi Angkutan Jalan	Samarinda
2.15.02.2.15.0004	➢ Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	2 Dokumen	0,00	2 Dokumen	0,00	2 Dokumen	0,00	2 Dokumen	0,00	2 Dokumen	0,00	2 Dokumen	0,00			Seksi Angkutan Jalan	Samarinda
2.15.02.2.16	Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Konektivitas Darat	Jumlah Laporan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang	Laporan	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00				
2.15.02.2.16.0001	➢ Analisis tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen analisis tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota	Jumlah dokumen analisis tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota	Dokumen	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			Seksi Angkutan Jalan	Samarinda
2.15.02.2.16.0002	➢ Penyediaan data dan informasi tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah data dan informasi tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota	Jumlah data dan informasi tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota	Dokumen	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			Seksi Angkutan Jalan	Samarinda
2.15.02.2.16.0003	➢ Pengendalian dan pengawasan tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota	Laporan	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			Seksi Angkutan Jalan	Samarinda
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Kontektivitas Sungai	Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada Kabupaten/kota dikali bobot lintas SDP dibagi jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada Kabupaten/kota	Rasio	0,57	4.982.151.750,00	0,71	3.855.000.000,00	0,71	3.943.665.000,00	0,86	3.999.562.500,00	0,86	3.999.562.500,00	1,00	4.086.750.000,00			Dinas Perhubungan	Samarinda



KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULASI/ INDIKATOR KELUARAN PADA OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
					KONDISI AWAL Tahun - 2025		Tahun - 2026		Tahun - 2027		Tahun-2028		Tahun-2029		Tahun-2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)
2.15.03.2.03	Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha	Konektivitas Sungai	Jumlah laporan penerbitan izin usaha angkutan sungai	Laporan	1 Dokumen	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00				
2.15.03.2.03.0001	➢ Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha kewenangan kabupaten/kota dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen persyaratan perolehan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha kewenangan kabupaten / kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha kewenangan kabupaten / kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Dokumen	200 Dokumen	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			Seksi Angkutan & dermaga Sungai	Samarinda
2.15.03.2.03.0002	➢ Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha kewenangan kabupaten/kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha kewenangan kabupaten / kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha kewenangan kabupaten / kota	Laporan	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			Seksi Angkutan & dermaga Sungai	Samarinda
2.15.03.2.04	Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 daerah kabupaten/kota	Konektivitas Sungai	Jumlah laporan pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 daerah kabupaten/kota	Laporan	1 Laporan	80.605.500,00	1 Laporan	0,00	1 Laporan	0,00	1 Laporan	0,00	1 Laporan	0,00	1 Laporan	0,00				
2.15.03.2.04.0002	➢ Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 daerah kabupaten/kota kewenangan kabupaten/kota	Jumlah laporan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 daerah kabupaten/kota kewenangan kabupaten/kota	Jumlah laporan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 daerah kabupaten/kota kewenangan kabupaten/kota	Laporan	4 Laporan	80.605.500,00	4 Laporan	0,00	4 Laporan	0,00	4 Laporan	0,00	4 Laporan	0,00	4 Laporan	0,00			Seksi Keselamatan Pelayaran	Samarinda
2.15.03.2.05	Penerbitan ijin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha	Konektivitas Sungai	Jumlah laporan penerbitan ijin usaha angkutan penyeberangan	Laporan	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00				



KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULASI/ INDIKATOR KELUARAN PADA OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
					KONDISI AWAL Tahun - 2025		Tahun - 2026		Tahun - 2027		Tahun-2028		Tahun-2029		Tahun-2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)
2.15.03.2.05.0002	➢ Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha kewenangan kabupaten/kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha kewenangan kabupaten / kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha kewenangan kabupaten / kota	Laporan	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			Seksi Keselamatan Pelayaran	Samarinda
2.15.03.2.07	Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota	Konektivitas Sungai	Jumlah laporan penetapan lintas penyeberangan	Laporan	1 Laporan	138.814.000,00	1 Laporan	205.000.000,00	1 Laporan	205.000.000,00	1 Laporan	205.000.000,00	1 Laporan	205.000.000,00	1 Laporan	205.000.000,00				
2.15.03.2.07.0003	➢ Penyediaan data dan informasi jaringan trayek sungai, danau dan penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan dalam kabupaten/kota	Jumlah data dan informasi jaringan trayek sungai, danau dan penyeberangan dan disetujuinya pengoperasian untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan dalam kabupaten/kota	Jumlah data dan informasi jaringan trayek sungai, danau dan penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan dalam kabupaten/kota	Dokumen	-	0,00	1 Dokumen	80.000.000,00	1 Dokumen	80.000.000,00	1 Dokumen	80.000.000,00	1 Dokumen	80.000.000,00	1 Dokumen	80.000.000,00			Seksi Angkutan & Dermaga Sungai	Samarinda
2.15.03.2.07.0004	➢ Pengendalian dan pengawasan jaringan trayek sungai, danau dan penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan dalam kabupaten/kota	Jumlah laporan Pengendalian dan pengawasan jaringan trayek sungai, danau dan penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan pengoperasian untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan Pengendalian dan pengawasan jaringan trayek sungai, danau dan penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan dalam kabupaten/kota	Laporan	-	138.814.000,00	4 Laporan	125.000.000,00	4 Laporan	125.000.000,00	4 Laporan	125.000.000,00	4 Laporan	125.000.000,00	4 Laporan	125.000.000,00			Seksi Keselamatan Pelayaran	Samarinda
2.15.03.2.08	Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal	Konektivitas Sungai	Jumlah laporan penerbitan izin usaha jasa perawatan dan perbaikan kapal	Laporan	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00				
2.15.03.2.08.0001	➢ Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Dokumen	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			Seksi Angkutan & Dermaga Sungai	Samarinda



KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULASI/ INDIKATOR KELUARAN PADA OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
					KONDISI AWAL Tahun - 2025		Tahun - 2026		Tahun - 2027		Tahun-2028		Tahun-2029		Tahun-2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)
2.15.03.2.08.0002	➢ Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa terkait dengan perawatan kapal dan perbaikan kapal	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa terkait dengan perawatan kapal dan perbaikan kapal	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal	Laporan	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			Seksi Keselamatan Pelayaran	Samarinda
2.15.03.2.09	Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota	Konektivitas Sungai	Jumlah Laporan penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi	Laporan	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00				
2.15.03.2.09.0001	➢ Analisis tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen analisis tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten / kota	Jumlah dokumen analisis tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten / kota	Dokumen	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			Seksi Angkutan & dermaga Sungai	Samarinda
2.15.03.2.09.0002	➢ Penyediaan data dan informasi tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah data dan informasi tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah data dan informasi tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota	Dokumen	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			Seksi Angkutan & dermaga Sungai	Samarinda
2.15.03.2.09.0003	➢ Pengendalian dan pengawasan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten / kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten / kota	Laporan	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			Seksi Angkutan & dermaga Sungai	Samarinda
2.15.03.2.11	Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau	Konektivitas Sungai	Jumlah Laporan penetapan rencana induk DLKR/DLKP pelabuhan sungai	Laporan	-	496.835.000,00	1 Laporan	250.000.000,00	1 Laporan	250.000.000,00	1 Laporan	250.000.000,00	1 Laporan	250.000.000,00	1 Laporan	250.000.000,00				
2.15.03.2.11.0001	➢ Pelaksanaan penyusunan rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR)/Daerah lingkungan kepentingan (DLKP) untuk pelabuhan sungai dan danau	Jumlah dokumen rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR) / daerah lingkungan kepentingan (DLKP) pelabuhan sungai dan danau	Jumlah dokumen rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR) / daerah lingkungan kepentingan (DLKP) pelabuhan sungai dan danau	Dokumen	1 Dokumen	496.835.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			Seksi prasarana sungai	Samarinda



KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULASI/ INDIKATOR KELUARAN PADA OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
					KONDISI AWAL Tahun - 2025		Tahun - 2026		Tahun - 2027		Tahun-2028		Tahun-2029		Tahun-2030				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)
2.15.03.2.11.0002	➢ Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR)/Daerah lingkungan kepentingan (DLKP) untuk pelabuhan sungai dan danau	Jumlah dokumen penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR) / daerah lingkungan kepentingan (DLKP) pelabuhan sungai dan danau	Jumlah dokumen penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR) / daerah lingkungan kepentingan (DLKP) pelabuhan sungai dan danau	Dokumen	-	0,00	1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	250.000.000,00			Seksi prasarana sungai	Samarinda
2.15.03.2.11.0003	➢ Pengendalian pelaksanaan rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR)/Daerah lingkungan kepentingan (DLKP) untuk pelabuhan sungai dan danau	Jumlah laporan pengendalian pelaksanaan rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR) / daerah lingkungan kepentingan (DLKP) pelabuhan sungai dan danau	Jumlah laporan pengendalian pelaksanaan rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR) / daerah lingkungan kepentingan (DLKP) pelabuhan sungai dan danau	Laporan	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			Seksi prasarana sungai	Samarinda
2.15.03.2.13	Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	Konektivitas Sungai	Jumlah laporan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	Laporan	1 Laporan	4.265.897.250,00	1 Laporan	3.400.000.000,00	1 Laporan	3.448.665.000,00	1 Laporan	3.544.562.500,00	1 Laporan	3.544.562.500,00	1 Laporan	3.631.750.000,00				
2.15.03.2.13.0001	➢ Fasilitasi pemenuhan persyaratan perizinan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	Jumlah dokumen pemenuhan persyaratan perizinan pelabuhan sungai dan danau yang dilaksanakan	Jumlah dokumen pemenuhan persyaratan perizinan pelabuhan sungai dan danau yang dilaksanakan	Dokumen	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00				Samarinda
2.15.03.2.13.0002	➢ Pembangunan pelabuhan sungai dan danau	Jumlah pelabuhan sungai dan danau yang dibangun	Jumlah pelabuhan sungai dan danau yang dibangun	Unit	1 Unit (Lanjutan 15 persen) (26 + 15 = 41 persen)	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00				Samarinda
2.15.03.2.13.0003	➢ Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau	Jumlah pelabuhan sundai dan danau yang beroperasi dan terpelihara	Jumlah pelabuhan sundai dan danau yang beroperasi dan terpelihara	Unit	5 Unit	296.488.000,00	5 Unit	250.000.000,00	5 Unit	250.000.000,00	5 Unit	250.000.000,00	5 Unit	250.000.000,00	5 Unit	500.000.000,00				Samarinda
2.15.03.2.13.0006	➢ Pembangunan dermaga sungai dan danau	Jumlah dermaga sungai dan danau yang dibangun	Jumlah dermaga sungai dan danau yang dibangun	Unit	-	2.918.193.250,00	1 Lokasi	1.900.000.000,00	1 Lokasi	5.150.000.000,00	2 Lokasi	5.150.000.000,00	2 Lokasi	5.150.000.000,00	2 Lokasi	5.150.000.000,00				Samarinda
2.15.03.2.13.0007	➢ Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah dermaga sungai dan danau yang dipelihara	Jumlah dermaga sungai dan danau yang dipelihara	Unit	-	733.528.000,00	6 Unit	750.000.000,00	6 Unit	750.000.000,00	6 Unit	750.000.000,00	6 Unit	750.000.000,00	6 Unit	750.000.000,00				Samarinda
2.15.03.2.13.0009	➢ Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Angkutan Sungai dan Danau	Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	Orang	-		4 Orang	300.000.000,00	4 Orang	300.000.000,00	4 Orang	300.000.000,00	4 Orang	300.000.000,00	4 Orang	300.000.000,00				
2.15.03.2.13.0011	➢ Pemenuhan fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan sungai dan danau penyeberangan	Jumlah fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan sungai dan danau penyeberangan	Jumlah fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan sungai dan danau penyeberangan	Unit	-	317.688.000,00	5 Unit	200.000.000,00	5 Unit	200.000.000,00	5 Unit	200.000.000,00	5 Unit	200.000.000,00	5 Unit	200.000.000,00				Samarinda



KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	FORMULASI/ INDIKATOR KELUARAN PADA OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
					KONDISI AWAL Tahun - 2025		Tahun - 2026		Tahun - 2027		Tahun-2028		Tahun-2029		Tahun-2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)	
2.15.03.2.19	Penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal	Konektivitas Sungai	Jumlah laporan penerbitan izin pengelolaan TUKS	Laporan	1 Laporan	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
2.15.03.2.19.0002	> Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR / DLKP pelabuhan pengumpan lokal	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR / DLKP pelabuhan pengumpan lokal	Laporan	4 Laporan	0,00	1 Laporan	0,00	1 Laporan	0,00	1 Laporan	0,00	1 Laporan	0,00	1 Laporan	0,00			Seksi Prasarana multimoda	Samarinda	





BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Samarinda disusun dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah khususnya di sektor transportasi serta untuk menjadi arah dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan Perhubungan bagi seluruh unit kerja dan stakeholder dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Dokumen Rencana Strategis ini menguraikan strategi, kebijakan, tujuan, sasaran, program dan kegiatan, indikator kinerja yang digunakan beserta target yang harus dicapai lima tahun yang akan datang, dan prediksi anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran.

Dokumen Renstra Dinas Perhubungan ini disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai faktor yang bersumber dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa substansi pada dokumen tersebut tidak dapat mengalami perubahan. Penyusunan dokumen renstra didasari oleh kesadaran bahwa lingkungan strategis bersifat sangat dinamis, sehingga selalu terbuka kemungkinan bagi proses perubahan dalam dokumen Renstra. Dalam konteks dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kota Samarinda ini, perubahan tersebut juga masih dimungkinkan untuk proses penyesuaian dalam lingkungan. Untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Samarinda secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Samarinda 2025-2029 dengan sebaik baiknya.
2. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Samarinda dijabarkan kedalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda (Renja) Tahun 2025 s/d 2029 dan menjadi acuan bagi Unit Kerja dilingkungan Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 sampai tahun 2029.
3. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Samarinda diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 s/d 2029 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025 s/d 2029 khususnya sektor perhubungan.
4. Dinas Perhubungan Kota Samarinda berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Strategis dengan Rencana Kerja unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Samarinda.



5. Hal – hal yang dirasakan memerlukan perkembangan dan belum terakomodir serta dipandang strategis, akan diinventarisir kemudian dijadikan bahan masukan yang harus dibicarakan dalam forum Tim Teknis Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Samarinda dan instansi terkait lainnya.
6. Dalam rangka menjaga efektivitas pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Samarinda 2025-2029, masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Samarinda berkewajiban melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan Rencana Strategis dalam keterkaitannya dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda (Renja) Tahun 2025 s/d 2029.
7. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2025-2029 diharapkan dapat membuat pelayanan Dinas Perhubungan semakin lebih baik.